

# Jurnal Perencanaan

## Volume V, 2018



Cetakan I

**Agus Salim**

*Kemiskinan di Perkotaan Yogyakarta dan Signifikansinya dalam Penanggulangan Kemiskinan di DIY*

**Antarikso Trisno Bawono**

*Peningkatan Efisiensi Usaha Tani melalui Model Konsolidasi Corporate Farming*

**Imam Budidharma**

*Faktor-Faktor Pendorong Kewirausahaan*

**Imam Karyadi Aryanto**

*Visi Misi RPJMD DIY 2017-2022 dan Peta Jalan Tematik Perencanaan Pembangunan Daerah DIY: Studi Kasus*

**Pangky Arbindarta Kusuma**

*Pariwisata: Strategi untuk Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan di DIY*



Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Tahun 2018

Komplek Kepatihan Danurejan  
Yogyakarta 55213  
Telp. 0274-562811 (Psw. 1209-1220, 1243-1247, 1253), 589583  
Fax. 0274-586712  
website <http://bappeda.jogjaprovo.go.id>  
e-mail : [bappeda@bappeda.jogjaprovo.go.id](mailto:bappeda@bappeda.jogjaprovo.go.id)



Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Tahun 2018

## **JURNAL PERENCANAAN**

Volume V, Tahun 2018

### **Diterbitkan oleh**

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

### **Apresiasi**

Ucapan terimakasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu pelaksanaan penyusunan Jurnal Perencanaan, yaitu Tim Penerbitan Jurnal Perencana Tahun 2018.

### **Penanggungjawab**

Tavip Agus Rayanto

### **Pemimpin Dewan Redaksi**

Dra. Wrih Puji Rarasati, M.Si.

### **Penyunting**

Ir. Ika Warakasih, MT.  
Budi Sanyoto, SE.

### **Reviewer/Mitra Bestari**

Dr. Nurhadi Susanto, SH., MHum. – Universitas Gadjah Mada

### **Penulis Naskah**

Agus Salim, SE., MA.  
Antarikso Trisno Bawono, ST. MT.  
Imam Budidharma, ST., MEcdev.  
Imam Karyadi Aryanto, SIP., MPA.  
Pangky Arbindarta Kusuma, SE.

### **Penata Letak/Layout**

Iwan Sutardi Budi Santoso, ST., MEng.

### **Juru Gambar**

Purnama

### **Sekretariat**

Dwi Endah Cahyani, ST.  
Siti Asiyah

# KATA PENGANTAR

---

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga Jurnal Perencanaan Volume V dapat terselesaikan. Jurnal ini disusun sebagai bagian dari proses memberikan ruang akademik sekaligus mempublikasikan hasil penulisan artikel para Pejabat Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BAPPEDA DIY). Penulisan artikel pada jurnal ini merupakan upaya BAPPEDA DIY mendorong peningkatan kompetensi pejabat fungsional perencana dalam penulisan artikel perencanaan.

Buku Jurnal Perencanaan ini memuat 5 (lima) artikel dari berbagai isu dan sejumlah alternatif solusi untuk bahan pengambilan kebijakan strategis. Bahkan, beberapa substansi yang disampaikan tersebut memuat konsep dan pendekatan perencanaan multidimensi yang diharapkan dapat memperkaya khazanah perencanaan bagi publik dan menjadi bahan masukan dalam proses perencanaan pembangunan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang oleh para pemangku kepentingan di DIY.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal ini. Semoga Jurnal Perencanaan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, Desember 2018

KEPALA

TAVIP AGUS RAYANTO

# DAFTAR ISI

---

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>Kemiskinan di Perkotaan Yogyakarta dan Signifikansinya dalam Penanggulangan Kemiskinan di DIY .....</b>	<b>1</b>
Agus Salim .....	1
<b>Peningkatan Efisiensi Usaha Tani melalui Model Konsolidasi Corporate Farming....</b>	<b>13</b>
Antarikso Trisno Bawono.....	13
<b>Faktor-Faktor Pendorong Kewirausahaan .....</b>	<b>25</b>
Imam Budidharma .....	25
<b>Visi Misi RPJMD DIY 2017-2022 dan Peta Jalan Tematik Perencanaan Pembangunan Daerah DIY: Studi Kasus .....</b>	<b>32</b>
Imam Karyadi Aryanto .....	32
<b>Pariwisata: Strategi untuk Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan di DIY .....</b>	<b>49</b>
Pangky Arbindarta Kusuma .....	49

*(halaman ini sengaja dikosongkan)*

# Kemiskinan di Perkotaan Yogyakarta dan Signifikansinya dalam Penanggulangan Kemiskinan di DIY

**Agus Salim**

[agus-salim@hotmail.com](mailto:agus-salim@hotmail.com)

Perencana Pertama, Bappeda Kota Yogyakarta

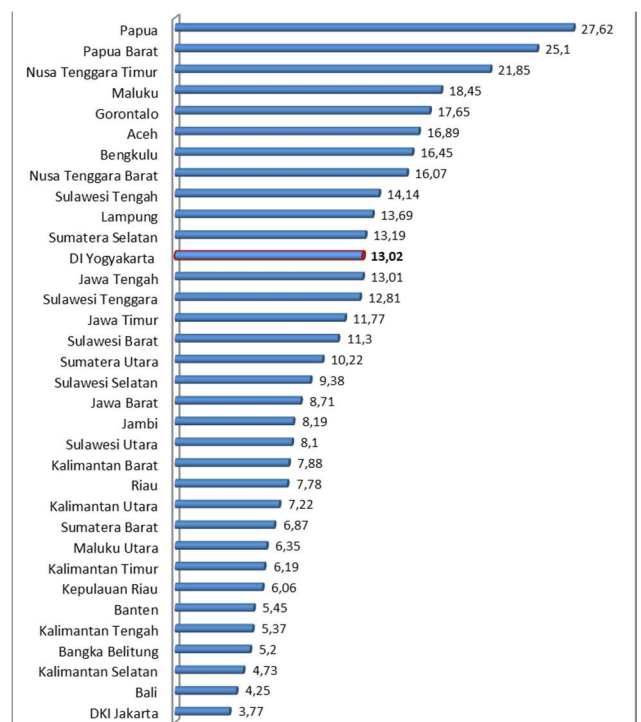
## Abstrak

Tingkat kemiskinan di DIY merupakan yang tertinggi di Pulau Jawa sehingga menggelisahkan berbagai pihak. Makalah ini mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang merupakan penyebab utama kemiskinan tersebut layak dijadikan sebagai prioritas penanganan. Hasil identifikasi menyebutkan bahwa kemiskinan perkotaan menyumbang angka yang sangat signifikan, yaitu 66% dari keseluruhan penduduk miskin di DIY. Wilayah perkotaan DIY, terdiri dari seluruh kecamatan di Kota Yogyakarta, 8 Kecamatan di Kabupaten Sleman dan 4 Kecamatan di Kabupaten Bantul, menyumbang 60% dari total kemiskinan perkotaan di DIY. Kemiskinan di wilayah tersebut cukup signifikan karena mencakup keseluruhan penduduk miskin di Kota Yogyakarta, 70% penduduk miskin Sleman dan 33% penduduk miskin Bantul.

**Kata kunci:** kemiskinan, miskin, perkotaan, Yogyakarta

## A. Pendahuluan

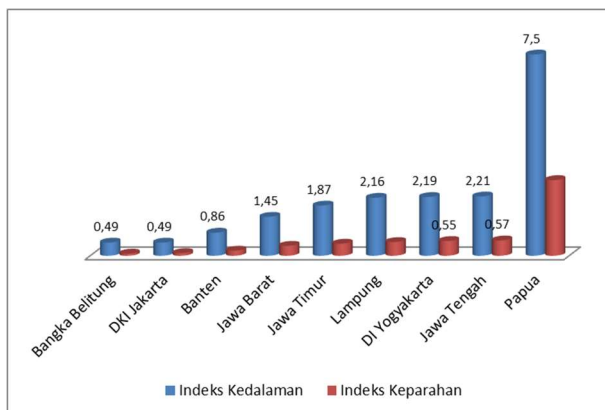
Pada bulan Agustus 2017, beberapa media memuat ulasan tentang angka kemiskinan di DIY yang merupakan tertinggi di Pulau Jawa<sup>1</sup>. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, angka kemiskinan DIY merupakan yang tertinggi. Dalam catatan BPS, tingkat kemiskinan di provinsi ini sebesar 13,02%, selisih tipis jika dibanding Jawa Tengah sebesar 13,01%. Provinsi lain memiliki angka yang relatif lebih rendah, yaitu Jawa Timur (11,77%), dan Jawa Barat (8,71%) sebagaimana Gambar 1. Jika dilihat dari perbandingan antar provinsi di Indonesia secara umum, posisi DIY berada diantara beberapa provinsi dengan tingkat kemiskinan moderat, dimana Papua menempati posisi tertinggi (27,62%) dan DKI Jakarta yang terendah (3,77%).



Sumber: BPS, 2018

**Gambar 1.** Perbandingan Tingkat Kemiskinan Antar Provinsi di Indonesia Tahun 2017

Sementara itu, tingkat kedalaman kemiskinan di DIY tercatat sebesar 2,19 poin<sup>2</sup>. Indeks ini juga termasuk moderat jika dibandingkan dengan angka tertinggi di Papua (7,5) dan terendah di Bangka Belitung dan DKI Jakarta (masing-masing 0,49). Diantara provinsi di Pulau Jawa, posisi DIY masih di bawah Jawa Tengah dengan catatan tertinggi sebesar 2,21 poin. Indeks keparahan kemiskinan<sup>3</sup> juga menunjukan skor yang sejajar, yaitu 0,55, lebih rendah dibandingkan Jawa Tengah (0,57) (Gambar 2). Artinya, meskipun tingkat kemiskinan DIY lebih tinggi, tetapi tingkat kedalaman dan keparahan masih lebih tinggi di Jawa Tengah.



Sumber: BPS, 2018

**Gambar 2.** Indeks Kedalaman dan Keparahannya Kemiskinan Beberapa Provinsi di Indonesia 2017

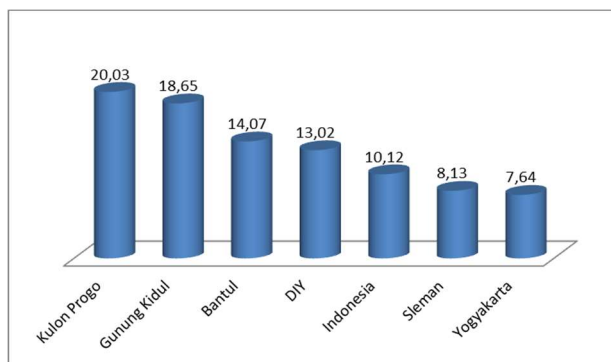
Banyak pihak mempertanyakan, mengapa DIY yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi, bahkan tertinggi kedua setelah DKI<sup>4</sup>, masih memiliki angka kemiskinan yang tinggi, yaitu di atas rata-rata nasional<sup>5</sup> dan tertinggi di Pulau Jawa. Berbagai intervensi telah dilakukan. Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana digariskan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) juga telah diupayakan di berbagai lini pemerintahan. Namun dalam kenyataannya, penurunan kemiskinan berjalan secara lambat.

Makalah ini berupaya untuk melihat kemiskinan di DIY dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Survey kemiskinan Susenas (BPS) selain berbasis pada kabupaten dan kota sebagai unit terkecil, juga membedakan antara perkotaan dan pedesaan. Hasil dari survey tersebut memberikan data jumlah sekaligus persentase orang miskin di suatu unit analisis. Berbekal data Susenas tersebut, makalah ini berupaya untuk melihat kemiskinan di DIY tidak hanya melalui pendekatan persentase, melainkan juga jumlah riil orang miskin. Lebih lanjut, kajian tentang kemiskinan seringkali dibedakan antara perkotaan dan pedesaan, dimana masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda dan berimbas pada perbedaan pendekatan penanganan yang dilakukan. Sementara kajian kemiskinan di tingkat nasional maupun banyak negara berkembang lain lebih menekankan pada pentingnya memperhatikan kemiskinan pedesaan<sup>6</sup>, makalah ini mengandung argumentasi sebaliknya. Penulis melihat bahwa kemiskinan perkotaan memberi kontribusi signifikan terhadap kemiskinan DIY secara keseluruhan, oleh karenanya perlu mendapat perhatian lebih, terutama oleh Pemerintah Daerah DIY.

## B. Hasil dan Pembahasan

### B.1. Persentase Kemiskinan vs. Jumlah Orang Miskin

Jika dilihat dari kemiskinan di kabupaten dan kota, tingkat kemiskinan di DIY disumbang terutama oleh dua kabupaten yaitu Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo. Wilayah lain memiliki tingkat kemiskinan cukup jauh dibanding dua kabupaten tersebut bahkan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta memiliki tingkat kemiskinan yang cukup rendah, lebih rendah dibanding rata-rata DIY dan nasional.



Sumber: BPS, 2018

**Gambar 3.** Tingkat kemiskinan Kabupaten/ Kota di DIY, 2017

Secara sepintas, dua Kabupaten tersebut seharusnya menjadi fokus percepatan penurunan kemiskinan di DIY. Namun, pandangan seperti ini bisa jadi salah kaprah. Penyebabnya adalah beragamnya ukuran Kabupaten/ Kota di DIY dalam hal luas wilayah, lebih khusus lagi jumlah penduduk yang tinggal didalamnya. Angka diatas jika dikonversi menjadi jumlah riil orang miskin, fokus akan bergeser. Proporsi dan kontribusi kemiskinan untuk masing-masing kabupaten/kota ditunjukkan dalam Tabel 1.

**Tabel 1.** Proporsi dan Kontribusi Kemiskinan Kabupaten/ Kota Terhadap DIY Tahun 2017

Kabupaten/ Kota/ Provinsi	Tingkat Kemiskinan	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Jumlah Orang Miskin (Ribu Jiwa)	Proporsi Terhadap Tingkat Kemiskinan DIY (%)	Kontribusi Terhadap Tingkat Kemiskinan DIY (%)
Bantul	14,07	995	140	29	3,7
Gunung Kidul	18,65	729	136	28	3,6
Sleman	8,13	1.194	97	20	2,6
Kulon Progo	20,03	421	84	17	2,2
Yogyakarta	7,64	423	32	7	0,9
DIY	13,02	3.762	489	100	13

Sumber: BPS, 2018

Seperti ditunjukan dalam Tabel 1, jumlah penduduk terbanyak terutama tinggal di Sleman dan Bantul. Konsekuensinya, meski tingkat kemiskinan di Bantul relatif lebih rendah

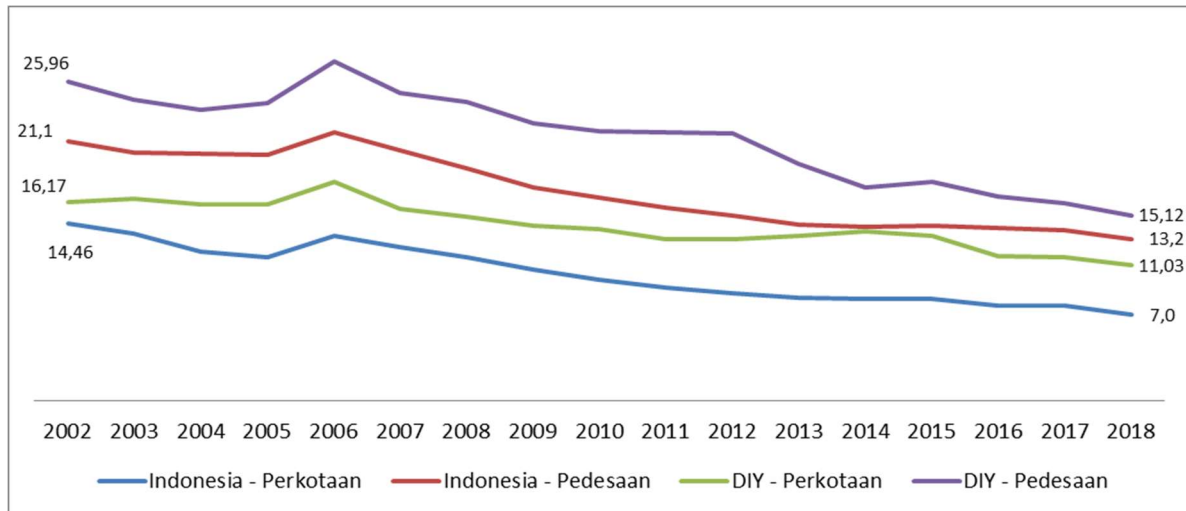
dibanding di Gunungkidul dan Kulon Progo, jumlah orang miskin di Bantul merupakan yang terbanyak, diikuti Gunungkidul dan Sleman. Kulon Progo memiliki jumlah orang miskin yang relatif lebih kecil karena jumlah penduduknya paling sedikit.

Jika dihitung nilai kontribusi masing-masing terhadap angka kemiskinan DIY, Bantul menjadi kontributor utama disusul Gunungkidul dan Sleman. Bantul dan Gunungkidul menyumbang masing-masing 3,7% dan 3,6% kemiskinan di DIY. Jika digabung, kedua Kabupaten tersebut menyumbang 7,3% dari 13% tingkat kemiskinan DIY.

## B.2. Kemiskinan Pedesaan vs. Perkotaan

Bias serupa berlaku untuk angka kemiskinan pedesaan dan perkotaan DIY. Secara teori, kemiskinan di pedesaan dan di perkotaan perlu dibedakan karena memiliki karakteristik yang berbeda. Salim dalam Otsubo (2016) mengidentifikasi bahwa kemiskinan pedesaan di negara berkembang umumnya identik dengan petani berlahan sempit yang tidak efisien dan buruh tani. Hondai (2005) menyebutkan bahwa masyarakat pedesaan di Indonesia lebih besar kemungkinannya untuk menjadi miskin. Hal ini sesuai dengan survey BPS dimana di tingkat nasional, catatan BPS tahun 2018 menunjukan angka 7% untuk kemiskinan perkotaan dan 13,2% di pedesaan. Demikian juga di DIY, catatan BPS di tahun yang sama menunjukan 11,03% untuk kemiskinan perkotaan, dan 15,12% untuk pedesaan. Lebih tingginya persentase kemiskinan di pedesaan telah berlangsung sejak lama seperti yang ditunjukan Gambar 4. Dalam 16 tahun terakhir, baik di tingkat nasional maupun DIY, kemiskinan pedesaan selalu lebih tinggi persentasenya dibanding kemiskinan di perkotaan meski secara umum keduanya mengalami penurunan.





Sumber: BPS, kompilasi

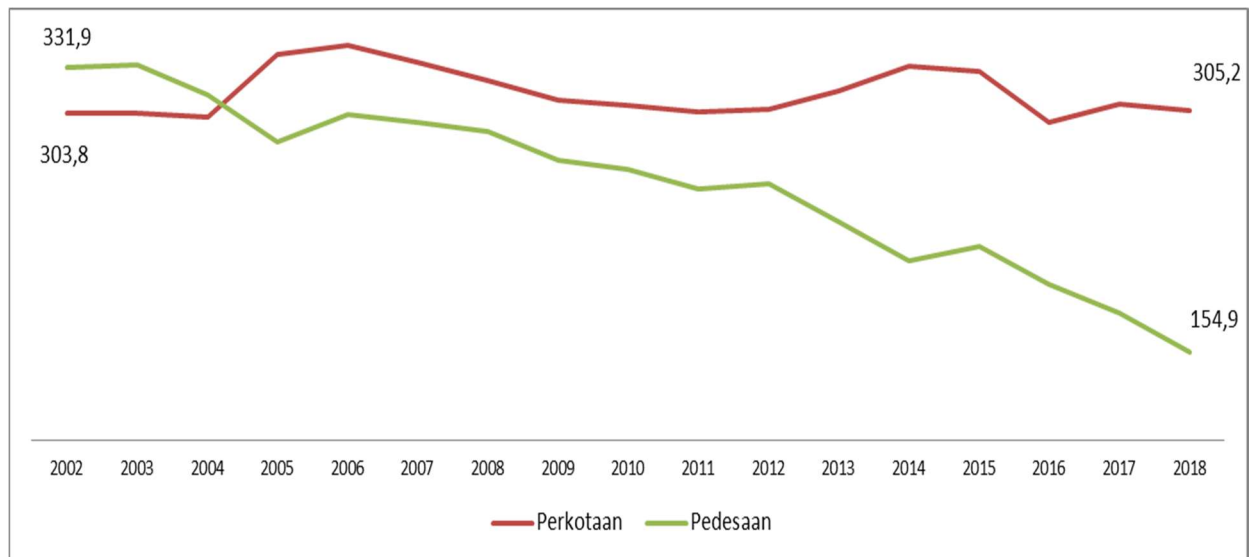
**Gambar 4.** Persentase Kemiskinan di Perkotaan dan Pedesaan 2002-2018, Perbandingan Indonesia dan DIY

Namun demikian, dalam konteks DIY dan dalam konteks jumlah, orang miskin di perkotaan lebih banyak dibanding di pedesaan. Data sebagaimana terpotret dalam Gambar 4 memiliki pembanding jumlah penduduk dimasing-masing lokasi. Sejumlah 7% tingkat kemiskinan di perkotaan Indonesia di tahun 2018 berarti bahwa 7% dari total jumlah penduduk perkotaan Indonesia merupakan orang miskin, demikian juga yang di pedesaan. Namun jika jumlah riil yang dipotret, jumlah orang miskin di perkotaan jauh lebih banyak dibanding di pedesaan.

Gambar 5 berikut menunjukkan bahwa jumlah orang miskin di perkotaan DIY tahun 2018 berjumlah 305,2 ribu jiwa. Sebaliknya, orang miskin di pedesaan hanya berjumlah 154,9 ribu jiwa, atau sekitar setengah dari jumlah orang miskin perkotaan. Pada awalnya, sepanjang periode data yang digunakan dalam tulisan ini, jumlah penduduk miskin pedesaan sebanyak 331,9 ribu jiwa (data tahun 2002). Sementara itu, jumlah penduduk miskin perkotaan sedikit dibawahnya, atau sebanyak 303,8 ribu jiwa. Tren ini mengalami pembalikan sejak tahun

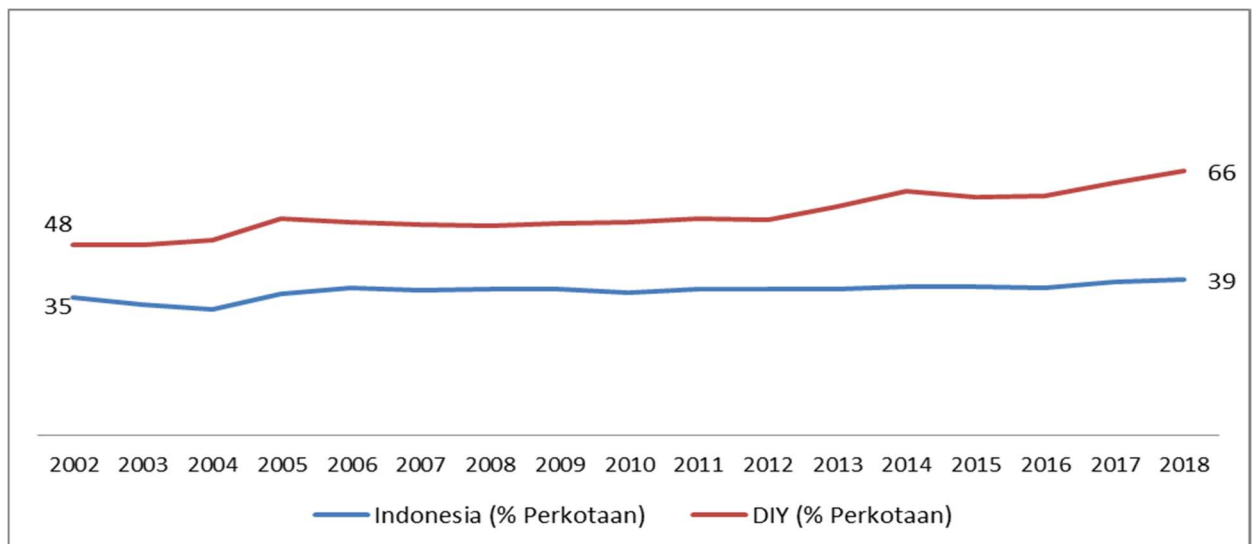
2004/2005, dimana sejak saat itu kesenjangan jumlah antara angka di perkotaan dan pedesaan semakin melebar.

Kecenderungan ini sangat berbeda dengan di tingkat nasional. Secara umum, jumlah orang miskin yang tinggal di perkotaan di Indonesia lebih sedikit dibanding orang miskin yang tinggal di pedesaan. Seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 6 berikut ini, data tahun 2002 menunjukkan bahwa jumlah orang miskin di perkotaan tidak lebih dari 40% dari jumlah orang miskin secara total (lihat garis biru). Hal ini sangat berbeda dengan fakta di DIY (garis merah), dimana jumlah orang miskin di perkotaan yang pada awalnya kurang dari 50%, saat ini melonjak menjadi sekitar 66% dari jumlah seluruh orang miskin di DIY. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan perlu lebih fokus di perkotaan yang secara kuantitas sangat signifikan. Dengan asumsi tingkat kemiskinan DIY 13%, maka orang miskin yang tinggal di perkotaan menyumbang sekitar 8,58%. Sedangkan sisanya sebesar 4,42% berasal dari pedesaan



Sumber: BPS, diolah

**Gambar 5.** Jumlah Orang Miskin di Perkotaan dan Pedesaan DIY (Dalam Ribuan)



Sumber: BPS, diolah

**Gambar 6.** Proporsi penduduk miskin perkotaan terhadap keseluruhan penduduk miskin di Indonesia dan DIY 2002 – 2018 (dalam %)

### B.3. Perkotaan dan Kemiskinan di DIY

Pemahaman ini membawa kita untuk menelusuri lebih jauh, dimana sesungguhnya orang-orang miskin perkotaan tersebut tinggal. Lebih mendasar lagi, dalam konteks DIY dimana wilayah-wilayah yang disebut perkotaan tersebut berada.

Dalam definisinya tentang perkotaan dan pedesaan, BPS mendasarkan pada konsep desa-perkotaan (urban villages) dan desa-pedesaan (rural villages). Suatu desa dapat dikategorikan desa urban jika

memenuhi beberapa persyaratan. Jika tidak, maka suatu desa dikategorikan sebagai desa rural. Tabel 2 berikut merupakan hasil estimasi BPS, menunjukkan proporsi desa urban terhadap jumlah keseluruhan desa di Kabupaten/ Kota di DIY (BPS, 2016).

Tiap daerah memiliki proporsi desa urban yang berbeda-beda. Diantara kabupaten di DIY, Gunungkidul memiliki jumlah desa urban paling sedikit, yaitu 5 desa atau 3% dari keseluruhan

jumlah desa yang dimiliki disusul dengan Kulon Progo, Bantul dan Sleman. Kota Yogyakarta memiliki proporsi terbanyak dengan keseluruhan wilayah dikategorikan urban. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta merupakan pusat wilayah perkotaan di DIY, sementara Kabupaten yang lebih dekat memiliki relatif lebih banyak desa urban. Hal tersebut juga konsisten dengan tingkat kepadatan penduduk yang dimiliki masing-masing daerah sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa semakin dekat dengan pusat (Kota Yogyakarta) maka semakin tinggi kepadatan penduduk, dengan demikian semakin urban wilayah tersebut.

**Tabel 2.** Proporsi Desa Urban di Kabupaten/ Kota DIY<sup>7</sup>

Kabupaten/ Kota/ Provinsi	Luas Area (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (/km <sup>2</sup> )	Jumlah Desa Urban	Jumlah Desa	Proporsi Desa Urban
Gunung Kidul	1.485	729.364	491	5	144	3%
Kulon Progo	586	421.295	719	13	88	15%
Bantul	507	995.264	1.964	47	75	63%
Sleman	575	1.193.512	2.076	59	86	69%
Yogyakarta City	33	422.732	13.007	45	45	100%
Yogyakarta Prov.	3.186	3.762.167	1.181	169	438	39%

Sumber: BPS, 2016

Dalam pespektif kesejarahan, perkembangan DIY sebagai sebuah entitas administrasi pemerintahan berawal jauh sebelum NKRI berdiri, yaitu saat masih dalam bentuk kerajaan. Pusat terakhir kerajaan tersebut, yang sampai saat ini menjadi pusat kota, adalah wilayah Kraton Ngayogyakarta dan sekitarnya. Kota yang awalnya hanya menempati lingkup spasial kecil tersebut seiring perkembangan zaman mengalami pemekaran bahkan sampai melebihi batas-batas administratif kota. Proses urbanisasi dan pesatnya pembangunan berimplikasi pada meluasnya wilayah perkotaan di DIY (Purwani, 2014).

Beberapa studi tentang perkotaan Yogyakarta memeberikan petunjuk tentang cakupan keruangan perkotaan Yogyakarta. Kuncoro (2006) mempertimbangkan beberapa kecamatan di Sleman sebagai bagian dari aglomerasi (perkotaan)

Yogyakarta berdasarkan tingkat pertumbuhan dan kepadatan penduduk serta pertumbuhan ekonomi, diantaranya adalah Gamping (jarak dari pusat kota (0 km) = 8,2 km), Mlati (11 km), Depok (7,1 km), Ngaglik (12 km), Godean (11 km) dan Sleman (Ibukota Kabupaten) (10 km). Faizah & Hendarto (2013) mengidentifikasi bahwa pemekaran kota telah mencapai 15 km ke arah utara, 17 km ke timur dan 12 km ke selatan dari pusat kota. Dengan mempertimbangkan karakteristik desa perkotaan yang dimiliki, ini berarti paling sedikit mencakup wilayah kecamatan sebagaimana disebutkan Kuncoro ditambah Kalasan (17 km), Berbah (11 km), Banguntapan (7,7 km), Sewon (8,8 km), Bantul (Ibukota Kabupaten) (15,5 km), dan Kasihan (9,7 km)<sup>8</sup>. Hal ini konsisten dengan pendapat Purwani (2014) yang menganalisis bahwa perkotaan Yogyakarta meluas ke segala penjuru dengan tingkat perkembangan yang berbeda-beda.

Batasan perkotaan Yogyakarta sebagaimana dikaji 3 penelitian tersebut tentu berbeda dengan definisi desa urban BPS. Salah satunya adalah bahwa perkotaan Yogyakarta belum mencakup wilayah Gunungkidul dan Kulon Progo, sedangkan dua Kabupaten tersebut juga memiliki desa urban meskipun relatif masih sedikit. Terhadap kecamatan yang diidentifikasi termasuk dalam perkotaan Yogyakarta, belum tentu semua desa didalamnya terkategori urban. Secara umum, sebagaimana ditunjukan Tabel 3, desa urban di wilayah perkotaan Yogyakarta berjumlah 99 desa atau hampir 60% dari keseluruhan desa urban di DIY. Hal ini menunjukkan fokus terhadap perkotaan Yogyakarta menjadi penting karena mencakup hampir 60% wilayah dimana penduduk miskin perkotaan tinggal. Disamping itu, sebagai satu unit aglomerasi, perkotaan Yogyakarta memiliki daur aktivitas ekonomi yang relatif terintegrasi sehingga lebih memudahkan dalam intervensi kebijakannya dengan dampak lebih luas.

Wilayah perkotaan Yogyakarta meliputi keseluruhan wilayah Kota Yogyakarta (14 Kecamatan), ditambah dengan 8 kecamatan di Kabupaten Sleman dan 4 di

Bantul. Sementara itu, jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan Yogyakarta adalah sekitar 1,64 juta jiwa, atau 45% dari jumlah seluruh DIY<sup>9</sup>. Kepadatan penduduk rata-rata yang dimiliki jauh melampaui kepadatan secara umum di DIY, dengan kisaran 2,1 ribu orang/km<sup>2</sup> di kecamatan Bantul sampai lebih dari 13 ribu orang/Km<sup>2</sup> di Kota Yogyakarta (kepadatan rata-rata DIY: 1,1 ribu orang/km<sup>2</sup>).

Berdasarkan estimasi yang dilakukan oleh SMERU pada tahun 2015, tingkat kemiskinan di bagian-bagian wilayah perkotaan tersebut sangat bervariasi, dari yang terendah di kecamatan Depok (5,53), hingga yang tertinggi di kecamatan Kalasan (17,08). Beberapa kecamatan memiliki tingkat kemiskinan satu digit, diantaranya adalah Banguntapan, Godean, Mlati, Depok, Ngaglik, ditambah dengan Kota Yogyakarta sendiri. Kecamatan lain memiliki tingkat kemiskinan diatas 10%, yaitu Kecamatan Bantul, Sewon, Kasihan, Gamping, Berbah, Kalasan dan Kecamatan Sleman. Estimasi ini dilakukan untuk kondisi tahun 2015, sehingga hanya dijadikan proxy dalam makalah ini. Perkembangan terakhir mungkin lebih rendah dari angka-angka tersebut, mengingat kecenderungan menurunnya tingkat kemiskinan di Kabupaten dan Kota.

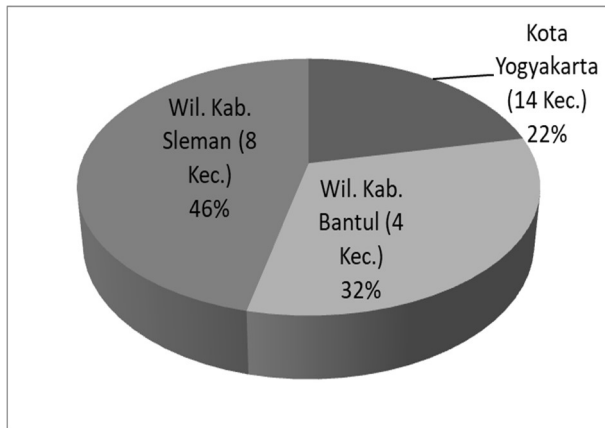
Namun demikian, mengingat jumlah penduduk yang bervariasi di tiap-tiap wilayah sebagaimana logika berpikir yang dipakai dalam makalah ini, membandingkan kemiskinan hanya dari tingkatan atau persentasenya saja belumlah cukup. Gambaran tentang jumlah riil dan persebaran di masing-masing wilayah akan memberikan sudut pandang informasi yang berbeda. Untuk tujuan tersebut, penulis memperkirakan jumlah orang miskin di tiap-tiap wilayah dengan menggunakan dasar estimasi tingkat kemiskinan SMERU dan jumlah penduduk BPS. Hasilnya adalah jumlah orang miskin di keseluruhan wilayah perkotaan Yogyakarta mencapai hampir 167 ribu jiwa. Dari jumlah tersebut, Kota Yogyakarta menyumbang sekitar 36 ribu jiwa. Beberapa kecamatan memiliki kontribusi cukup signifikan, diantaranya yang tertinggi adalah Sewon, dengan angka sekitar separuh dari keseluruhan jumlah orang miskin di Kota Yogyakarta (18 ribu jiwa). Kecamatan lainnya adalah Kalasan (14 ribu jiwa), Banguntapan (13 ribu jiwa) dan Kasihan (13 ribu jiwa). Mlati dan Depok memiliki jumlah orang miskin masing-masing sekitar 10 ribu jiwa, dan beberapa kecamatan lainnya masing-masing kurang dari 10 ribu jiwa.

**Tabel 3.** Profil Wilayah dan Angka Kemiskinan Perkotaan Yogyakarta

Wilayah	Jarak dari Pusat (0 km)	Desa Urban		Penduduk (2015)		Angka Kemiskinan (2015)	
		Jumlah	Proporsi	Jumlah (Jiwa)	Kepadatan (000/km <sup>2</sup> )	Tingkat Kemiskinan	Jumlah (Jiwa)
Kec. Bantul (Ibukota Kabupaten)	16	5	100%	62.128	2.829	13,38	8.313
Kec. Banguntapan	8	8	100%	135.888	4.771	9,78	13.290
Kec. Sewon	9	4	100%	112.504	4.142	16,35	18.394
Kec. Kasihan	10	3	75%	122.323	3.778	10,77	13.174
Kec. Godean	11	6	86%	70.754	2.636	9,86	6.976
Kec. Gamping	8	5	100%	106.330	3.635	10,78	11.462
Kec. Mlati	11	5	100%	111.180	3.898	9,58	10.651
Kec. Depok	7	3	100%	185.707	5.224	5,53	10.270
Kec. Berbah	11	3	75%	56.831	2.472	13,33	7.576
Kec. Kalasan	17	4	100%	84.150	2.348	17,08	14.373
Kec. Ngaglik	12	4	67%	115.321	2.994	6,32	7.288
Kec. Sleman (Ibukota Kabupaten)	10	4	80%	66.567	2.125	13,17	8.767
Kota Yogyakarta	-	45	100%	412.704	12.669	8,75	36.111
Perkotaan Yogyakarta	-	99	94%	1.642.387	-	-	166.645
Provinsi DIY	-	169	39%	3.679.176	1.155	14,91	550.000

Sumber: BPS dan SMERU, diolah

Jika dibandingkan, penduduk miskin terbanyak di perkotaan Yogyakarta berada di 8 Kecamatan di Kabupaten Sleman. Penduduk miskin di wilayah ini mencapai hampir separuh jumlah penduduk miskin perkotaan Yogyakarta, yaitu 46%. Empat kecamatan di Kabupaten Bantul menyumbang lebih dari sepertiga, yaitu sekitar 32%. Proporsi terkecil disumbangkan oleh Kota Yogyakarta, yaitu 22% (Lihat Gambar 7).



Sumber: BPS & SMERU, diolah

**Gambar 7.** Proporsi Penduduk Miskin di Perkotaan Yogyakarta

Pada tingkat Kabupaten/Kota, seberapa signifikan jumlah penduduk miskin di perkotaan Yogyakarta tersebut? Untuk Kota Yogyakarta, kemiskinan perkotaan sebagaimana yang penulis identifikasi dalam makalah ini jelas sangat signifikan karena keseluruhan wilayahnya merupakan bagian dari perkotaan Yogyakarta. Sementara itu, penduduk miskin Sleman yang termasuk dalam wilayah perkotaan Yogyakarta juga sangat signifikan. Angka yang mencapai 77 ribu menyumbang sekitar 70% dari total penduduk miskin di Sleman. Ini berarti bahwa lebih dari dua pertiga orang miskin Sleman tinggal di 8 Kecamatan yang masuk dalam wilayah Perkotaan Yogyakarta. Bantul menyumbang angka yang paling sedikit tetapi masih cukup signifikan. Jumlah penduduk miskin Bantul yang termasuk ke dalam wilayah perkotaan Yogyakarta mencapai 53 ribu jiwa. Jumlah tersebut adalah sepertiga dari

keseluruhan penduduk miskin di Bantul dan tinggal di 4 Kecamatan.

**Tabel 4.** Sumbangan Kemiskinan Perkotaan Yogyakarta Terhadap Kabupaten/ Kota

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin	Kemiskinan Perkotaan Yogyakarta	
			Jumlah	Proporsi Thd. Total
Bantul	981	160.224	53.171	33%
Sleman	1.173	110.962	77.363	70%
Yogyakarta	413	36.112	36.112	100%

Sumber: BPS, diolah

### C. Catatan Penutup

RPJM DIY menargetkan penurunan kemiskinan menjadi 7% di tahun 2022 dari level 13% yang ada saat ini. Jika dibandingkan dengan RPJMD masing-masing Kabupaten/ Kota, maka target tersebut jauh lebih rendah. RPJMD Kota Yogyakarta yang targetnya paling rendah, mematok angka yang hampir sama dengan DIY. Hal ini tentu membutuhkan kerja lebih keras semua pihak untuk memenuhinya.

Alur pembahasan dalam makalah ini ingin menunjukkan bahwa jika penurunan tersebut dipercepat, kemiskinan perkotaan bisa menjadi prioritas yang efektif. Banyaknya jumlah orang miskin perkotaan menyumbang sekitar 8,5% dari 13% tingkat kemiskinan DIY. Sebagai lokus terbesar kemiskinan DIY, perkotaan Yogyakarta memiliki peran sangat penting dimana cakupan wilayahnya mencapai 60% dari total perkotaan DIY. Kemiskinan di wilayah ini cukup signifikan terutama bagi 3 wilayah administratif yang menaunginya, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Untuk Kota Yogyakarta, karena keseluruhan wilayahnya adalah perkotaan, karakter kemiskinannya adalah 100% perkotaan. Untuk Kabupaten Sleman, kemiskinan di 8 Kecamatan yang masuk perkotaan Yogyakarta menyumbang 70% dari total kemiskinan di Kabupaten tersebut. Sedangkan Kabupaten Bantul, meski sumbangan terhadap kemiskinan Kabupaten hanya 33%,

signifikansinya terutama disebabkan karena sumbernya hanya dari 4 Kecamatan yang masuk dalam wilayah perkotaan Yogyakarta.

Karakteristik kemiskinan di perkotaan Yogyakarta harus ditelaah lebih lanjut sehingga para pengambil kebijakan dapat merumuskan strategi intervensi secara lebih efektif. Dalam hal ini, beberapa studi telah dilakukan, namun kajian terkait perkotaan Yogyakarta belum banyak fokus pada karakteristik kemiskinan. Jika ada, kajian tersebut masih terbatas hanya pada lokus Kota Yogyakarta, belum mencakup kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman yang termasuk dalam wilayah perkotaan Yogyakarta.

## Daftar Pustaka

- Abdillah, K., & Mursinto, D. (2016). *The Effects of Fiscal Decentralization, Economic Growth and Income Inequality on Poverty Rate of Indonesia's 33 Provinces*. International Journal of Advanced Research, Volume 4, Issue 2, 405-414, diunduh dari: <http://www.journalijar.com>
- ADB & BPS-Statistics Indonesia (2011). *The Informal Sector and Informal Employment in Indonesia, Country Report 2010*. diunduh dari: <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/28438/informal-sector-indonesia.pdf>
- Badan Pusat Statistik, Berbagai Edisi
- Beall, J., & Kanji, N. (1999). *Households, Livelihoods and Urban Poverty, Background Paper for the ESCOR Commissioned Research on Urban Development: Urban Governance, Partnership and Poverty*. Department of Social Policy and Administration, London School of Economics and Political Science, March 1999, diunduh dari: [http://www.ucl.ac.uk/dpu-projects/drivers\\_urb\\_change/urb\\_society/pdf/leveli\\_vulnera/DFID\\_ESCOR\\_Beall\\_Households\\_Livelihoods.pdf](http://www.ucl.ac.uk/dpu-projects/drivers_urb_change/urb_society/pdf/leveli_vulnera/DFID_ESCOR_Beall_Households_Livelihoods.pdf)
- Beard, V.A. (1999). *Conceptualizing Poverty: a Look Inside the Indonesian Household*. RAND, Labor and Population Program Working Paper Series 99-10, diunduh dari: [www.rand.org/content/dam/rand/pubs/drafts/2007/DRU2180.pdf](http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/drafts/2007/DRU2180.pdf)
- Benson, T., Chamberlin, J., & Rhinehart, I. (2003). *An Investigation of the Spatial Determinants of the Local Prevalence of Poverty in Rural Malawi*. International Food Policy Research Institute, Washington D.C., diunduh dari: <http://gisweb.ciat.cgiar.org/povertymapping/download/Malawi.pdf>
- Bogale, A., Hagedorn, K., & Korf, B. (2005). *Determinants of Poverty in Rural Ethiopia*. Quarterly Journal of International Agriculture 44 (2005), No. 2: 101-120, diunduh dari: [https://www.agrar.hu-berlin.de/de/institut/departments/daoe/ihe/ress/problemoorientierung/Ressourcenuarmut/bogale\\_qjia\\_ethiopia.pdf](https://www.agrar.hu-berlin.de/de/institut/departments/daoe/ihe/ress/problemoorientierung/Ressourcenuarmut/bogale_qjia_ethiopia.pdf)
- Capello, R. (2011). *Location, Regional Growth and Local Development Theories*. AESTIMUM 58, Giugno 2011: 1-25, diunduh dari: [www.fupress.net/index.php/ceset/article/download/9559/8912](http://www.fupress.net/index.php/ceset/article/download/9559/8912)
- Davis, E.P., & Sanches-Martinez, M. (2014). *A Review of the Economic Theories of Poverty*. National Institute of Economic and Social Research, Discussion Paper No. 435, retrieved from [www.niesr.ac.uk/sites/default/files/publications/dp435\\_0.pdf](http://www.niesr.ac.uk/sites/default/files/publications/dp435_0.pdf)
- Divigalpitiya, P. & Handayani, K.N. (2015). *Measuring the Urban Expansion Process of Yogyakarta City in Indonesia*. International Review for Spatial Planning and Sustainable Development, Vol. 3 No. 4 (2015), 18-32
- Djamaluddin, S. (2014). *Analysis of Poverty Determinant in West Java Province*. Institute of Economics and Social Research, Faculty of Economics, Universitas Indonesia, diunduh dari: <http://econ.feb.ui.ac.id/wp-content/uploads/2015/09/201403.pdf>
- Erwanasari, C.A. (2014). *Analisis Kondisi Fisik Wilayah Terhadap Pola Keruangan Lokasi Perumahan Kawasan Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta di Kabupaten Sleman*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta, diunduh



- dari:  
[eprints.ums.ac.id/32283/16/NASKAH%20PUBLI KASI%20ILMIAH.pdf](http://eprints.ums.ac.id/32283/16/NASKAH%20PUBLI KASI%20ILMIAH.pdf)
- Fikri, A.A.H.S., Sholeh, M, & Baroroh, K. (2015), *Fenomena Kemiskinan Perkotaan (Urban Poverty) di Yogyakarta: Suatu Kajian Struktur dan Respon Kebijakan*, diunduh dari: [eprints.uny.ac.id/30973/](http://eprints.uny.ac.id/30973/)
- Faizah, A.N., & Hendaro, M. (2013). *Analisis Difusi Keruangan di Sekitar Kawasan Perkotaan Yogyakarta*. Diponegoro Journal of Economics, Vol. 2, No. 3, Tahun 20`3, 1-9, diunduh dari: <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme>
- Foster, J., Greer, J., & Thorbecke, E. (2009). *The Foster-Greer-Thorbecke (FGT) Poverty Measure: Twenty-Five Years Later*, diunduh dari: [www.sv.uio.no/esop/english/research/news-and-events/events/2010/Foster-Greer-Thorbecke.PDF](http://www.sv.uio.no/esop/english/research/news-and-events/events/2010/Foster-Greer-Thorbecke.PDF)
- Handayani, K.N., & Divigalpitiya, P. (2015). *Measuring the Urban Expansion Process of Yogyakarta City in Indonesia*. SPSPD, International Review for Spatial Planning and Sustainable Development, Vol. 3 No. 4 (2015), 18 – 32, diunduh dari: [http://dx.doi.org/10.14246/irspsd.3.4\\_18](http://dx.doi.org/10.14246/irspsd.3.4_18)
- Henley, A., Arabsheibani, G.R., & Carneiro, F.G. (2006). *On Defining and Measuring the Informal Sector*. Discussion paper Series, IZA DP No. 2473, diunduh dari: [ftp.iza.org/dp2473.pdf](http://ftp.iza.org/dp2473.pdf)
- Hondai, S. (2005). *Profile of Poverty and Probability of Being Poor in Rural Indonesia*. Working Paper Series Vol. 2005-16, October 20005, International Centre for Study of East Asian Development, Kitakyushu, diunduh dari: [www.agi.or.jp/user04/758\\_196\\_20110622181222.pdf](http://www.agi.or.jp/user04/758_196_20110622181222.pdf)
- Huriati, N. (2008). *Perkembangan Daerah Pinggiran Kota Yogyakarta*. Skripsi. Universitas Indonesia. Diunduh dari: [lib.ui.ac.id/file?file=digital122959-s34156-Noni%20Huriati.pdf](http://lib.ui.ac.id/file?file=digital122959-s34156-Noni%20Huriati.pdf)
- Kabubo-Mariara, J., Kirii, D.M., Ndenge, G.K., Kirimi, J., & Gesami, R.K. (2006). *Regional and Institutional Determinants of Poverty: the Case of Kenya. Final Report Presented for Phase II of the Collaborative Project on Poverty, Income, Distribution and Labor Market Issues in Sub-Saharan Africa, January 2006*, diunduh dari: [http://www.sarpn.org/documents/d0002264/Kenya\\_Kabubo-Mariara\\_PovertyII-3\\_Jan2006.pdf](http://www.sarpn.org/documents/d0002264/Kenya_Kabubo-Mariara_PovertyII-3_Jan2006.pdf)
- Kapsos, S., & Bourmpoula, E. (2013). *Employment and Economic Class in the Developing World*. ILO Research Paper No. 6, International Labor Office, June 2013, diunduh dari: [www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms\\_216451.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_216451.pdf)
- Komamura, K. (2008). *The Working Poor, Borderline, and Developments in Public Assistance Reform*. Japan Labor Review, Vol. 5 No. 4, Autumn 2008
- Kuncoro, M. (2006). *Aglomerasi Perkotaan di Daerah Istimewa Yogyakarta*. UNISIA No. 59/XXIX/I/2006, 3-18
- Kuncoro, M. (2013). *Economic Geography of Small and Cottage Industrial Clusters in Java Island, Indonesia*. Global Advanced Research Journal of Geography and Regional Planning Vol. 2(1) pp. 006-018, January, 2013
- Kurniadi, B.D. (2009). *Yogyakarta in Decentralized Indonesia: Integrating Traditional Institution in Democratic Transitions*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 13, No. 2, November 2009 (190 – 203)
- McKinley, T. (2006). *What is Poverty? Good Question*. One Pager, International Poverty Centre, United Nations Development Programme, December 2006, Number 26, diunduh dari: [www.ipc-undp.org/pub/IPCOnePager26.pdf](http://www.ipc-undp.org/pub/IPCOnePager26.pdf)
- Narjoko, D.A. (2008). *The Determinants of Industrial Agglomeration in Indonesia*, in Ariff, M. (ed), *Analyses of Industrial Agglomeration, Production Networks and FDI Promotion*, ERIA Research Project Report 2007-3, Chiba: IDE-JETRO, pp. 10-63
- Japan Bank for International Cooperation (2011). *Poverty Profile Executive Summary Republic of Indonesia*, February 2001, diunduh dari:

[https://www.jica.go.jp/activities/issues/poverty/profile/pdf/indonesia\\_e.pdf](https://www.jica.go.jp/activities/issues/poverty/profile/pdf/indonesia_e.pdf)

Prince, H. (2009). *Determinants of Poverty in Developing Countries: Factor that Effect the Human Development Index*. Human Development Capabilities Association Annual Conference, Lima, Peru, diunduh dari: <https://hd-ca.org/publications/determinants-of-poverty-in-developing-countries-factors-that-effect-the-human-poverty-index>

Purwani, O. (2014). *Javanese Power; Silent Ideology and Built Environment of Yogyakarta and Surakarta*. A PhD Thesis, the University of Edinburg, diunduh dari: <https://www.era.lib.ed.ac.uk/bitstream/handle/1842/9885/Purwani2014.pdf?sequence=2&isAllowed=y>

Salim, Z., *Globalization and Agriculture*, dalam Otsubo S.T. (2016). *Globalization and Development, Volume I*. New York, Routledge, 2016, p. 176-99

Setijaningrum, E. (2017). *Integrated Program Design to Overcome Poverty in Surabaya*. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Vol. 30, No. 1: 13-19, diunduh dari: <http://ejournal.unair.ac.id/index.php/MKP/article/download/3253/2715>

Suhatno (2006). *Yogyakarta dalam Lintasan Sejarah*. diunduh dari: [http://repository.perpustakaan.kemdikbud.go.id/1112/1/Yogyakarta\\_dalam\\_Lintasan\\_Sejarah.pdf](http://repository.perpustakaan.kemdikbud.go.id/1112/1/Yogyakarta_dalam_Lintasan_Sejarah.pdf)

Sumarto, S., Vothknecht M., Wijaya, L. (2013). *Explaining Regional Heterogeneity of Poverty: Evidence from Decentralized Indonesia*. Lembaga Penelitian SMERU Research Institute, Towards Pro-Poor Policy through Research, Working Paper, diunduh dari: [www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/regionalheterogeneity\\_eng\\_0\\_0.pdf](http://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/regionalheterogeneity_eng_0_0.pdf)

Sunaryo, R.G., Soewarno, N., Ikaputra, & Setiawan, B. (2011). *The Transformation of Urban Public Space in Yogyakarta: a Search for Specific Identity Character*. Diunduh dari: <https://www.researchgate.net/publication/2770>

51769\_The\_Transformation\_of\_Urban\_public\_space\_in\_Yogyakarta\_A\_Search\_of\_specific\_identity\_Character

Swaminathan, M. (1991). *Understanding the Informal Sector: a Survey*. Wider Working Papers, WPS 95, December 1991, diunduh dari: <https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/WP95.pdf>

Tjoe, Y. (2013). *Decentralization and Poverty Reduction in Indonesia: the Case of East Nusa Tenggara (NTT)* in Hossain M., Sarker T., McIntosh M. (2013), *the Asian Century, Sustainable Growth and Climate Change*. Edward Elgar Publishing, p. 178 – 99, diunduh dari: <http://www.elgaronline.com/abstract/9781781005743.00017.xml?rskey=klWZZN&result=7>

Todaro, M.P., & Smith, S.C. (2015). *Economic Development, 12th Edition*. United Kingdom: Pearson Education Limited

World Bank. *Chapter 3. Poverty Lines*. diunduh dari: [http://sitesources.worldbank.org/PGLP/Resources/povertymanual\\_ch3.pdf](http://sitesources.worldbank.org/PGLP/Resources/povertymanual_ch3.pdf)

#### Website:

[www.indonesiapovertymap.org](http://www.indonesiapovertymap.org)  
[www.povertymap.smeru.or.id](http://www.povertymap.smeru.or.id)

#### Catatan Akhir

<sup>1</sup>Lihat: <https://daerah.sindonews.com/read/1226314/189/angka-kemiskinan-diy-tertinggi-se-jawa-1501649326> dan <https://m.kumparan.com/tugujogja/di-yogyakarta-provinsi-pa...-miskin-di-jawa-ketimpangan-ekonomi-tertinggi-di-indonesia>

<sup>2</sup>Indeks kedalaman kemiskinan merupakan hasil dari penghitungan selisih rata-rata pengeluaran kelompok miskin dilihat dari garis (hreshold) kemiskinan. Semakin besar angka menunjukkan semakin dalamnya kemiskinan di suatu daerah

<sup>3</sup>Indeks keparahan kemiskinan diperoleh dari kuadrat indeks kedalaman kemiskinan, yang dipergunakan untuk memperkirakan seberapa parah kemiskinan di suatu daerah



<sup>4</sup>Dalam catatan BPS, IPM DIY di tahun 2017 adalah 78, 89; hanya dibawah DKI saja dengan catatan 80,06 di tahun yang sama

<sup>5</sup>Sesuai catatan BPS, angka kemiskinan Indonesia 2017 adalah 10, 64%. Dalam perkembangan terakhir (per Maret 2018), angka ini turun menjadi satu digit

<sup>6</sup>Lihat beberapa kajian dalam daftar pustaka paper ini

<sup>7</sup>Persyaratan desa urban diantaranya meliputi kepadatan penduduk, proporsi rumah tangga bermata-pencarian non-pertanian, serta aksesibilitas beberapa jenis fasilitas perkotaan, yang diantaranya adalah sekolah, pasar, toko, rumah sakit, hotel/ bilyar/ diskotek/ panti pijat, serta prosentase rumah tangga memiliki saluran telpon dan sambungan listrik

<sup>8</sup>Meskipun Kecamatan Bantul tidak memenuhi kualifikasi menurut Faizah & Hendarto, penulis memasukkannya dengan pertimbangan semua desa di kecamatan ini termasuk dalam kategori *Urban* menurut BPS, serta berdampingan langsung dengan Sewon yang berbatasan dengan kota sehingga terkena imbas perluasan perkotaan secara langsung, dan terutama sekali adalah sebagai Ibukota (pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan) Kabupaten Bantul

<sup>9</sup>Data yang digunakan dalam Tabel 3 merupakan data tahun 2015 karena terkait dengan data tingkat kemiskinan dan tingkat kesejahteraan yang tersedia. Data kemiskinan (SUSENAS) BPS hanya mampu menjelaskan perkiraan tingkat kemiskinan Kabupaten/ Kota, sementara data yang dibutuhkan dalam paper ini paling tidak adalah tingkat kecamatan. Terkait hal tersebut, SMERU melakukan estimasi angka kemiskinan sampai ke tingkat desa dengan mengolah survey SUSENAS dan PODES BPS. Namun, study ini dilakukan beberapa tahun sekali, yang terakhir yang bisa penulis akses adalah tahun 2015. Dengan demikian informasi dalam tabel tersebut lebih sebagai *proxy* untuk memahami kemiskinan di perkotaan Yogyakarta ketimbang untuk mengetahui jumlah secara akurat kemiskinan terkini (lihat: [www.indonesiapovertymap.org](http://www.indonesiapovertymap.org) dan [povertymap.smeru.or.id](http://povertymap.smeru.or.id))

# Peningkatan Efisiensi Usaha Tani melalui Model Konsolidasi Corporate Farming

---

**Antarikso Trisno Bawono**

[antariksobawono@gmail.com](mailto:antariksobawono@gmail.com)

Perencana Muda, Bappeda DIY

## Abstrak

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor strategis karena merupakan pendukung utama ketahanan pangan, penyedia bahan input untuk industri, serta penyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Namun, peran penting sektor pertanian belum sejalan dengan tingkat kesejahteraan petani sebagai pelaku utamanya. Hal ini dikarenakan petani belum menerapkan prinsip agribisnis dalam usaha taninya. Berdasarkan hal tersebut, maka pengelolaan usaha tani perlu dikonsolidasikan dalam sistem terpadu dari hulu ke hilir untuk menjamin usaha tani yang berkelanjutan, efisien, dan sekaligus mengurangi terjadinya konversi lahan. Salah satu konsep konsolidasi usaha tani yang dapat dilakukan adalah corporate farming, yaitu konsolidasi yang dilakukan dengan menyatukan petak berukuran kecil-kecil yang dimiliki banyak petani menjadi satu hamparan yang utuh, dalam satu unit manajemen usaha tani, tanpa menghilangkan hak kepemilikan setiap pemilik atas lahannya masing-masing. Namun, penerapan corporate farming masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait dengan kurang optimalnya kelembagaan pengelola. Kertas kerja ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan studi literatur mengenai corporate farming beserta faktor pendukung dan penghambatnya, kemudian membandingkannya dengan penerapannya di DIY. Hasil studi menunjukkan bahwa konsolidasi usaha tani melalui model corporate farming terbukti dapat meningkatkan pendapatan petani karena memungkinkan terjadinya peningkatan produktivitas, sementara di sisi lain juga meningkatkan efisiensi. Namun pada penerapan corporate farming dimungkinkan terdapat variasi metode pelaksanaan maupun jenis kelembagaan pengelola. Studi literatur juga menunjukkan bahwa kelembagaan pengelola yang optimal merupakan faktor penentu keberhasilan dan keberlanjutan usaha tani corporate farming. Terakhir, dibutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memadai karena usaha tani corporate farming merupakan usaha dari petani, oleh petani, dan untuk petani.

**Kata kunci:** agribisnis, efisiensi, konsolidasi, lembaga, petani

## A. Pendahuluan

Pertanian merupakan salah satu sektor dominan dalam struktur perekonomian di DIY. Sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan berperan besar terhadap perekonomian DIY sebagai penyumbang PDRB terbesar ketiga pada tahun 2017. Hal ini dikarenakan, sektor pertanian berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan pangan

dan penyediaan bahan baku industri. Selain itu, sektor pertanian juga merupakan penyerap tenaga kerja dengan jumlah besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sektor pertanian menjadi salah satu tumpuan sebagian besar masyarakat di DIY, terutama di daerah pedesaan. Dominasi sektor pertanian tersebut juga menunjukkan bahwa sektor pertanian perlu

ditangani secara berkelanjutan berkaitan dengan pencapaian aspek kesejahteraan masyarakat.

Sektor pertanian di DIY masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Pertama, terkait sumberdaya lahan yang merupakan sumber daya terpenting untuk dikelola makin mengalami tekanan ketika laju konversi lahan pertanian produktif cukup besar. Data dari Dinas Pertanian DIY menunjukkan bahwa alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian rata-rata sebesar 1,13% per tahun selama kurun waktu 2007-2017. Di sisi lain, kepemilikan lahan pertanian di DIY juga cenderung semakin kecil, yaitu rata-rata 0,27 ha (BPS, 2013). Kedua, kurangnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia pertanian. Hal ini ditunjukkan dengan semakin menurunnya jumlah rumah tangga petani serta produktivitas tenaga kerja pertanian yang tergolong rendah.

Menurut Kurnia (2004) ada empat hal penting yang bisa dilakukan untuk pemberdayaan petani, yaitu: pertama, mengingat luas dan status penguasaan lahan pertanian merupakan permasalahan pertanian mendasar, maka penataan dari sistem dan struktur alokasi sumber-sumber agraria yang berintikan *land reform* tetap harus menjadi agenda pembangunan pertanian. Kedua, akses terhadap informasi (*access to information*). Ketiga, adalah inklusi dan partisipasi (*inclusion and participation*). Pemberdayaan diupayakan untuk menyentuh petani seluas mungkin dengan semakin meningkatkan keterlibatan petani. Keempat, peningkatan kapasitas organisasi lokal (*local organizational capacity*).

Pemberdayaan petani harus difokuskan untuk mempersiapkan petani menghadapi persaingan yang semakin mengglobal. Diperlukan kesatuan manajemen yang terpadu dalam rangka meningkatkan daya saing produk pertanian. Berdasarkan hal tersebut, maka upaya pemberdayaan petani perlu dilakukan melalui pendekatan model kelompok dalam skala yang lebih luas dengan adanya kesatuan pengambilan keputusan dalam melaksanakan kegiatan usaha.

Beberapa strategi pengelolaan usaha tani telah dikembangkan dalam rangka meningkatkan daya

dukung sumber daya alam, memperbaiki produktivitas dan kualitas produk, meningkatkan efisiensi usaha, dan memaksimalkan profit. Hal ini dilakukan melalui penjalinan kemitraan dan kerjasama dalam rangka perbesaran skala usaha, pemanfaatan teknologi budidaya, akumulasi modal, serta manajemen usaha profesional.

Corporate farming pada prinsipnya merupakan upaya kerjasama antar petani dengan menggabungkan usaha-usaha tani yang relatif kecil menjadi suatu usaha skala besar yang memenuhi skala ekonomi dalam satu naungan manajemen kelembagaan usaha. Dengan adanya pengintegrasian kekuatan ini, maka diperoleh produktivitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pasar, baik dari sisi kuantitas, kualitas, maupun kontinuitas. Selain itu, corporate farming menjadikan usaha tani menjadi lebih efisien, lebih berdayasaing, serta menghasilkan nilai tambah yang diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Di sisi lain, penerapan corporate farming masih menghadapi beberapa kendala, diantaranya terkait belum optimalnya kelembagaan pengelola. Akibatnya, tidak seluruh petani bersedia memercayakan pengelolaan lahannya kepada lembaga pengelola. Interaksi antar pihak-pihak dalam kelembagaan juga sering mengalami hambatan ketika lembaga pengelola kurang mampu menyinergikan anggotanya. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan kemitraan tidak berjalan seperti yang diharapkan.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan tema corporate farming dengan mengkaji berbagai penelitian terkait kemitraan secara umum dalam agribisnis. Selanjutnya, dari berbagai sumber pustaka juga dilakukan peringkasan (*summarization*) yang lebih spesifik mengenai salah satu metode konsolidasi/kemitraan dalam usaha tani yaitu corporate farming untuk mengetahui berbagai penemuan penting maupun konsep-konsep kunci mengenai corporate farming, termasuk mengidentifikasi faktor pendukung dan

penghambatnya. Terakhir, berangkat dari berbagai penelitian tersebut kemudian dibandingkan dengan penerapan corporate farming di DIY yang saat ini masih pada tahapan pilot project.

## C. Hasil dan Pembahasan

### C.1. Corporate Farming sebagai Manifestasi Kemitraan dalam Usaha Agribisnis

Belum optimalnya produktivitas dan kurang efisiennya usahatani skala kecil disebabkan kapasitas SDM petani yang masih relatif rendah, kesulitan dalam mengakses modal, informasi teknologi baru masih kurang, serta kurang efisiennya penggunaan tenaga kerja karena sempitnya lahan yang dikelola. Selain itu, pengadaan sarana produksi masih dilakukan secara sendiri-sendiri sehingga harganya menjadi mahal dan penggunaan per satuan luas relatif lebih banyak. Sementara pemasaran hasil yang dilakukan secara perorangan juga menyebabkan petani tidak mempunyai kekuatan daya tawar. Kurniati dan Hawa (2003) menyatakan bahwa petani yang bertindak secara individu akan menyebabkan penggunaan sarana produksi yang berbeda-beda, manajemen usaha tani yang variatif, hingga pengelolaan lahan berdasarkan preferensi masing-masing petani, sehingga produktivitas pertanian

Rizal (2003) menyatakan bahwa untuk dapat bersaing dalam pasar modern dengan skala usaha yang kecil dibutuhkan adanya suatu upaya kolektif dari petani untuk dapat memperbesar skala usahanya mencapai *economies of scale* yang diinginkan pasar modern. Upaya kolektif yang dimaksud dilakukan dengan menjalin suatu kemitraan antar petani.

Menurut Hafsah (1999), kemitraan merupakan strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara keduanya dalam menjalankan etika bisnis. Pertanian juga harus dikelola menjadi bagian dari suatu sistem dan usaha agribisnis yang efektif dan efisien.

Sistem agribisnis sendiri menurut Hadi et al (1994) sudah didefinisikan secara jelas yaitu memiliki azas terpusat, efisiensi, menyeluruh dan terpadu serta menjaga kelestarian lingkungan. Azas terpusat dimaksudkan sebagai pemusatan atau pengkonsentrasian pembinaan di daerah-daerah yang secara agro-ekologi mempunyai potensi yang sangat tinggi, baik kondisi sekarang maupun potensi pengembangannya di masa mendatang. Konsep di atas sangat jelas mengemukakan adanya penggabungan/konsolidasi aspek manajemen, agroekologi, komoditas dan tentunya kelembagaan baik secara vertikal (pusat-daerah hingga level desa) dan horizontal (antar instansi terkait, pelaku agribisnis dan petani). Saptana et al (2004) juga mengemukakan hal yang serupa, yaitu konsep agribisnis sebagai suatu sistem yang menggabungkan sistem dari hulu sampai hilir sebagai suatu usaha.

Kelembagaan petani yang merupakan bagian dari sistem agribisnis dapat menjalin kemitraan dalam melakukan kegiatan usaha bersama sehingga lebih efisien dan menguntungkan. Berdasarkan subsistem yang ada dalam konsep agribisnis, maka kolektivitas yang dilakukan harus sesuai dengan masing-masing tahapan subsistem tersebut, yaitu kolektivitas produksi, kolektivitas pengolahan, dan kolektivitas pendukung (Saragih, 2000). Secara rinci mengenai kolektivitas untuk masing-masing sub sistem dijabarkan dalam tabel berikut:

**Tabel 1.** Kegiatan Usaha Tani Kolektif pada Subsistem.

No	Subsistem	Kegiatan
1	Produksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan lahan dan air</li> <li>• Penyediaan dan pengelolaan sarana produksi dan alat mesin pertanian</li> <li>• Perencanaan produksi</li> <li>• Penerapan teknologi budidaya</li> <li>• Pelaksanaan produksi dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama</li> <li>• Pengendalian hama dan penyakit</li> </ul>
2	Pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan dan pengelolaan sarana pengolahan</li> <li>• Penerapan teknologi pengolahan</li> <li>• Pelaksanaan pengolahan sejak penanganan pasca panen</li> <li>• Penjaminan mutu produk pertanian</li> </ul>
3	Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyimpanan produk pertanian</li> <li>• Pengemasan produk pertanian</li> <li>• Distribusi produk segar maupun olahan ke konsumen</li> <li>• Kemitraan maupun kerjasama dengan pemasar skala besar</li> </ul>
4	Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghimpunan modal</li> <li>• Akses dan penyebarluasan informasi</li> </ul>

Kemitraan dalam usaha agribisnis mempunyai beberapa keuntungan diantaranya: 1) Usaha-usaha agribisnis yang umumnya berskala kecil dapat dirancang menjadi skala ekonomi yang berorientasi pasar dan terpadu dengan usaha lainnya sehingga lebih komersial; 2) Usaha-usaha agribisnis berskala kecil yang menggabungkan diri dapat secara bersama menanggulangi kendala-kendala usaha yang ada; 3) Usaha agribisnis berskala kecil yang menggabungkan diri dalam satu wadah dapat lebih memudahkan dalam pengalokasian dukungan berupa pelatihan, pendampingan, maupun bantuan modal baik dari pemerintah, swasta, maupun pihak lain.

Corporate farming merupakan salah satu skema kemitraan kolektif dalam usaha tani agribisnis untuk dapat bersaing dalam pasar modern dan global saat ini. Kemitraan tersebut menggabungkan kekuatan dari para petani untuk membentuk suatu kelompok yang memiliki visi dan tujuan bersama. Dengan adanya penggabungan kekuatan ini, maka terbentuk sinergi produktifitas yang mampu secara stabil memenuhi kebutuhan pasar, baik dari sisi jumlah, kualitas maupun keberlangsungan.

Menurut Asmani (2013), sistem korporasi adalah konsolidasi kegiatan usahatani yang dilakukan oleh petani dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen sebagai suatu perusahaan milik petani untuk mencapai efektivitas, efisiensi dan berkelanjutan. Prinsip pengembangan corporate farming adalah membangun keterpaduan dan kemandirian dalam pengambilan keputusan bersama dalam mengelola sumber daya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani (Prakoso, 2000). Dalam corporate farming terjadi penyatuan modal petani yang dikelola dengan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan sehingga produktivitas meningkat, pendapatan semakin tinggi dan kesejahteraan petani dapat terwujud.

Setiawan (2008) menyatakan bahwa ciri pokok dari corporate farming adalah sebagai berikut:

1. Sekelompok petani sehamparan memercayakan pengelolaan lahannya kepada suatu lembaga agribisnis dengan suatu perjanjian kerjasama ekonomi tertentu,

dimana petani bertindak sebagai pemegang saham sesuai dengan luas lahan kepemilikannya.

2. Corporate farming dibentuk melalui musyawarah/ mufakat antar para anggotanya dengan memperhatikan sosial dan budaya setempat.
3. Corporate farming dipimpin oleh manajer profesional, yang dipilih oleh petani serta dikelola secara transparan dan demokratis sesuai dengan kaidah bisnis komersial.
4. Corporate farming mensyaratkan skala usaha optimal sesuai dengan kondisi dan kapasitas sumberdaya setempat, potensi dan kapasitas pengembangan agroindustri dan pemasaran, serta ketersediaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kemampuan teknis pengelolaan dalam satu manajemen.
5. Cakupan kegiatan corporate farming tetap bertumpu pada komoditas unggulan di wilayahnya dan memperhatikan peluang pengembangan serta diversifikasi, baik secara vertikal maupun horizontal.

Corporate farming secara mikro menerapkan azas *Economies of scale* yaitu semakin luas pengelolaan usaha, maka akan semakin efisien biaya produksinya. Hal ini mencakup pengelolaan tanaman, biaya sarana produksi, biaya transportasi, dan biaya pemasaran hasil usahatani. Selain itu, dengan corporate farming akan dapat diperoleh kemudahan dalam hal akses informasi, akses modal, dan penetrasi ke pasar.

Konsolidasi pengelolaan lahan sawah dalam satu manajemen pengelola diharapkan dapat memberikan berbagai alternatif peluang usaha. Para petani pemilik lahan dapat bekerja di lahan dan mendapat insentif, dapat memperoleh sewa tanah yang dimilikinya, maupun dapat menjadi penyedia jasa tenaga kerja di luar usahatani tetapi masih di dalam desa tersebut atau di luar desa. Selain itu, lembaga pengelola juga dapat memperoleh bagian dari margin keuntungan sebagai imbal balik atas jasa mereka.

Dinas Pertanian (2000) dalam Musthofa dan Kurnia (2018) menyatakan bahwa keberhasilan corporate

farming akan lebih cepat dicapai apabila didukung oleh berbagai faktor antara lain:

1. Pengembangan corporate farming dilaksanakan secara terpadu dengan pengembangan ekonomi wilayah setempat.
2. Tersedianya lapangan pekerjaan alternatif lain bagi petani yang mempercayakan pengelolaan lahannya kepada corporate farming.
3. Tersedianya dana khusus untuk memulai usaha (start-up business) dan seed capital bagi petani untuk memulai kegiatan baru.
4. Terdapat lembaga (pemerintah/non pemerintah) yang mampu berfungsi sebagai fasilitator.

Sistem corporate farming juga membuka luas peluang kemitraan dan kerjasama dengan pihak lain. Hal ini dikarenakan petani diwadahi dalam bentuk kelompok atau organisasi. Petani dapat bekerjasama dengan Pemerintah yang dapat bertindak sebagai fasilitator sekaligus katalisator dalam kegiatan perencanaan, penyusunan strategi usaha, introduksi teknologi terapan spesifik lokasi yang efisien, bantuan akses modal, sarana produksi serta fasilitator dalam proses pemasaran hasil. Sementara kemitraan dengan pihak swasta dapat dilakukan dalam menyediakan berbagai sarana produksi pertanian seperti benih, pupuk dan obat-obatan untuk berusahatani. Selain itu, pihak swasta juga dapat berperan sebagai penampung produksi dan mitra pemasaran pada aspek hilir. Di sisi lain, akademisi dapat berperan melalui diseminasi hasil penelitian, penerapan teknologi pertanian, pengelolaan produk pertanian agar memiliki nilai tambah, pendampingan pemasaran, serta sebagai pihak yang menghubungkan antara petani dengan swasta dan pemerintah. Melalui kemitraan dengan berbagai pihak, corporate farming dapat menjadi usaha tani yang lebih efektif dan efisien karena sudah ada keterhubungan dengan pasar, tersedianya alternatif off-farm, tersedianya modal, dan adanya lembaga (pemerintah, swasta, perguruan tinggi) yang bersedia sebagai fasilitator sekaligus katalisator.

Salah satu contoh keberhasilan pengelolaan usaha tani melalui konsolidasi diungkapkan oleh Ditjen PSP (2010) yang mengevaluasi pilot percontohan konsolidasi usaha tani di provinsi Bali dan Jawa

Tengah dan menemukan beberapa hal diantaranya: 1) penguatan kelembagaan kelompok tani berhasil mencegah terjadinya alih fungsi lahan menjadi bangunan perumahan, 2) adanya alokasi dana berupa infrastruktur dan bantuan saprodi sebagai insentif bagi petani yang mengusahakan lahan sawah, 3) kesediaan beberapa anggota kelompok petani untuk mencari lapangan kerja diluar lahan usahatannya, sedangkan lahannya diusahakan oleh anggota kelompok lainnya, 4) kesediaan para pejabat Pemerintah Daerah untuk dapat menerima pandangan kelompok tani untuk mempertahankan ekosistem usahatani pada subak dan 5) dukungan pemerintah untuk memberikan insentif kepada petani berupa bebas pajak bumi bangunan (PBB) yang ditanggung melalui DPA APBD.

Keberhasilan program juga dilaporkan oleh Sinuraya et al (2011) yang melaporkan bahwa walaupun konsolidasi usaha tani masih berupa uji coba di beberapa lokasi dapat dikatakan berhasil untuk mengurangi laju alih fungsi lahan dan fragmentasi lahan pertanian. Keberhasilan ini antara lain disebabkan adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pertanian untuk pelaksanaan di daerah.

Kasijadi et al (2003) yang meneliti pengembangan corporate farming lahan sawah di Jawa Timur juga menyampaikan keunggulan konsolidasi usaha tani mampu menekan harga sarana produksi, menurunkan produktivitas minimal untuk mencapai titik impas 5–15%, dan dapat meningkatkan daya saing hasil padi, karena dapat meningkatkan produktivitas 5 – 37%, meningkatkan keuntungan bersih 14 – 64% dan keunggulan kompetitif lebih tinggi 7 – 22%.

## **C.2. Optimalisasi Kelembagaan Pengelola Corporate Farming melalui Pembentukan Koperasi**

Usahatani yang dilakukan secara individu oleh petani akan menyebabkan petani terus berada di pihak yang lemah. Hal ini disebabkan petani secara individu hanya akan mengelola usaha tani dengan luas garapan kecil dan terpecah dengan kepemilikan modal yang rendah. Kelembagaan



Corporate Farming dipandang sesuai dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis sektor pertanian.

Model corporate farming dalam kondisi idealnya dapat secara efektif memberdayakan petani melalui kelembagaan tani yang bekerja secara optimal. Kelembagaan pengelola tani mengkonsolidasi kegiatan penyediaan saprodi, pola tanam yang serentak, keseragaman teknologi, pasca panen terpadu, dan pemasaran yang terorganisasi. Selain itu, lembaga pengelola dapat menjalin kerjasama yang terintegrasi secara vertikal dan horisontal dengan pihak swasta dan fasilitator pemerintah. Kelembagaan pengelola akan mendorong petani secara aktif terlibat di setiap kegiatan dan mempunyai kepedulian akan keberhasilan usaha kelompoknya karena organisasi tersebut beranggotakan mereka sendiri, dikelola oleh mereka sendiri, dan mereka juga yang bertindak sebagai penerima manfaat.

Keberadaan usaha tani yang terintegrasi pun dirasakan menguntungkan bagi Pemerintah, terutama dalam upaya memfasilitasi kegiatan usahanya. Dengan tersentralnya petani dalam satu kelembagaan pengelola, maka akan lebih memudahkan dalam upaya untuk menjadikan petani tersebut sebagai target kebijakan melalui program/kegiatan seperti pelatihan dan bimbingan teknis, penyediaan kredit, penyediaan fasilitas produksi atau penyelenggaraan pameran produk.

Di sisi lain, upaya untuk menyatukan skala usaha yang kecil dalam suatu organisasi yang utuh melalui skema corporate farming bukanlah pekerjaan yang mudah. Kasijadi et al menyatakan bahwa pemberdayaan petani melalui model Corporate Farming belum dapat diterima petani, terutama penyerahan pengelolaan lahan dan konsolidasi lahan. Sekitar 65% petani tidak bersedia lahan usahanya dikelola dalam satu manajemen dan petani hanya sebagai pemegang saham. Alasan menolak tersebut diantaranya lahan merupakan sumber mata pencaharian utama petani, sedangkan tidak mudah memperoleh pekerjaan alternatif yang lebih baik walaupun diakui pendapatan dari usahatani kecil.

Selain itu, Aprini (2015) dalam penelitiannya mengenai penerapan kelembagaan corporate farming pada usaha tani padi ekosistem pasang surut di Kabupaten Ogan Komering Ilir mengungkapkan bahwa terdapat kendala belum adanya persepsi yang sama antar anggota dalam corporate farming. Mengubah pola pikir petani dari pola pertanian konvensional ke arah pertanian yang tertintegrasi sektor hulu dan hilir serta sekaligus secara bertahap memahami bisnis prosesnya dengan baik bukanlah suatu hal yang mudah. Perbedaan persepsi antar petani kemudian diikuti oleh lemahnya koordinasi horizontal secara internal kelembagaan serta kurangnya partisipasi individu petani. Akibatnya kinerja usaha tani tidak dapat berjalan secara optimal.

Aprini dalam penelitiannya juga menemukan kendala tidak tersedianya dukungan dana awal. Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh petani menyulitkan operasionalisasi usaha tani skema corporate farming. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Sinuraya et al (2011) yang menjumpai permasalahan prinsip yang menghambat Gapoktan menjalin kerjasama dalam mengakses modal dari bank, yaitu Gapoktan belum memiliki badan hukum.

Dari uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa kelembagaan pengelola merupakan faktor kunci yang dapat mendorong keberhasilan penerapan corporate farming. Pemecahan masalah dari perspektif kelembagaan sebagai penentu keberhasilan dan keberlanjutan program perlu ditempatkan sebagai prioritas utama.

Wahyuni dan Pranadji (2015) menyebutkan bahwa salah satu alternatif kelembagaan pengelola usaha tani sistem corporate farming selain Gapoktan adalah membentuk Badan Usaha Milik Petani (BUMP) dengan koperasi sebagai semangatnya. Tujuan pembentukan badan usaha/koperasi utamanya dalam rangka pengembangan usaha di masa mendatang. Hal ini juga dikarenakan gapoktan terbatas dalam melakukan usaha yang bersifat komersial. Keuntungan yang bisa didapat dari koperasi yang sudah berbadan hukum diantaranya yaitu dilindungi oleh hukum, lebih aman, mendapat pembinaan dari pemerintah, serta

dapat memperoleh alokasi dana untuk pembiayaan koperasi. Koperasi berbadan hukum dapat menghimpun modal, dapat membeli atau menjual barang, dapat membuat perjanjian, dapat memiliki aset, serta dapat mempunyai hutang. Selain itu, koperasi yang telah berbadan hukum meningkatkan daya tawar mereka kepada pihak ketiga.

Peran koperasi dalam agribisnis hulu diutamakan dalam pengadaan, penyediaan dan penyaluran input produksi, mesin dan alat-alat pertanian, sedang untuk industrinya, koperasi jika memungkinkan dapat ikut berperan sebagai pemilik atau pemegang saham. Peran dan kegiatan usaha agribisnis hilir merupakan kegiatan yang paling strategis yang dapat ditangani oleh koperasi sebagai kekuatan penyeimbang untuk menumbuhkan pasar yang bersaing, sehingga anggota dapat menikmati harga yang wajar dan adil sebanding dengan pengorbanan dan harapan anggota. Untuk komoditas pertanian yang membutuhkan penanganan khusus dengan teknologi pengolahan modern dan padat modal, diupayakan koperasi dapat ikut berperan sebagai pemilik modal/saham.

Peran atau kegiatan di subsistem on-farm atau di lahan lokasi pertanian umumnya langsung ditangani oleh individu petani. Koperasi dapat berperan menyediakan dan mengatur pemanfaatan bersama mesin-mesin dan alat-alat pertanian, sehingga koperasi lebih cenderung berfungsi sebagai unit pelayanan, bukan sebagai unit yang berorientasi profit. Koperasi dapat juga berperan membuka akses anggota kepada berbagai fasilitas, jika mungkin bertindak sebagai avalis atau penjamin kepentingan anggotanya.

Dengan berbagai keuntungan tersebut, koperasi dapat terus mengembangkan potensinya ke arah usaha yang lebih besar melalui perluasan jaringan usaha koperasi dan keterkaitan dengan usaha negara dan swasta. Akhirnya, diharapkan hakikat dari koperasi sebagai wadah perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

Di sisi lain, semakin luasnya lingkup pengelolaan koperasi dari hulu hingga hilir merupakan suatu tantangan tersendiri. Semakin beragamnya bidang

pekerjaan yang dikelola berarti semakin beragam pula potensi permasalahan yang mungkin terjadi. Koperasi saat ini tidak dapat hanya memfokuskan perhatian ke aspek budidaya dan meninggalkan aspek lainnya. Oleh karena itu, dituntut adanya suatu manajemen yang baik terutama dalam pengalokasian sumberdaya manusia ke bagian yang membutuhkan berdasarkan urutan prioritas.

Susilo (2013) mengemukakan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh koperasi agribisnis agar ketahanan pangan dapat tercapai, sekaligus untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat adalah:

- 1) Melakukan revitalisasi dan konsolidasi internal  
Hal ini dapat dilakukan dengan cara:
  - Memberikan kesempatan kepada Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitasnya.
  - Menata administrasinya dengan cara memasukkan Teknologi Informasi yang up to date
  - Pembenahan keanggotaan agar sesuai jati diri Koperasi
- 2) Terlibat secara aktif dalam revitalisasi pertanian  
koperasi agribisnis perlu meningkatkan kemampuannya dalam bidang teknologi bercocok tanam yang efektif dan produktif agar dapat mentransfer *knowledge* (pengetahuan) kepada anggota dan masyarakat
- 3) Menggali potensi agribisnis yang sesuai dengan lokasi koperasi berada  
Koperasi agribisnis harus menjadi koperasi komoditas terbatas yang diusahakan petani dan mencakup keseluruhan sistem agribisnis. Bisnis Koperasi harus disesuaikan dengan masyarakat lokal dimana Koperasi berada. Bisnis utama koperasi agribisnis melayani on-farm tapi kegiatannya melebar ke hulu, hilir, dan jasa yang menunjang on-farm, serta mampu bekerjasama dengan pihak-pihak yang sudah ada di jalur bisnis tersebut
- 4) Membuat skim pembiayaan yang tepat untuk sektor pertanian



Koperasi agribisnis harus memiliki kemampuan untuk mendesain produk dan skim yang cocok untuk meningkatkan produksi anggotanya, karena sector ini biasanya sangat dipengaruhi oleh musim dan fluktuasi harga yang tinggi.

### **C.3. Penerapan Corporate Farming di DIY**

Meskipun menjadi salah satu sektor yang mendominasi perekonomian DIY, namun kontribusi sektor pertanian cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tercatat sebesar 11,13%, namun pada tahun 2017 menurun hingga sebesar 10,01%. Penurunan kontribusi sektor pertanian disebabkan peningkatan kontribusi sektor lain, seperti real estat dan perdagangan yang tumbuh lebih pesat.

Pertumbuhan sektor lain di luar sektor pertanian menyebabkan kebutuhan terhadap lahan juga meningkat. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Pada periode 2013 – 2017, terjadi penurunan luas lahan sawah sebesar 4.065 ha. Dalam kurun waktu tersebut, luas lahan sawah beririgasi teknis berkurang sebesar 4.256 ha, sedangkan luas lahan sawah non-irigasi/tadah hujan justru meningkat sebesar 191 ha.

Konversi lahan sawah maupun bukan sawah sejalan dengan rata-rata pertumbuhan produksi padi sawah maupun padi ladang yang cenderung melambat. Rata-rata pertumbuhan padi sawah pada periode tahun 2013 – 2017 sebesar -0,80%, sedangkan rata-rata pertumbuhan padi ladang pada periode yang sama sebesar -10,34%.

Konversi lahan di DIY banyak terjadi pada kawasan pertanian di pinggiran kota, sehingga akan berdampak lebih kompleks. Petani terutama buruh tani yang semula bekerja menggarap lahan milik orang lain kemudian akan kehilangan pekerjaannya, padahal sebagian besar dari mereka tidak memiliki keterampilan lain selain bertani. Beberapa orang dari petani dapat kemudian bekerja pada sektor informal di kota. Namun sebagian yang lain terpinggirkan tanpa memiliki mata pencaharian tetap. Hal ini akan semakin memperburuk kondisi kemiskinan di pedesaan pinggiran kota.

Konversi lahan juga akan berakibat terhadap menghilangnya beberapa kelembagaan lokal yang selama ini menunjang pembangunan pertanian. Kelompok tani yang dibentuk dengan tujuan agar pengelolaan usaha pertanian dapat lebih efektif dan efisien dengan sendirinya akan luruh bersamaan dengan mudarnya aktivitas pertanian sebagai akibat konversi lahan

Di sisi lain, Rumah Tangga Petani DIY didominasi oleh jumlah petani gurem yang unit pengelolaan lahannya sangat kecil, yaitu dalam kisaran 0,2 hingga 0,5 ha. Jumlah rumah tangga petani DIY pada tahun 2013 juga mengalami penurunan sebesar -13,75% bila dibandingkan dengan rumah tangga petani pada tahun 2003 (BPS, 2014). Bahkan jumlah rumah tangga petani dengan kelompok umur >55 tahun memiliki proporsi yang sangat dominan (47,91%). Problem tersebut juga diperparah dengan rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja pertanian, yaitu sebesar Rp. 26,41 juta/orang/tahun pada tahun 2017, atau merupakan peringkat terendah kedua (BPS DIY, 2018).

Di sisi lain, intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah juga masih berbasis pada kelompok tani yang bertindak secara otonom. Pemberian fasilitasi/subsidi input kepada kelompok petani sering tidak efektif karena masing-masing kelompok mempunyai preferensi dan kepentingan sendiri. Penggunaan pupuk maupun alsintan per satuan luas juga tidak efisien karena tidak proporsional. Sementara pemasaran hasil yang dilakukan oleh masing-masing kelompok juga menyebabkan petani tidak mempunyai kekuatan daya tawar. Selain itu, kelompok tani yang bukan merupakan badan usaha menjadikannya terbatas dalam mengakses modal.

Intinya, skala usaha tani yang kecil disertai pengelolaan yang cenderung individualis dan tradisional menyebabkan biaya produksi menjadi tidak efisien dan produktivitas belum optimal, sehingga pendapatan petani masih tetap rendah. Hal ini sejalan dengan data Nilai Tukar Petani DIY yang sering digunakan sebagai salah satu indikator kesejahteraan petani. NTP DIY menunjukkan kinerja pertanian DIY belum optimal. NTP sub sektor tanaman pangan dan hortikultura hanya

berada sedikit di atas skor 100. Sub sektor peternakan bahkan di bawah skor 100.

Berdasarkan berbagai temuan permasalahan di sektor pertanian DIY, maka Bank Indonesia bekerjasama dengan Fakultas Pertanian UGM pada tahun 2017 memulai suatu pilot project corporate farming yang berlokasi di Bulak Ancak, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul. Bentuk lahan berupa hamparan hamparan dengan luas 6 ha dan dikelola oleh 73 orang. Penguasaan lahan masing-masing petani bervariasi, namun tidak lebih dari 0,1 ha.

Tahapan selanjutnya adalah melakukan pemetaan lahan dengan menggunakan drone untuk memotret lahan sehingga diketahui letak, batasan, dan luas lahan. Hasil pemetaan tersebut kemudian dielaborasi dengan informasi dari petani. Petani pemilik lahan tidak perlu ragu lagi bahwa hak kepemilikan tanahnya akan hilang dengan adanya proses konsolidasi.

Selanjutnya, dilakukan pembentukan regu yang terdiri dari 5 hingga 7 orang petani pemilik maupun penggarap lahan, sehingga secara keseluruhan terbentuk 22 regu. Masing-masing ketua regu kemudian bertindak sebagai koordinator. Seluruh petak lahan dikonsolidasikan menjadi hanya 22 petak besar, dari semula 73 petani/penggarap menjadi 22 regu.

Di dalam regu dimungkinkan adanya interaksi berupa dialog dan negosiasi antara pihak-pihak yang mempunyai berbagai kepentingan. Berbagai penyesuaian terjadi dan ketika situasi menjadi semakin mengerucut, maka berbagai pelaku di dalam jejaring dapat mencapai kesepakatan. Pada akhirnya, kebutuhan regu kemudian didefinisikan.

Selanjutnya terjadilah proses diskusi dan penginternalisasian tujuan regu ke dalam diri anggota, sehingga anggota merasa bahwa tujuannya dengan tujuan regu tersebut mempunyai kesesuaian. Fase ini kemudian diakhiri dengan kesepakatan dalam regu mengenai norma-norma atau peraturan mengenai hak dan kewajiban untuk menjamin stabilitas regu.

Kesepakatan mengenai norma dan peraturan tersebut termasuk dalam hal pengalihan

kepemilikan lahan. Keputusan untuk menjual lahan harus disepakati bersama dalam regu. Kepentingan regu berada di atas kepentingan masing-masing anggota. Hal ini pada akhirnya dapat ikut berperan dalam mencegah alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian. Pengambilan keputusan lain terkait keberlangsungan usaha juga dilakukan dengan pola yang sama, yaitu dilakukan melalui proses musyawarah antar anggota.

Pada tahap awal pengembangan model, pengelolaan lahan belum sepenuhnya dipercayakan pada satu lembaga pengelola usaha tani dalam satu hamparan tersebut. Masing-masing ketua regu bertanggungjawab terhadap pengusahaan lahan di kelompoknya. Pada akhirnya, walaupun secara umum terjadi efisiensi dalam pengusahaan tani, namun produktivitas hasil masing-masing regu masih berbeda.

Penerapan konsep corporate farming di Bantul pada dasarnya dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Konsolidasi pengadaan saprodi dan modal  
Pengadaan peralatan pengolahan tanah, benih, pupuk dan pestisida serta modal usaha dilakukan secara korporasi. Pengadaan sarana produksi didasarkan dari hasil kesepakatan di dalam regu dan antar regu. Masing-masing regu menyusun rencana kebutuhan saprodi. Pemilihan teknologi dan saprodi yang akan digunakan juga dikonsultasikan kepada Fakultas Pertanian UGM dan dinas terkait. Sementara itu, pemenuhan kebutuhan modal awal dibiayai secara swadaya dengan menghimpun dana dari anggota regu. Bank Indonesia juga memberikan bantuan alat mesin pertanian serta saprodi.
- 2) Konsolidasi Pelaksanaan Usaha  
Pengelolaan usaha sejak pengolahan lahan, penanaman, serta pemeliharaan dilaksanakan oleh masing-masing anggota kelompok tani dengan mengacu pada hasil kesepakatan bersama. Ketua regu bertugas mengatur waktu tanam dan pengawasan dalam pelaksanaan kesepakatan usaha. Sedangkan pembagian air irigasi serta perlindungan hama dan penyakit memerlukan koordinasi antar regu.

3) Konsolidasi Pasca Panen

Pengelolaan pasca panen dalam usahatani dilaksanakan secara korporasi dengan memanfaatkan mesin. Ketua regu dapat mengkoordinir beberapa orang menjadi regu panen dengan memanfaatkan mesin pertanian (power thresher, dll) agar tidak menghilangkan lapangan pekerjaan bagi buruh tani yang pekerjaannya diambilalih oleh mesin.

4) Konsolidasi Pemasaran

Pemasaran dilakukan secara terpadu bersama-sama. Ketua regu bertugas mencari kerjasama dalam pemasaran hasil. Anggota kelompok tani menerima sisa hasil setelah dikurangi biaya produksi baik dalam bentuk biaya pengolahan tanah, saprodi, panen dan lain sebagainya.

Konsolidasi usaha tani yang dilakukan memunculkan suatu pembelajaran kolektif. Hal ini dilaksanakan melalui proses perencanaan terbuka yang melibatkan partisipasi anggota kelompok. Interaksi dan dialog menghasilkan sinergi yang konkret dan memberikan akses terhadap pembuatan keputusan. Dialog yang terjadi juga merupakan dialog yang melibatkan berbagai pihak dan bukan merupakan dialog satu arah.

Dalam prosesnya, gagasan mengenai bagaimana regu/kelompok seharusnya bekerja pun kemudian dibangkitkan melalui interaksi yang terjadi. Regu melakukan upaya menemukan berbagai kebutuhannya, berusaha memahami permasalahan yang ada, kemudian merumuskan tindakan yang diperlukan untuk bisa menjamin kegiatan mereka berjalan secara efisien dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan potensi yang mereka miliki. Adanya suatu gagasan yang dibangkitkan serta bagaimana gagasan/pengetahuan tersebut didistribusikan hingga akhirnya terjadi pertukaran maupun penerimaan gagasan membuat kelompok semakin berkembang dalam usahanya.

Pada akhirnya, setelah dilakukan evaluasi terhadap kinerja pilot project corporate farming di Bantul, dapat diketahui bahwa konsolidasi lahan berdampak langsung terhadap rerata luasan lahan

yang dikelola, yaitu meningkat dari 0,07 ha ketika dikelola secara individu menjadi 0,26 ha setelah dibentuk kelompok. Selain itu, jika pengolahan lahan secara individu dengan mekanisasi sulit diaplikasikan, maka ketika telah dikonsolidasi mekanisasi menjadi lebih efisien dan mudah dilakukan. Setelah pengimplentasi corporate farming juga ditemukan bahwa produktivitas di lahan pilot project meningkat dari semula 3,5 ton menjadi 7,7 ton per ha (Bank Indonesia DIY, 2017).

Di sisi lain, bila dibandingkan aspek penggunaan tenaga kerja antara sebelum dan sesudah konsolidasi usaha tani dapat diketahui bahwa terjadi penghematan. Penghematan penggunaan tenaga kerja sebelum penerapan corporate farming kontribusi tenaga kerja keluarga mencapai 40%, namun setelah konsolidasi usaha tani penggunaan tenaga kerja menjadi sangat minim. Hal ini dikarenakan tenaga kerja manusia telah disubstitusi oleh alat dan mesin pertanian (pengolahan lahan/bajak, penanam, pemanen).

Sementara itu, sebagaimana yang terjadi pada sebagian besar usaha tani di DIY, regu-regu yang menjadi sasaran pilot project corporate farming di Bantul juga sebagian besar berusia di atas 45 tahun dengan tingkat pendidikan relatif rendah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, karena lembaga pengelola usaha tani terpadu juga para petani itu sendiri. Kelompok tani dituntut tidak hanya memahami aspek budidaya secara on-farm, namun juga perlu mengetahui aspek manajemen usaha hingga pemasaran. Berdasarkan hal tersebut, maka penguatan kapasitas petani menjadi suatu keharusan.

## **D. Kesimpulan dan Saran**

### **D.1. Kesimpulan**

- a) Konsolidasi usaha tani melalui model corporate farming terbukti dapat meningkatkan pendapatan petani karena memungkinkan terjadinya peningkatan produktivitas, sementara di sisi lain juga meningkatkan efisiensi. Namun penerapan corporate farming harus tetap memperhatikan

kondisi dan potensi wilayah bersangkutan, termasuk aspek sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini kemudian akan memunculkan beberapa alternatif metode pelaksanaan beserta jenis lembaga pengelolanya. Berbagai variasi dalam pelaksanaan program dapat diakomodasi, namun harus tetap berpegang pada prinsip konsolidasi, yaitu dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha tani.

- b) Kelembagaan pengelola yang optimal merupakan faktor penentu keberhasilan dan keberlanjutan usaha tani corporate farming. Apapun bentuk lembaga pengelola harus tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi terjadinya pembelajaran kolektif. Para petani sebagai anggota kelompok sekaligus sebagai penerima manfaat harus diberikan akses untuk terjadinya proses interaksi dan dialog sebagai dasar pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan secara kolektif pada akhirnya akan memperkuat eksistensi lembaga pengelola, baik dalam rangka penegakan aturan internal kelompok, maupun dalam rangka pengembangan usaha ke depan.
- c) Konsolidasi lahan yang dikelola oleh satu kelembagaan pengelola terkait erat dengan kualitas sumber daya manusia, yang dalam hal ini adalah petani. Penguatan kapasitas petani agar masyarakat lebih mandiri dan memegang kendali atas usaha mereka dilakukan dengan beberapa strategi sebagai berikut:
  - Penguatan kapasitas teknikal dilakukan melalui pembinaan terhadap masyarakat agar lebih terbuka terhadap berbagai pengetahuan baru sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan atau bahkan memodifikasi pengetahuan atau teknologi yang diperolehnya. Pemerintah dan akademisi dalam hal ini dapat berperan dalam pengenalan teknologi maupun sistem yang baru. Namun perlu diiringi dengan pengembangan komunikasi dua arah yang memungkinkan terjadinya negosiasi-negosiasi agar adopsi teknologi dapat berjalan dengan lancar.

- Penguatan kapasitas ekonomikal didukung dengan penciptaan kondisi-kondisi yang dapat mendukung terciptanya peluang-peluang bagi kelompok dan di sisi lain mengurangi ketergantungan dengan pihak lain yang dapat merugikan. Pada titik ini pemerintah dapat melakukan pembinaan manajemen usaha, fasilitasi sarana prasarana pertanian, maupun membantu lembaga pengelola dalam mengakses modal. Selain itu, kelembagaan pengelola dapat menjalin kemitraan dengan pihak ketiga, mulai dari aspek hulu hingga hilir.
- Penguatan kapasitas sosial dilakukan dengan pengembangan modal sosial yang mempertimbangkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat sehingga program pembangunan dapat didukung dengan partisipasi masyarakat. Strategi kebudayaan gotong royong dirasakan dapat menstimulasi partisipasi petani. Selain itu, internalisasi nilai-nilai kewirausahaan dapat juga dilakukan agar petani dapat mulai melakukan usaha tani yang menganut prinsip agribisnis.

## **D.2. Saran**

- a) Perlu sinergi lintas sektor dalam pemerintah karena usaha tani corporate farming memerlukan pembinaan lintas sektor. Dinas Pertanian dapat berperan dalam aspek budidaya on-farm hingga penanganan pasca panen, Dinas Pekerjaan Umum dapat berperan dalam hal penyediaan sarana prasarana sumberdaya air, sedangkan Dinas Koperasi dapat juga berperan ketika lembaga pengelolanya berbentuk koperasi
- b) Perlu dilakukan penelitian lanjutan di subsektor lain selain tanaman pangan, yaitu perkebunan, hortikultura, serta peternakan. Subsektor tanaman pangan membutuhkan lahan relatif lebih luas dibandingkan sub sektor lain, sehingga penerapan corporate farming di subsektor lain mungkin akan memberikan hasil yang berbeda.

## Daftar Pustaka

- Aprini, N. (2015). *Kajian Penerapan Kelembagaan Corporate Farming Pada Usahatani Padi Ekosistem Pasang Surut Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan*. Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal 2015, Palembang 08-09 Oktober 2015 ISBN: 979-587-580-9
- Asmani, N. (2013). *Pengelolaan Sumber Daya Alam Lestari Melalui Usaha Pertanian Pangan Sistem Korporasi (Sustainable Corporate Farming) Dalam Rangka REDD*. Prosiding Seminar Nasional. PERHEPI
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Sensus Pertanian 2013*. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik DIY. Beberapa edisi
- Bank Indonesia DIY. (2017). *Laporan Perkembangan Perekonomian DIY Triwulan III 2017*. Yogyakarta: Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY
- Dinas Pertanian Jawa Barat. (2000). *Panduan Rice Estate and Corporate Farming*. Bandung: Dinas Pertanian Jawa Barat
- Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. (2010). *Pedoman Teknis Konsolidasi Pengolahan Lahan Usahatani*. Jakarta: Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
- Hadi, P.U., Sajuti, R., Saptana, Erwidodo, M. Rachmat, K.M. Noekman, dan Djauhari, A. (1994). *Analisa Kebijakan Pengembangan Agribisnis Perikanan dan Hortikultura: Model Pengembangan Agribisnis Mangga*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor
- Hafsah, MJ. (1999). *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*. Jakarta: Departemen Pertanian.
- Kasijadi, F., Suryadi, A. Suwono. (2003). *Pemberdayaan Petani Lahan Sawah Melalui Pengembangan Kelompok Tani Dalam Perspektif Corporate Farming Di Jawa Timur*. Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Vol. 6, No. 2, Juli 2003 : 117-130
- Kurnia, G. (2004). *Petani: Pejuang yang Terpinggirkan*. Bandung: Unpad
- Kurniati, E. dan Hawa, LC. (2003). *Studi Kesiapan Petani Untuk Melaksanakan Pengelolaan Usaha Tani Melalui Pendekatan Ekonomi Sebagai Perusahaan Pertanian*. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 15;. Malang: Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya
- Musthofa, I. dan Kurnia, G. (2018). *Prospek Penerapan Sistem Corporate farming*.
- Prakoso, M. (2000). *Upaya Pengembangan Corporate Farming*. Jakarta: Departemen Pertanian.
- Rizal, Y. (2003). *Dampak Usaha Pertanian Kolektif terhadap Perkembangan Ekonomi Lokal*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Saptana, S., Wahyuni MS., Dermoredjo, SK., Ariningsih, E., Darwis, V. (2004). *Laporan Akhir pemantapan Model Pengembangan Kawasan Agrinisnis Sayuran Sumatera (KASS)*. Bogor: Pusat Penelitian dan pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.
- Saragih, B. (2009). *Agribisnis sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Indonesia dalam Era Millenium Baru*. Jurnal Studi Pembangunan, Kemasyarakatan, dan Lingkungan, Volume 2 No. 1/Februari 2009 (1-9)
- Setiawan, I. (2008). *Collective Farming sebagai Alternatif Strategi Pemberdayaan Petani (Studi Kasus di Desa Rancakasumba Kabupaten Bandung)*. Laporan Penelitian. Bandung: Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran.
- Sinuraya, YF., Agustin, NK., Pasaribu, SM., (2011). *Konsolidasi Lahan Pertanian pangan: Kasus di Provinsi Jawa Tengah*. Prosiding Konversi dan Fragmentasi Lahan. Ancaman terhadap Kemandirian Pangan. Jakarta: Badan Litbang Pertanian, kementerian Pertanian.
- Susilo, E. (2013). *Peran Koperasi Agribisnis dalam Ketahanan Pangan di Indonesia*. Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis Vol. 10 No. 1 Maret 2013
- Wahyuni, S. dan Pranadji, T. (2015). *Konsep, Implementasi, dan Faktor Penentu Keberhasilan Program Konsolidasi Usahatani*. Jurnal Manajemen & Agribisnis, Vol. 12 No. 1, Maret 2015



# Faktor-Faktor Pendorong Kewirausahaan

---

**Imam Budidharma**

imam.budidharma@gmail.com

Perencana Pertama, Bappeda DIY

## Abstrak

Kewirausahaan memiliki peran penting bagi pembangunan perekonomian suatu wilayah. Melalui kewirausahaan akan tercipta peningkatan produktifitas dan lapangan pekerjaan yang akhirnya akan mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong sebuah rumah tangga masuk dalam dunia usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data survei Indonesian Family Life Survey (IFLS) periode tahun 2014. Data IFLS yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tingkat individu, rumah tangga dan tingkat desa. Variabel apakah sebuah rumah tangga memasuki dunia kewirausahaan didekati dengan data dari pertanyaan survei yaitu apakah sebuah rumah tangga memiliki usaha non pertanian dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Berdasarkan hasil regresi logit, diperoleh hasil bahwa faktor institusional dan modal sosial berpengaruh positif terhadap kecenderungan rumah tangga untuk memasuki dunia kewirausahaan. Akses terhadap pasar dan layanan komunikasi memiliki pengaruh yang positif terhadap kewirausahaan. Lebih lanjut, kepercayaan atau trust sebagai bagian dari modal sosial, memiliki pengaruh positif terhadap kewirausahaan

**Kata kunci:** kewirausahaan, modal sosial, kelembagaan

## A. Pendahuluan

Kewirausahaan adalah mesin pendorong pembangunan suatu negara. Adanya wirausaha pada suatu wilayah akan menjamin pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja pada wilayah tersebut. Kewirausahaan dapat diartikan sebagai proses pengubahan ide untuk menjadi produk atau jasa yang berdampak pada produktifitas, penciptaan kesejahteraan, dan lapangan pekerjaan (Jafarnejad et al, 2013). Dalam konteks kewilayahan yang lebih sempit, misalnya pedesaan, adanya kewirausahaan juga dapat membantu komunitas lokal terhubung dengan perekonomian luar yang lebih luas (Henderson, 2002). Keterbukaan kegiatan perekonomian tersebut pada

akhirnya membawa peningkatan pendapatan bagi masyarakat setempat.

Berbagai faktor mempengaruhi mengapa individu atau rumah tangga masuk dalam dunia kewirausahaan. World Bank dalam penelitiannya (2014) menyimpulkan faktor-faktor yang berpengaruh positif terhadap probabilitas rumah tangga masuk ke dalam kewirausahaan antara lain kemampuan akses terhadap perkreditan, tingkat kesejahteraan, pendidikan dan usia dari kepala rumah tangga. Henderson (2002) berpendapat bahwa kebijakan kunci untuk menumbuhkan kewirausahaan adalah pembangunan kemampuan kewirausahaan individual (build the skills of entrepreneurs), pengembangan sumber daya lokal

(develop community resources) dan penciptaan jejaring (create support networks).

Penelitian Hasan (2011) dengan menggunakan data Indonesian Family Life Survei (IFLS) menunjukkan bahwa orang yang cenderung menjadi risk-taker lebih mungkin menjadi wirausaha daripada seorang yang risk-averse. Namun demikian, yang perlu diperhatikan terkait dengan kewirausahaan di Indonesia adalah fenomena kewirausahaan di Indonesia lebih didorong atas keterpaksaan daripada suatu pilihan. Mereka yang menjadi wirausaha lebih karena keterpaksaan akibat ketidakmampuan mengakses pekerjaan. Ketidakmampuan ini akibat dari pendidikan yang rendah maupun usia yang tidak muda lagi. Temuan tersebut juga selaras dengan hasil penelitian Thung (2014) yang menunjukkan bahwa mereka yang memiliki pendidikan formal tinggi, yakni menamatkan pendidikan di tingkat universitas, memiliki kemungkinan kecil untuk memilih profesi sebagai wirausaha. Riwat orang tua juga berpengaruh terhadap probabilitas seseorang memilih berwirausaha. Pekerjaan orang tua sebagai wirausaha berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap probabilitas seorang anak menjadi wirausaha (Thung, 2014).

Faktor lingkungan juga berpengaruh terhadap kewirausahaan. Adanya modal sosial seperti kepercayaan (trust) memberi pengaruh yang positif terhadap penciptaan wirausaha (Doh et al, 2011). Kewirausahaan juga dipengaruhi oleh aspek kelembagaan. Peraturan dan perlindungan hak kekayaan intelektual memengaruhi kepercayaan dalam transaksi antar pelaku usaha (transactional trust). Selain kapasitas pengetahuan dan manajerial dari seseorang, Jafarnejad et al (2013) menyimpulkan faktor-faktor eksternal yang bisa menghalangi seseorang memasuki dunia kewirausahaan antara lain ketersediaan informasi terkait dengan pasar dan sumber finansial.

Meskipun wirausaha memiliki kontribusi yang besar dalam perekonomian, jumlah wirausaha di Indonesia masih dinilai terlalu rendah. Presiden Joko Widodo memiliki pendapat bahwa di negara maju jumlah wirausaha mencapai 14% dari total penduduk, sementara di Indonesia hingga tahun 2018 tingkat wirausaha masih berada dalam kisaran angka 3,1%.

Penumbuhan wirausaha adalah salah satu strategi yang ditempuh dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) DIY 2017-2022 terutama untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan meningkatnya derajat ekonomi masyarakat. Rumusan strategi ini cukup menarik mengingat dalam periode RPJMD sebelumnya isu penumbuhan wirausaha belum secara tereksplisit tercantum dalam strategi dan arah kebijakan pembangunan. Bahkan dalam RPJMD DIY 2017-2022, indikator persentase peningkatan penumbuhan wirausaha digunakan sebagai salah satu indikator kinerja program pemerintah daerah. Selain itu, Pemda DIY telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kewirausahaan Daerah. Meskipun demikian, peraturan tersebut belum mendetailkan pentahapan atau arahan program terkait kewirausahaan. Pengaturan lebih didetail ditetapkan melalui dokumen Rencana Induk Kewirausahaan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kewirausahaan. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, selanjutnya Pemerintah Daerah dapat menyusun kebijakan serta kegiatan yang mendukung terbentuknya kewirausahaan di DIY.

## **B. Metode Penelitian**

### **B.1. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data survei Indonesian

Family Life Survey (IFLS) periode tahun 2014. Keterbatasan data survei yang secara khusus untuk populasi DIY menyebabkan penulis menggunakan data yang merepresentasikan populasi Indonesia. Data IFLS adalah data yang sangat kaya dan lengkap yang merupakan representasi lebih dari 80 persen populasi Indonesia. Survei IFLS mencakup informasi mengenai karakteristik demografi individu, kondisi sosial dan ekonomi individu dan rumah tangga. Data IFLS yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tingkat individu, rumah tangga dan tingkat desa.

## B.2. Model Ekonometri

Variabel apakah sebuah rumah tangga memasuki dunia kewirausahaan didekati dengan data dari pertanyaan survei yaitu apakah sebuah rumah tangga memiliki usaha non pertanian dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Penelitian McCulloch (2007) menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas sektor pertanian dan transformasi dari sektor pertanian ke non-pertanian berdampak pada peningkatan pendapatan. Transformasi pekerjaan menuju sektor non pertanian tersebut membutuhkan kewirausahaan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dipilih status kepemilikan usaha non pertanian sebagai pendekatan untuk keterlibatan sebuah rumah tangga dalam kewirausahaan.

Sebagai pendekatan atau proxy untuk aspek kelembagaan digunakan variabel yang

menggambarkan persepsi layanan di tingkat desa untuk pengurusan ijin usaha, ijin bangunan, layanan keuangan, pasar dan komunikasi. Aspek modal sosial didekati dengan data dari pertanyaan terkait persepsi apakah warga masyarakat di desa/kelurahan saling peduli/menjaga satu sama lain serta data dari pertanyaan terkait dengan kecurigaan terhadap warga lain. Selanjutnya digunakan variabel kontrol lain seperti status apakah rumah tangga tinggal di desa atau perkotaan, usia kepala rumah tangga, jenis kelamin rumah tangga dan tingkat pendidikan.

Penelitian ini menggunakan model regresi Logit (logistic regression) karena model variabel dependen dalam model adalah variabel kategori, dengan memberi nilai 1 untuk Rumah Tangga Memiliki Usaha dan nilai 0 untuk Rumah Tangga Tidak Memiliki Usaha. Model yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$NT_i^* = \beta_0 + \beta_1 Urban + \beta_2 Age + \beta_3 Educ + \beta_4 Sex + \beta_5 BuildLisc + \beta_6 BusinesLisc + \beta_7 FinanceServ + \beta_8 MarketAcces + \beta_9 Comm + \beta_{10} Trust1 + \beta_{11} Trust2 + \varepsilon$$

Dengan keterangan definisi tiap variable ditunjukkan dalam tabel 1.

**Tabel 1.** Variabel yang Digunakan Dalam Model Ekonometri

Variabel	Keterangan
<i>NT</i>	<i>dependent variable</i> Apakah Rumah Tangga Memiliki Usaha Non Pertanian dengan nilai: 1 untuk Ya dan 0 untuk tidak
<i>Urban</i>	<i>Dummy variable</i> apakah rumah tangga tinggal di Pedesaan atau Perkotaan dengan nilai: 1 untuk tinggal di Pedesaan dan 0 untuk tinggal di Perkotaan
<i>Age</i>	Usia Kepala Rumah tangga
<i>Educ</i>	Lama Pendidikan Kepala Rumah Tangga
<i>Sex</i>	<i>Dummy variable</i> Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga dengan nilai:



Variabel	Keterangan
	1 untuk laki-laki dan 0 untuk perempuan
<i>BuildLisc</i>	Persepsi tentang kualitas layanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan nilai: 1 = jauh dari memadai, 2 = tidak memadai, 3= memadai, 4 = sangat memadai
<i>BusinesLisc</i>	Persepsi tentang kualitas layanan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) di tingkat desa dengan nilai: 1 = jauh dari memadai, 2 = tidak memadai, 3= memadai, 4 = sangat memadai
<i>FinanceServ</i>	Persepsi tentang kualitas layanan Layanan lembaga keuangan di tingkat desa dengan nilai: 1 = jauh dari memadai, 2 = tidak memadai, 3= memadai, 4 = sangat memadai
<i>MarketAcces</i>	Persepsi tentang kualitas layanan Akses Pasar di tingkat desa dengan nilai: 1 = jauh dari memadai, 2 = tidak memadai, 3= memadai, 4 = sangat memadai
<i>Comm</i>	Persepsi tentang kualitas layanan Akses pelayanan komunikasi di tingkat desa dengan nilai: 1 = jauh dari memadai, 2 = tidak memadai, 3= memadai, 4 = sangat memadai
<i>Trust1</i>	Persepsi di tingkat desa tentang apakah warga masyarakat di desa/kelurahan saling peduli/menjaga satu sama lain dengan nilai: 1= Sangat tidak peduli, 2= tidak peduli, 3 = peduli, 4 = sangat peduli
<i>Trust2</i>	Persepsi di tingkat desa tentang seseorang harus waspada agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain dengan nilai: 1= Sangat setuju, 2= setuju, 3 = tidak setuju, 4 = sangat tidak setuju
$\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_{11}$	Paramater yang akan diestimasi

### C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil regresi, terlihat bahwa usia kepala rumah dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga berpengaruh positif terhadap kecenderungan berwirausaha. Demikian halnya rumah tangga yang dipimpin oleh laki-laki lebih cenderung memiliki usaha mandiri.

**Tabel 2.** Hasil Regresi Logit

Variabel Dependen: NT	Deskripsi	Koefisien	Std. Err.	P>z
Variabel Independen:				
<i>Urban</i>	<i>Dummy variable</i> apakah tinggal di Urban	0,385	0,066	0,000 ***
<i>Age</i>	Usia kepala rumah tangga	0,004	0,002	0,050 **
<i>Educ</i>	Lama pendidikan kepala rumah tangga	0,039	0,008	0,000 ***

<i>Sex</i>	<i>Dummy variable</i> apakah kepala rumah tangga laki-laki	0,292	0,078	0,000 ***
<i>BuildLisc</i>	Persepsi tentang kualitas layanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	-0,004	0,047	0,939
<i>BusinesLisc</i>	Persepsi tentang kualitas layanan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)	-0,030	0,055	0,584
<i>FinanceServ</i>	Persepsi tentang kualitas layanan Layanan lembaga keuangan	0,045	0,055	0,414
<i>MarketAcces</i>	Persepsi tentang kualitas layanan Akses Pasar	0,160	0,050	0,001 ***
<i>Comm</i>	Persepsi tentang kualitas layanan Akses pelayanan komunikasi	0,208	0,054	0,000 ***
<i>Trust1</i>	Persepsi bahwa warga masyarakat di desa/kelurahan saling peduli/menjaga satu sama lain	0,140	0,062	0,024 **
<i>Trust2</i>	Persepsi bahwa seseorang tidak perlu merasa akan dimanfaatkan oleh warga lain	0,035	0,051	0,496
<i>_cons</i>		- 3395153,0 00	0,400	0,000
Logistic regression		Number of obs	5219	
		LR chi2(11)	184,3300	
		Prob > chi2	0,0000	
Log likelihood = - 3395.5982		Pseudo R2	0,0264	

\* statistically significant at 10%

\*\* statistically significant at 5%

\*\*\*statistically significant at 1%

Tidak semua variabel terkait aspek kelembagaan dan modal sosial berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan berwirausaha. Akses terhadap pasar dan layanan komunikasi memiliki pengaruh yang positif terhadap kewirausahaan. Sementara itu, pelayanan perijinan bangunan dan usaha tidak signifikan berpengaruh. Hal ini dimungkinkan

karena pelaku usaha rumah tangga di Indonesia didominasi oleh usaha non formal yang belum memandang perijinan formal sebagai sebuah kebutuhan yang mendesak.

Dua variabel kepercayaan atau trust sebagai bagian dari modal sosial memiliki pengaruh yang berbeda

terhadap kewirausahaan. Dengan pendekatan variabel tentang persepsi bahwa warga masyarakat di desa/kelurahan saling peduli/menjaga satu sama lain memiliki pengaruh, modal sosial berpengaruh positif terhadap kewirausahaan. Sementara itu persepsi bahwa seseorang tidak perlu merasa akan dimanfaatkan oleh warga lain tidak berpengaruh signifikan terhadap kewirausahaan. Penelitian Doh (2011) menyatakan bahwa kepercayaan tidak selalu berpengaruh positif terhadap kewirausahaan. Penelitian tersebut menyatakan bahwa keterlibatan seseorang dalam komunitas serta norma-norma kemasyarakatan lebih banyak berpengaruh. Lebih lanjut, untuk mendorong akumulasi modal sosial, pemerintah dianjurkan untuk membuat kebijakan yang mampu menciptakan keterbukaan terhadap budaya dan keberagaman (cultural openness and diversity) di dalam komunitas atau wilayah.

Sejalan dengan temuan tersebut, Mirzantia et al (2014) berpendapat pentingnya faktor kelembagaan (institusional) dalam penumbuhan kewirausahaan. Lebih lanjut ia berpendapat bahwa aspek formal dan informal institutions memiliki keterkaitan satu sama lain dalam pengaruhnya terhadap penumbuhan usaha baru. Hal tersebut berimplikasi bahwa dalam upaya penguatan kelembagaan formal untuk mendukung kewirausahaan, tidak bisa dilepaskan dari aspek kelembagaan informal seperti budaya atau tradisi.

Berbagai kebijakan terkait dengan kewirausahaan sebenarnya telah cukup banyak dilakukan (Mirzantia et al, 2014) seperti penumbuhan inkubator bisnis, Generasi Muda Pertanian, Pelatihan Kewirausahaan, PKBM, Gerakan Kewirausahaan Nasional, Kebijakan Industri Nasional, Program PKM, Diklat Konsultan Diagnosis IKM/Shindanshi hingga penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kebijakan tersebut di level mikro masih sangat fokus pada aspek pengembangan keterampilan, pengembangan peluang dan penumbuhan motivasi.

Pemda DIY telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kewirausahaan Daerah. Dalam Perda tersebut untuk mendorong pembangunan sumber daya wirausaha dilakukan melalui Gerakan Kewirausahaan Daerah dan inkubator wirausaha. Dalam Perda tersebut juga diamanatkan untuk penyusunan Rencana Induk Kewirausahaan Daerah. Penting dalam penyusunan rencana induk tersebut untuk memperhatikan aspek-aspek seperti yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu faktor kelembagaan dan modal sosial

#### **D. Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa faktor institusional dan modal sosial berpengaruh positif terhadap kecenderungan rumah tangga untuk memasuki dunia kewirausahaan. Akses terhadap pasar serta layanan komunikasi menjadi penting bagi pelaku usaha. Program dan kegiatan perangkat daerah sebaiknya memprioritaskan pada kedua hal tersebut. Namun demikian, harus diakui bahwa penciptaan wirausaha tidak semudah dengan menyelenggarakan kegiatan pelatihan semata. Adanya aktor-aktor kunci diperlukan untuk mendorong kewirausahaan di suatu komunitas. Hasil regresi serta penelitian sebelumnya juga menunjukkan adanya hubungan positif antara modal sosial dengan kewirausahaan. Untuk menjamin agar inisiatif wirausahawan potensial tersebut menular pada warga lain, diperlukan kondisi kemasyarakatan yang saling percaya, terbuka terhadap satu sama lain serta menerima keberagaman.

Penelitian ini memiliki keterbatasan. Pendekatan untuk status apakah seseorang berwirausaha atau tidak masih sebatas didasarkan pada apakah ia memiliki usaha mandiri atau tidak. Penelitian selanjutnya dapat melibatkan kriteria yang lebih komprehensif seperti jumlah pekerja atau nilai

usaha untuk menentukan sejauh mana seseorang dapat dikatakan sebagai wirausaha.

### **Daftar Pustaka**

- Doh, S, Zolnik, E.J. (2011). *Social capital and entrepreneurship: An exploratory analysis*. African Journal of Business Management Vol. 5(12), pp. 4961-4975.
- Hasan. (2011). *Kondisi Dan Fenomena Wirausaha Di Indonesia Studi Dengan Data Sakerti 2007*. Disampaikan dalam Seminar Internasional Dan Call For Papers "Towards Excellent Small Business" Yogyakarta, 27 April 2011
- Jafarnejad, A, Abbaszadeh, MA, Ebrahimi, M, Abtahi, SM. (2013). *Analysis of barriers to entrepreneurship in Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)*. International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences Vol. 2, No. 4
- Jason Henderson. (2002). *Building the rural economy with high-growth entrepreneurs*. Economic Review, Federal Reserve Bank of Kansas City, issue Q III, pages 45-70.
- Thung, C.E. (2014). *Faktor Pra-Natal Dan Post-Natal Sebagai Determinan Profesi Wirausaha: Studi Kasus Di Indonesia*. Agora Vol. 2, No. 1,

# Visi Misi RPJMD DIY 2017-2022 dan Peta Jalan Tematik Perencanaan Pembangunan Daerah DIY: Studi Kasus

---

**Imam Karyadi Aryanto**

[imam.karyadiaryanto@gmail.com](mailto:imam.karyadiaryanto@gmail.com)

Perencana Muda, Bappeda DIY

## Abstrak

Perencanaan pembangunan daerah di Daerah Istimewa DIY pada periode 2017-2022 berupaya mengimplementasikan visi dan misi Gubernur DIY untuk Mewujudkan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja yang akan dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Implementasi visi dan misi dalam RPJMD DIY dituangkan dalam tujuan 5 tahunan dan akan diwujudkan bertahap setiap tahun dalam periode 2017-2022 yang dituangkan dalam sasaran pembangunan. Sasaran pembangunan tersebut dapat difokuskan dengan peta jalan tematik yang dapat dioperasikan pada perencanaan tahunan (RKPD) hingga akhir periode RPJMD. Paper ini disusun dengan metode studi kasus terhadap proses penyusunan Road Map Tematik Perencanaan Pembangunan DIY.

**Kata kunci:** Perencanaan Strategis, Road Map, Tematik.

## A. Pendahuluan

Sri Sultan Hamengkubuwono X menyampaikan Pidato Visi Misi Gubernur DIY 2017 pada Rapat Paripurna Istimewa tentang pemaparan visi dan misi Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) periode 2017-2022 (2 Agustus 2017) dengan memaparkan visi *Menyongsong Abad Samudera Hindia Untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja*. Visi Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai Calon Gubernur tersebut berangkat dari isu-isu publik di DIY terkait Kemiskinan, Ketimpangan antar kelompok pendapatan, Ketimpangan antar wilayah, kurang optimalnya pemanfaatan potensi kawasan selatan, dan daya dukung lingkungan serta persoalan sosial masyarakat yang mengikutinya.

Visi *Menyongsong Abad Samudera Hindia Untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja* yang tersurat maupun tersirat filosofis menggambarkan

kombinasi dari tantangan alam, kebudayaan dan harapan perkembangan sosial ekonomi DIY di sisi Selatan (3 Kabupaten; Gunungkidul, Bantul, Kulon Progo) yang berhadapan langsung dengan perairan samudera. Dua dari 3 Kabupaten DIY yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia Gunungkidul dan Kulon Progo masuk dalam kriteria typology Klassen sebagai daerah tertinggal (Yuliadi, 2013). Kawasan pesisir selatan DIY memiliki bentang garis pantai sepanjang 113 km dengan potensi sumber daya perikanan serta jasa-jasa lingkungan (wisata pantai) yang bernilai ekonomis penting yang diperkirakan mencapai Rp715,085 milyar dari 3 kabupaten tetapi tingkat eksploitasinya baru mencapai 28,04% (Dislautkan DIY, 2012 dalam Sahubawa, L.dkk., 2015; Sahubawa, L.dkk., 2015, Yuliadi, 2013: 177-178).

Daerah pesisir, terutama di daerah karst Gunungkidul, tersebut juga memiliki tantangan

fisik/ kontur (kekeringan; ancaman longsor; dll) yang menjadi kendala pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, Pantai Indrayanti atau Pantai Pulang Sawal merupakan destinasi wisata unggulan yang berada di Tepus, Gunungkidul namun masyarakat sekitarnya mengalami kekeringan dan kesulitan air bersih pada musim kemarau setiap tahunnya (Purwantara, S. dkk., 2012). Kesulitan air bersih tersebut dapat menjadi indikasi tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan pesisir tersebut.

Hasil estimasi terhadap hasil survei Indonesia Family Life Survei (IFLS5 2014 & 2015) menunjukkan bahwa rumah tangga RT yang tidak memiliki akses terhadap fasilitas air bersih memiliki tingkat pendapatan yang lebih rendah sebesar 17,17 persen dibandingkan RT yang memiliki akses air bersih serta memiliki kemungkinan menjadi RT miskin juga lebih tinggi besar 1,29 persen pada RT yang tidak memiliki akses air bersih (Putra, H.S. & . Rianto, N., 2017). Data yang tersedia, menggambarkan tiga kabupaten yang berada di pesisir Samudera Hindia, Gunungkidul, Bantul dan Kulon Progo memiliki angka kemiskinan di atas rata-rata Provinsi DIY (BPS DIY, 2017 dalam RPJMD DIY 2017-2022).

Untuk meningkatkan taraf hidup, potensi perikanan tangkap di wilayah pesisir DIY, terutama Gunungkidul, memiliki sumber daya kelautan bernilai ekonomi berupa ikan pelagis besar (tuna, cakalang, marlin, lamadang) dapat menjadi solusi. Sementara itu, perikanan tangkap di pesisir selatan di DIY didominasi nelayan pendatang (*andon*) dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan masih perlu dukungan infrastruktur pelabuhan yang memadai (Riandani, P.A. dkk., 2015). Aktivitas perikanan tangkap tersebut juga kegiatan ekonomi yang mengandung resiko dan bahaya karena kondisi alam yang tergambarkan pada aktivitas kebudayaan masyarakat setempat dalam berhubungan dengan potensi ataupun tantangan alamnya melalui tradisi lisan (*folklore*) dan mitologi yang berkembang berkait laut selatan (Santoso J. & Sudiaty, 2000). Mitologi tentang laut selatan merupakan bagian dari wawasan integral makro dan mikro-kosmologis sumbu filosofis maupun sumbu imajiner yang mempengaruhi tata ruang

Yogyakarta,<sup>1</sup> terutama inisiasi bangunan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai cikal bakal Kawasan Perkotaan Yogyakarta di era modern. Potensi, dan tantangan di kawasan pesisir selatan menjadi bagian dari latar belakang bagaimana visi politik Gubernur *Menyongsong Abad Samudera Hindia Untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja* tersebut disusun, berkesinambungan dengan filosofi *Among Tani Dagang Layar* RPJMD 2012-2017 periode sebelumnya dan mentransformasi rancangan visi Gubernur yang tersurat pada *Background Study* maupun Naskah Akademik RPJMD DIY 2017-2022 "*Jogja Tuladha Utama*."Visi tersebut akan diimplementasikan dengan 5 misi *Panca Mulia* yakni,

1. terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing,
2. terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,
3. terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan,
4. terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan
5. terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme

Visi dan Misi politik Gubernur DIY yang filosofis tersebut berhadapan dengan ekspektasi masyarakat maupun arah kebijakan perencanaan pembangunan nasional *money follow program* dan menggunakan pendekatan *Holistik-Integratif-Tematik-Spasial* (HITS) untuk dapat diterjemahkan lebih lanjut pada perencanaan pembangunan daerah yang lebih Spesifik-Terukur-Tercapai-Realistis-Terukur Waktunya (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic & Timely; SMART*) selama 5 tahun, 2017-2022. Arah kebijakan *money follow program* dan pendekatan *Holistik-Integratif-Tematik-Spasial* yang telah disosialisasikan sejak tahun 2016 dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (RKP 2016) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (PP No. 17 Tahun 2017).

Keberadaan visi misi politik Gubernur DIY, ekspektasi masyarakat dan pendekatan perencanaan Pemerintah yang akan diimplementasikan. Salah satu upaya penyusunan perencanaan yang dilakukan Pemda DIY adalah dengan memfokuskan prioritas perencanaan pembangunan melalui penyusunan program/kegiatan tematik dalam memberi arah RPJMD DIY pada periode 2017-2022. Paper ini disusun untuk mendeskripsikan proses penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan strategis Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) 2017-2022 sebagai sebuah studi kasus, terutama dalam mengelola visi politik menjadi dokumen perencanaan yang SMART. Proses tersebut membentang dari penyusunan *Background Study s/d* Penetapan Perda RPJMD DIY 2017-2022. Untuk memudahkan implementasi perencanaan tahunan maupun memberi fokus terhadap prioritas tematik, Pemda DIY dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY (BAPPEDA DIY) menyusun dokumen *Road Map Tematik*. Sebagai studi kasus, Paper ini disusun untuk mendeskripsikan proses penguatan visi misi RPJMD DIY hingga penyusunan Peta Jalan Tematik/ *Road Map Tematik* dan temuan-temuan dalam proses penyusunan.

## **B. Hasil dan Pembahasan**

### **B.1. Visi Politik dan Proses Teknokratik RPJMD DIY 2017-2022**

Daerah Istimewa memiliki bentuk dan susunan pemerintahan yang bersifat istimewa, dimana Gubernur dan Wakil Gubernur DIY –Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur- sebagai unsur penyelenggara pemerintahan bersama perangkat daerah dan sebagai wakil Pemerintah ditetapkan oleh DPRD DIY serta kemudian kedudukannya disahkan oleh Pemerintah (*lihat* UU no. 13 Tahun 2012). Penyampaian visi, misi dan program calon Gubernur merupakan bagian dari proses penetapan melalui rapat paripurna dengan agenda pemaparan visi, misi, dan program jangka menengah yang berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah DIY dan perkembangan lingkungan strategis (UU no. 13 Tahun 2012, pasal 24).

Penyiapan visi, misi, dan program yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Istimewa tentang pemaparan visi dan misi Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) periode 2017-2022 pada 2 Agustus 2017 telah disiapkan sejak penyusunan *Background Study* RPJMD DIY 2017-2022 sampai dengan ditetapkannya Perda RPJMD DIY 2017-2022 dapat disarikan sebagai berikut,



**Tabel 1.** Visi Gubernur DIY 2017-2022 : Catatan Kronologi Proses Perumusan 2016-2018

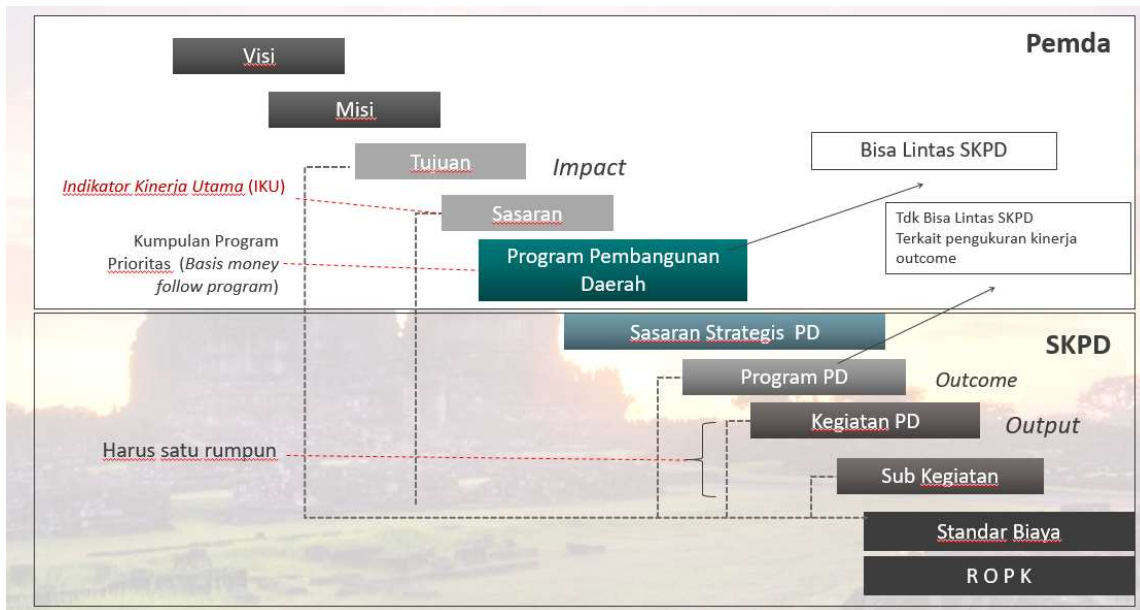
No	Visi	Misi	Dokumen
1	<i>Jogja Tuladha Utama</i>	a. Tuladha 1 : Tata Cipta-Rasa-Karsa; <i>membentuk tata cipta rasa-karsa yang memiliki prinsip Manusia ber-etos kerja tinggi dan berbudaya "kualitas"</i> b. Tuladha 2 : Tata Kehidupan Bersama; <i>mewujudkan tata perilaku yang baik yang memiliki prinsip Masyarakat memuliakan "kemuliaan manusia".</i> c. Tuladha 3 : Tata Fisik Ruang Hidup; <i>mewujudkan tata fisik ruang hidup yang memiliki prinsip Tata Ruang memuliakan "manusia", "alam" dan "sejarah"</i> d. Tuladha 4 : Tata Perilaku Individu dan Kelompok; <i>mewujudkan tata bermasyarakat (berkehidupan bersama) yang memiliki prinsip Manusia moderen "berbudi pekerti luhur"</i>	<i>Background Study RPJMD DIY 2017-2022 (2016); tidak dipublikasikan</i>
2	<i>Among Tani, Dagang Layar Noto Projo Dengan Keistimewaan Meningkatkan Kesejahteraan Melalui Pengurangan Ketimpangan, Berbasis Pendidikan, Budaya Dan Pariwisata</i>	a. Misi ke-1: <i>Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi</i> b. Misi ke-2: <i>Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dan memiliki akses yang merata terhadap pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja.</i> c. Misi ke-3: <i>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan akuntabel</i> d. Misi ke-4: <i>Pembangunan Infrastruktur dan lingkungan hidup yang mampu meningkatkan performa wilayah yang produktif, dan berkelanjutan</i>	Laporan Akhir Tenaga Ahli Penyusunan Draft Visi Misi Gubernur DIY 2017-2022 (2017); <i>tidak dipublikasikan</i>
3	<i>Menyongsong Abad Samudera Hindia Untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja</i>	Panca Mulia : a. Ke-1: <i>terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing,</i> b. Ke-2: <i>terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,</i> c. Ke-3: <i>terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan,</i> d. Ke-4: <i>terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan</i> e. Ke-5: <i>terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme</i>	Visi dan misi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DIY periode 2017-2022 pada Rapat Paripurna Istimewa 2 Agustus 2017 (2017)
4	<i>Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja</i>	a. Misi ke-1: <i>Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban</i> b. Misi ke-2: <i>Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis</i>	Perda no. 3 Tahun 2018 tentang RPJMD DIY 2017-2022 (2018)

Sumber: Background Study RPJMD DIY 2017-2022, Laporan Akhir Tenaga Ahli Visi Misi Gubernur DIY, Pidato Visi Misi Gubernur DIY, dan Perda no. 3 Tahun 2018 tentang RPJMD DIY 2017-2022

Berdasarkan catatan kronologis tersebut, Visi Misi Politik yang disampaikan Gubernur DIY dalam memiliki benang merah dengan draft yang sebelumnya disusun (*Background Study, Laporan Akhir Tenaga Ahli*) dan Perda RPJMD setelahnya, yakni terkait Kesejahteraan Sosial Ekonomi, infrastruktur dan tata kelola pemerintahan. Visi Misi Politik tersebut Gubernur DIY merespon dan ditafsir oleh stakeholder, terutama karena pilihan tema Menyongsong Abad Samudera. Para pakar menyoroti pilihan Abad Samudera yang merepresentasikan optimalisasi potensi maritim di selatan Daerah Istimewa Yogyakarta, kendala dan

bagaimana menyiasati solusinya. Respon atas visi politik tersebut beragam, diantaranya terkait penerjemahan Pemerintah Daerah DIY dalam menerjemahkan visi Abad Samudera dalam program kerja yang jelas, nyata, dan rinci, pewujudan dalam bentuk pembangunan infrastruktur di selatan DIY (Pelabuhan Tanjung Adikarto, Kawasan Industri Sentolo, Bandara New Yogyakarta International Airport; tantangan rekayasa sosial masyarakat agraris untuk beradaptasi dengan budaya pesisir yang urban-egaliter atau migrasi nilai-nilai; dan tantangan kesinambungan dengan paradigma pembangunan





Sumber : Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran. Bappeda DIY. 2018

**Gambar 1.** Arsitektur Kinerja RPJMD DIY 2017-2022 Cascade Perencanaan

RPJMD DIY Tahun 2012-2017 *dari Among Tani ke Dagang Layar* dan RPJP DIY 2005-2025, serta pentingnya aspek pembangunan sumber daya manusia dalam pencapaian visi (Sidharta, 2017; Rianto, 2017; Purwadmadi, 2017; Sidharta, 2017).

Perda RPJMD DIY mengelola visi misi politik Gubernur DIY, sebelumnya, menjadi lebih terukur kinerjanya dan berupaya memenuhi ekspektasi publik dengan proses teknokratik penyusunan matriks aliran indikator kinerja. Penyusunan Visi Misi RPJMD DIY dilengkapi dengan matriks aliran indikator kinerja (*cascading*)<sup>2</sup> yang menerjemahkan visi politik mengalir dari visi sampai dengan program dengan ukuran-ukuran yang memenuhi kaidah untuk memenuhi ekspektasi publik terhadap capaian pembangunan daerah. Hal tersebut diharapkan mengatasi resiko rendahnya kepercayaan publik terhadap visi, misi, dan program calon kepala daerah selama ini terjadi karena substansi visi misi kepala daerah normatif dan duplikatif (Liando, 2017). Visi misi Perda RPJMD DIY 2017 berupaya tidak normatif dan duplikatif dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya sejak penyusunan *Background Study*, tetapi tetap berupaya mengikuti kaidah dan terukur dengan

menyertakan rancangan *cascading* pada masing-masing tahapan penyusunan.

Keberadaan aliran indikator kinerja berupa *cascading* menjadi komponen penting dalam perumusan visi misi Gubernur. Aliran indikator kinerja merupakan itikad Pemda DIY untuk terus adaptif dengan perubahan dalam perbaikan tata kelola kelola pemerintahan dan dalam rangka mengembalikan kepercayaan publik terhadap kinerja pelayanan pemerintahan sejak Reformasi Birokrasi DIY, 1999.<sup>3</sup> Penyusunan *cascading* merupakan bagian dari sistem akuntabilitas pemda DIY sesuai arahan Pemerintah (Menpan) dan dihubungkan dengan upaya Pemda DIY berinovasi untuk meraih capaian nilai akuntabilitas kinerja pemerintah (Menpan) yang dituntut terus meningkat. Nilai Akuntabilitas bukan tujuan akhir dari upaya Reformasi Birokrasi DIY tetapi sebagai parameter bagaimana tujuan mengembalikan kepercayaan publik terhadap kinerja pelayanan pemerintahan dengan mewujudkan *good government* dan *clean government* bersama pemerintah kabupaten/ kota di DIY adalah agenda yang lebih penting (Hamengku Buwono dalam Tribun, 2017). Bagan cascading sebagaimana digambarkan dalam **Gambar 1** merupakan

arsitektur kinerja yang diterapkan pada RPJMD DIY 2017-2022 untuk menjabarkan bagaimana visi Gubernur DIY dicapai melalui pelaksanaan misi. Setiap misi memiliki tujuan yang terukur dengan target indikator tujuan, kemudian tujuan

**Tabel 2.** Cascading Misi 1 RPJMD DIY 2017-2022

Visi Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja	
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban	
Tujuan 1. Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat dengan Tatahan Sosial yang Menjamin Menjamin Kesejahteraan-Tunggal-Ika-an dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Mampu Menjaga dan Mengembangkan Budaya Yogyakarta	
Sasaran	Program Pembangunan Daerah
1.1 Meningkatnya Derajat Kualitas SDM <i>indikator:</i> 1. <i>IPM (%)</i> , 2. <i>Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</i>	Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan <i>Indikator:</i> 1. <i>Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)</i> 2. <i>Harapan Lama Sekolah</i> 3. <i>Peningkatan jumlah pemuda kader aktif</i> 4. <i>Persentase sekolah yang melakukan pendidikan berbasis dengan kategori maju</i>
	Program Peningkatan Usia Harapan Hidup <i>Indikator: Angka Harapan Hidup</i>
	Program Pembangunan Sosial Masyarakat <i>Indikator:</i> 1. <i>Jumlah Kabupaten/ Kota Layak Anak berkategori Nindya ke atas</i> 2. <i>Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif</i> 3. <i>Total Fertility Rate</i> 4. <i>Peningkatan jumlah desa/kelurahan cepat berkembang</i> 5. <i>Angka Kejahatan per 100.000 penduduk (crime rate)</i>
1.2 Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat. <i>Indikator :</i> 1. <i>Indeks GINI</i> , 2. <i>Persentase Angka Kemiskinan</i>	Program Penanggulangan Kemiskinan <i>Indikator:</i> 1. <i>Persentase peningkatan Penumbuhan wirausaha baru</i> 2. <i>jumlah penduduk miskin(jumlah penduduk miskin (pada tahun n)</i> 3. <i>Pengeluaran per kapita masyarakat</i>
1.3 Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan <i>Indikator : Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi</i>	Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda <i>Indikator</i> 1. <i>Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan</i> 2. <i>Persentase peningkatan budaya tak benda yang dilestarikan</i>
1.4 Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan <i>Indikator:</i> 1. <i>Pertumbuhan Ekonomi</i> , 2. <i>IKLH(Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)</i> 3. <i>Kesesuaian Pemanfaatan Ruang</i> 4. <i>Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan</i>	Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa) <i>Indikator:</i> 1. <i>kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY</i> 2. <i>Tingkat pengangguran terbuka (TPT)</i> 3. <i>Jumlah desa mandiri budaya (desa/kampung wisata, desa/kelurahan budaya, desa preneur, desa prima)</i>
	Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana <i>Indikator:</i> 1. <i>Indeks Kualitas Air</i> 2. <i>Indeks Kualitas Udara</i> 3. <i>Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)</i> 4. <i>Indeks Resiko Bencana</i>
	Peningkatan Keterpaduan program pemanfaatan Ruang <i>Indikator:</i> <i>persentase dukungan program pemda terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang</i>
1.5 Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah <i>Indikator: Indeks Williamson</i>	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan <i>Indikator:</i> 1. <i>Persentase Peningkatan PDRB pada Kabupaten yang belum maju (GK, KP, Bantul)</i> 2. <i>Persentase penyediaan sarana dan prasarana layanan transportasi pada sistem jaringan jalan provinsi</i>

Sumber : RPJMD DIY 2017-2022, diolah

**Tabel 3.** Cascading Misi 2 RPJMD DIY 2017-2022

Visi Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja	
Misi 2: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis	
2. Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance)	
Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi dengan nilai 73,07 (BB) dalam kategori baik (2016) menjadi Sangat Baik dengan nilai 76 (A) (2022)	
Sasaran	Program Pembangunan Daerah
2.1 Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan <i>Indikator:</i> 1. Opini BPK 2. Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP)	Program sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah <i>Indikator:</i> 1. Persentase Peningkatan PDRB pada Kabupaten yang belum maju (GK, KP, Bantul) 2. Persentase penyediaan sarana dan prasarana layanan transportasi pada sistem jaringan jalan provinsi
2.2. Meningkatnya kapasitas pengelolaan keistimewaan <i>Indikator:</i> Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan	Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah <i>Indikator:</i> 1. Kemampuan Keuangan Daerah 2. optimalisasi aset-aset pemda DIY 3. Nilai eksternal pelayanan publik 4. Nilai internal integritas organisasi 5. Nilai eksternal persepsi korupsi
2.3 Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa <i>Indikator:</i> Bidang tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan	Program Fasilitasi Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa <i>Indikator:</i> 1. Terwujudnya penetapan Kepala Daerah sesuai UU Keistimewaan. 2. Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan perdas kelembagaan

Sumber : RPJMD DIY 2017-2022, diolah

diwujudkan dalam beberapa sasaran pemerintah daerah yang terukur dengan target indikator sasaran indikator kinerja utama (IKU). Target sasaran pemerintah daerah tersebut akan dicapai dengan pelaksanaan Program Pembangunan Daerah sebagai Program Prioritas selama 5 tahun perencanaan. Program Pemerintah Daerah tersebut dapat dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah sesuai dengan sasaran perangkat Daerah yang terkait/ mendukung, dan selanjutnya sampai dengan implementasi program yang diukur dengan *outcome* dan kegiatan yang diukur dengan capaian *output*.

Sesuai dengan substansi RPJMD 2017-2022 tersebut bagan arsitektur kinerja tersebut sekurangnya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut, Matriks Cascading pada Misi 1 dan Misi 2 (**Tabel 2 dan Tabel 3**) tersebut kemudian dilanjutkan dengan matriks sasaran perangkat daerah pendukung s/d program / kegiatan perangkat daerah. Penyusunan matriks *cascading* tersebut sekurangnya dipedomani dalam hal 1) Menjaga Keselarasan substansi RPJMD DIY 2017-2022 dengan Rencana Strategis (Renstra)

Perangkat Daerah 2017-2022 ; 2) Menjaga Keselarasan substansi RPJMD DIY 2017-2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah DIY (RKPD DIY) maupun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) tahunan ; 3. Desain Perubahan Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; 4. Desain Fitur Sistem Aplikasi Pendukung Perencanaan/ *e-planning* Pemerintah Daerah DIY Jogjaplan (<http://jogjaplan.com>). Berkenaan dengan desain perubahan kelembagaan, *cascading* RPJMD DIY 2017-2022 mempengaruhi bentuk kelembagaan Pemerintah Daerah DIY yang menaati ketentuan UU no. 23 tahun 2014, memenuhi kewenangan Keistimewaan DIY sesuai UU no.13 Tahun 2013 sekaligus memenuhi kebutuhan organisasi Pemerintah Daerah yang memenuhi kaidah *vision driven organization*, dan arahan Pemerintah tentang *money follow program*. Perubahan Kelembagaan tersebut kemudian diatur dengan Peraturan Daerah Istimewa yang memungkinkan penyesuaian organisasi perangkat daerah agar menunjang sasaran Pemerintah Daerah dan memiliki kapasitas untuk bersinergi melaksanakan Program Pembangunan Daerah. Perubahan kelembagaan tersebut dilakukan dengan

*rightsizing* sesuai kebutuhan RPJMD DIY 2017-2022 berupa penggabungan/pemisahan, penyesuaian urusan, maupun pembentukan lembaga baru sesuai kebutuhan.

Bagi aplikasi Sistem Aplikasi Pendukung Perencanaan/ *e-planning* Pemerintah Daerah DIY Jogjaplan (<http://jogjaplan.com>), *cascading* indikator RPJMD DIY 2017-2022 menjadi kunci penting referensi program/ kegiatan dalam penyusunan RKPDIY dan KUA/PPAS. Penerapan *cascading* RPJMD DIY 2017-2022 dalam Jogjaplan mengarahkan perangkat daerah agar disiplin dengan sasaran-bidang urusan, disiplin dengan pagu indikatif, fokus pada masing-masing program/kegiatan yang disusun/ tidak *overlapping*, dan mengendalikan jumlah maupun nomenklatur program/kegiatan yang ada di RPJMD DIY dan Renstra Perangkat Daerah.

## **B.2. Penyusunan Road Map Tematik RPJMD DIY 2017-2022**

Untuk memetakan capaian sasaran pembangunan dari Visi-Misi Gubernur DIY dalam RPJMD DIY 2017-2022 yang telah dimatrikskan dalam *cascading* perlu disusun peta jalan/ road map perencanaan pembangunan daerah DIY 5 tahun ke depan dengan memperhatikan regulasi, kajian, dan pendekatan perencanaan pembangunan terkini. Penyusunan road map tersebut memperhatikan regulasi perencanaan pembangunan sekurangnya UU 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, PP 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional dan Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RRPJPD, RPJMD dan RKPDIY.

Roadmap Tematik tersebut juga memperhatikan kajian perencanaan pembangunan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah DIY.<sup>4</sup> Perspektif perencanaan pembangunan yang mengemuka dan diinisiasi Kementerian PPN/ Bappenas saat ini ialah pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sasaran agenda. Untuk memperkuat pendekatan

tersebut, kebijakan anggaran belanja pemerintah saat ini ialah *money follow program* bukan *money follow function*, sehingga kebijakan penganggaran berbasis pada program prioritas nasional/ daerah.

Pendekatan holistik-tematik pada penyusunan perencanaan pembangunan di DIY telah diterapkan sekurangnya 5 tahun terakhir untuk merespon arahan nasional, mengimplementasikan sasaran strategis RPJMD DIY dan mengimplementasikan tema pembangunan tahunan yang ada di RKPDIY. Tematik pembangunan yang menjadi *mainstream* sejak tahun perencanaan 2017 pada penyusunan RKPDIY 2018 ialah tematik Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan, Penurunan Ketimpangan Wilayah, Dukungan Pembangunan *New Yogyakarta Internasional Airport* dan Pembiayaan Pembangunan. Pemilihan 4 tematik tersebut berangkat dari Arahan Gubernur DIY kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah untuk merespon tantangan dalam pembangunan di DIY saat ini sebagaimana kemudian tersurat dalam tema RKPDIY 2018 "*Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Infrastruktur untuk Menopang Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Wilayah yang Berkeadilan*" sebagai tahun pertama perencanaan dalam RPJMD DIY 2017-2022. Kebijakan Tematik dalam Arahan Gubernur DIY tersebut menjadi prioritas yang dipilih oleh Pemerintah Daerah DIY untuk mengarahkan prioritas tahunan RPJMD DIY 2017-2022. Empat tematik tersebut membutuhkan studi lebih lanjut untuk memperkuat basis kerangka berpikir. Studi Penyusunan Road Map Tematik Perencanaan Pembangunan Daerah DIY menggunakan pendekatan triangulasi yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, serta menganalisis data sekunder yang tersedia. Langkah-langkah yang digunakan dalam penyusunan Road Map ini antara lain 1) Melakukan identifikasi kondisi umum; 2) Melakukan Identifikasi kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*); 3) Inventarisasi permasalahan; 4) Penetapan *Quick Wins*, fokus perubahan dan penetapan tujuan dan sasaran; 5) Penetapan kegiatan; 6) Penyusunan Rencana aksi; 7) Penyusunan Dokumen Road Map (Kementerian PAN dan RB, 2013).

Berkenaan dengan substansi, tematik Kemiskinan diangkat sebagai agenda pembangunan RPJMD DIY 2017-2022 berangkat dari angka kemiskinan DIY yang berada di atas rata-rata nasional dan sebaran masalah kemiskinan terutama pada kawasan selatan yang tersebar pada 15 kecamatan miskin di Kabupaten Gunungkidul, Bantul, dan Kulon Progo. Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata provinsi namun pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi DIY (*lowgrowth, pro-poor*). Tantangan yang harus dihadapi pemerintah daerah adalah menjaga efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang. Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta merupakan kota dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi diatas rata-rata provinsi dan pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (*high-growth, less pro-poor*). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah tersebut belum memberikan dampak penurunan angka kemiskinan secara nyata. Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mendorong pengembangan kegiatan ekonomi di sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu diperlukan juga program dan kebijakan dalam hal penanggulangan kemiskinan. Kulonprogo yang rata-rata pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata provinsi dan tingkat pengurangan kemiskinannya juga di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-poor*). Sampai dengan kondisi September 2016, persentase penduduk miskin di pedesaan masih jauh lebih tinggi dibanding dengan di perkotaan. Namun dilihat tren laju penurunan persentase penduduk miskin di pedesaan jauh lebih cepat. Ini dapat menjadi indikasi bahwa implementasi program pengentasan kemiskinan berhasil memacu pengurangan kemiskinan terutama di pedesaan.

Adapun terkait tematik Ketimpangan Wilayah, memiliki basis pemikiran bahwa tingkat kesenjangan ekonomi antarwilayah DIY tahun 2012-2016 dilihat dari Tipologi Klassen menunjukkan bahwa kesenjangan antarwilayah di DIY masih besar terlihat dari masuknya Kabupaten

Sleman dan Kota Yogyakarta sebagai daerah maju dan cepat tumbuh, sementara Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo sebagai daerah tertinggal, dan Kabupaten Bantul sebagai daerah berkembang cepat. Ini diperkuat dengan hasil persebaran kabupaten/kota di DIY menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan tahun 2012 hingga 2015 yang menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul masuk kategori *low growth - pro poor* (kuadran II), Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman masuk kategori *high growth - less pro poor* (kuadran IV), sementara Kabupaten Kulon Progo masuk kategori *low growth - less pro poor* (kuadran I). Kondisi tersebut DIY juga dapat dianalisis dengan analisis *Shift Share* yang berguna untuk mengkaji pergeseran serta peran perekonomian di suatu daerah untuk mengetahui ketimpangan sektoral. Analisis tersebut memberi simpulan Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul masuk kelompok daerah yang sedang berkembang. Kota Yogyakarta menempati daerah yang cenderung berpotensi dan Kabupaten Kulon Progo masih merupakan daerah yang mempunyai daya saing lemah (kuadran IV).

Masalah ketimpangan ekonomi antardaerah merupakan masalah yang cukup sulit diatasi karena merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri. Ketimpangan distribusi pendapatan di DIY masih tinggi terlihat dari 80 persen penduduk berpendapatan menengah ke bawah yang hanya memperoleh 51 persen dari total distribusi pendapatan dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi memperoleh 49 persen dari total distribusi pendapatan. Terkait dengan permasalahan tersebut perlu dirumuskan program pembangunan yang mampu menggerakkan skala ekonomi di Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulon Progo untuk mengurangi jurang ketimpangan ekonomi dengan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Dalam menjawab Adapun rekomendasi solusi berkenaan dengan ketimpangan wilayah antara lain: 1) memperluas sektor penggerak pertumbuhan dan area pembangunan mengarah ke wilayah yang relatif tertinggal, prioritas utamanya Kabupaten



Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul; 2) Membuat kebijakan yang mendorong laju pertumbuhan kesempatan kerja, terutama di sektor-sektor pertanian, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa keuangan, *real estate*, dan jasa perusahaan; 3) Meningkatkan kebutuhan investasi di kabupaten/kota secara proporsional dengan memperhitungkan potensi yang dimiliki tiap daerah; 4) Perlu adanya data Incremental Capital Output Ratio (ICOR) per kabupaten/kota di DIY agar kebijakan pemerintah daerah terkait dengan kebutuhan dan efektifitas investasi.

Tematik ketiga, Dukungan Pembangunan New Yogyakarta Internasional Airport memiliki keterkaitan dengan visi 2025 D.I Yogyakarta (RPJPD DIY 2020-2025) untuk mewujudkan DIY sebagai pusat pendidikan, budaya dan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara. Visi tersebut memerlukan dukungan infrastruktur berupa sistem dan jaringan transportasi yang salah satunya dengan pembangunan kawasan bandar udara baru yang terintegrasi dengan angkutan bus dan kereta api. Oleh karena itu berdasarkan SK Gubernur DIY No.163/KEP/2017 tentang Program Prioritas Pembangunan, pembangunan dan pengembangan kawasan bandara baru Kulon Progo masuk dalam daftar kegiatan prioritas sekaligus masuk dalam program prioritas infrastruktur. Pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport merupakan salah satu landasan pembangunan ekonomi yang memiliki ekspektasi yang cukup besar karena akan memberikan multiplier effect peningkatan skala aktivitas berbagai bidang ekonomi. Salah satu faktor mendukung terwujudnya pembangunan NYIA adalah pengembangan investasi baik investasi swasta, investasi pemerintah maupun kerjasama kedua pihak (Analisis PDRB 2012-2016). Kebutuhan program/kegiatan terkait pembangunan dan pengembangan kawasan bandara baru Kulon Progo dalam tahun perencanaan RPJMD DIY 2017-2022 antara lain: 1) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); 2) Rencana Induk Kawasan (keseluruhan, termasuk Rencana Induk Pembangunan Manusia-nya) 3) Business Plan Sub Kawasan; 4) Kajian Kemungkinan Pendanaan 5) Kesiapan Pengelola Sub Kawasan 6) Kerjasama dengan Badan Usaha atau pihak lain; 6)

Implementasi oleh pemerintah 7) Monitoring dan evaluasi.

Program tematik dukungan pembangunan NYIA lebih difokuskan dalam penguatan kapasitas, penyediaan fasilitas, peningkatan aktivitas dan konektivitas. Pembangunan NYIA tentu memerlukan berbagai komponen pendukung diantaranya adalah penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan bertaraf internasional internasional, pengembangan investasi, penyediaan infrastruktur pendukung, pengembangan destinasi wisata skala nasional dan internasional, peningkatan kelembagaan pengelola wisata/desa, pengembangan pertanian berkelanjutan, pengembangan budaya/atraksi seni dan budaya, dan pengembangan sistem transportasi massal. Selain itu, indikasi kegiatan yang akan dijalankan untuk mendukung pembangunan NYIA meliputi pembangunan RSUD Wates dengan standar internasional, kemudahan layanan perijinan investasi, *teaching industry dan teaching factory* (peningkatan kapasitas dan penempatan SDM), penguatan kapasitas sosial masyarakat terutama untuk warga terdampak relokasi, pengembangan pusat pertumbuhan baru (RDTR, Master Plan, Infrastruktur, RTH) dan pengembangan paket wisata.

Berkaitan dengan pembiayaan pembangunan bandara NYIA melalui investasi, investasi merupakan salah satu faktor yang paling penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi serta pembangunan infrastruktur. Investasi dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri, swasta atau kerjasama pemerintah dan swasta (PPP) yang salah satunya dapat diterapkan dalam pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA).

Tematik keempat, Pembiayaan Pembangunan dikemukakan dalam rangka upaya percepatan pembangunan di D.I Yogyakarta terutama dalam keterbatasan anggaran. Kendala keterbatasan anggaran dapat diatasi dengan solusi penggunaan *non government budget*. Siasat tersebut memperhatikan beberapa faktor yakni 1) ketersediaan jumlah total anggaran untuk perencanaan; memperhatikan kebutuhan gaji



pegawai, administrasi SKPD (01-06), 2) penganggaran terhadap kegiatan layanan dan kegiatan wajib mengikat; dan 3) memperhatikan kegiatan yang mendukung Tematik Pembangunan DIY 2018; serta 4) memperhatikan kegiatan reguler yang akan dilaksanakan oleh SKPD yang melibatkan Dana Dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Keistimewaan dan APBD Murni.

Berkenaan dengan program tematik pembiayaan pembangunan, terdapat 2 hal penting yang perlu diperhatikan optimalisasi pendapatan dan alternatif pembiayaan pembangunan. Optimalisasi pendapatan terdiri dari optimalisasi aset dan optimalisasi aktivitas, pokok-pokok dari optimalisasi aset meliputi Mess Jakarta, Anjungan TMII, Gedung eks PMD di Ngoto, pemanfaatan Mandala Krida, pengelolaan Klinik Estetika di RS Ghrasia, pengelolaan Sport Center Kenari, pengelolaan Youth Center, pengelolaan Among Rogo dan pengelolaan Mess Kaliurang. Sementara itu untuk optimalisasi aktivitas meliputi layanan jasa pengelolaan sampah, penjualan air curah SPAM Kartamantul, layanan jasa pengelolaan air limbah dan layanan jasa pengujian.

Alternatif pembiayaan pembangunan terdiri dari kerjasama pihak ke-3 dan kontrak tahun jamak. Pokok-pokok dalam kerjasama pihak ke-3 meliputi pemanfaatan Mandala Krida, pembangunan rest area, pengelolaan toilet under ground, pengelolaan klinik estetika, pengembangan *Smart City*, pengelolaan *Sport Center Kenari*, pengelolaan *Youth Center*, pengelolaan Among Rogo, pengelolaan Mess Kaliurang, pembangunan dan pengelolaan Park and Ride serta pembangunan dan pengelolaan lahan eks-STIEKer. Kemudian untuk kontrak tahun jamak meliputi pembangunan rest area, pembangunan *park and ride*, dan pembangunan lahan eks-STIEKer. Proyek-proyek strategis Pemerintah Daerah DIY yang diproyeksikan memiliki prospek untuk implementasi tematik pembiayaan pembangunan antara lain: 1) Jogja Agro Techno Park (pengembangan kawasan terpadu pertanian seluas 18,8 hektar, perkiraan nilai investasi dalam 5 Tahun Rp. 250.790.316.501) 2) Taman Agro Ngipiksari (pengembangan agrowisata kawasan Ngipiksari, Hargobinangun, Pakem, Kabupaten Sleman seluas lebih dari 8 hektar); 3)

Penandaan Keistimewaan DIY di Kawasan Pariwisata Parangtritis (ditujukan untuk mendukung konektivitas terhadap JJLS melalui pembangunan akses penghubung); 4) Penataan Transportasi Kawasan Malioboro (bertujuan untuk membuat seluruh ruang jalan koridor Malioboro-Margomulyo berfungsi sebagai pedestrian untuk pejalan kaki) 5) Pengembangan Pengelolaan TPA Piyungan; 6) *Transit Oriented Development* (TOD) eks Lahan STIE-Kerjasama (untuk membangun kawasan seni pertunjukan kelas internasional serta membantu mengurai kemacetan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta); 7) Pengembangan Sport Centre Kenari.

Selain memperkuat basis kerangka berpikir tematik yang diarahkan Gubernur, Penyusunan Road Map Tematik RPJMD DIY 2017-2022 menghasilkan rancangan indikasi tema RKPD dari tahun 2018-2022 yang dapat diilustrasikan pada **Gambar 2**

			<b>Tema/Fokus Tahun V (2022)</b> Internalisasi nilai-nilai budaya dalam masyarakat yang bermartabat	Kata Kunci : <i>Mengembangkan (inovasi)SDM Unggul dan Infrastruktur untuk Pengurangan Ketimpangan Wilayah dan Kemiskinan</i>
		<b>Tema/Fokus Tahun IV (2021)</b> Peningkatan kualitas SDM berbasis keistimewaan	Kata Kunci: <i>Mendayagunakan dan Memperkuat SDM Unggul (pendidikan, kesehatan,kebudayaan, ekonomi) dan Infrastruktur</i>	
	<b>Tema/Fokus Tahun III (2020)</b> Infrastruktur (Titik Pertumbuhan) untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan wilayah	Kata Kunci: <i>Mendayagunakan dan Memantapkan SDM Unggul (pendidikan, kesehatan,kebudayaan, ekonomi) dan Infrastruktur (bandara NYIA beroperasi)</i>		
	<b>Tema/Fokus Tahun II (2019)</b> Infrastruktur (Aksesibilitas antar wilayah) untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah	Tema RKPD 2019: Pemerataan Pembangunan untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan	Kata Kunci: <i>Menguatkan SDM dan Infrastruktur (JATP, Tanjung Adikarto, Sampah &amp; Limbah B3 Regional,RSUD Wates) untuk mengurangi Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah</i>	
<b>Tema/Fokus Tahun I (2018)</b> Menanggulangi kemiskinan dengan peningkatan pelayanan publik dan penguatan kelembagaan	Tema RKPD 2018 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Infrastruktur untuk Menopang Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Wilayah yang Berkeadilan	Kata Kunci: <i>Memantapkan Pondasi SDM dan Infrastruktur Dasar (RTLH, Sanitasi, Jalan, Air, Elektrifikasi) untuk Menanggulangi Kemiskinan serta Mendukung Pertumbuhan Ekonomi</i>		

**Gambar 2.** Tema Pembangunan DIY 2018-2022

Sumber: Road Map Tematik Perencanaan Pembangunan Daerah DIY, 2018

Penyusunan Road Map Tematik RPJMD DIY 2017-2022 menghasilkan rancangan indikasi tema pembangunan RKPD dari tahun 2018-2022 (**Gambar 2**). Dengan tabel indikasi tema tersebut Pemerintah Daerah DIY telah memiliki bank tema untuk 5 tahun s/d tahun 2022. Dalam rangka menyelaraskan tema dengan target sasaran prioritas 4 tematik, Road Map Tematik Perencanaan Pembangunan Daerah menjabarkan strategi RPJMD, sasaran RPJMD ke dalam alternatif strategi tahunan

yang mempengaruhi kriteria program/kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memudahkan perencanaan tahunan RKPD dengan hasil penyandingan dalam 5 tahun sebagai berikut dalam **Tabel 4** (diolah penulis),

**Tabel 4.** Hasil Penyandingan Cascading RPJMD, Tematik dan Kriteria Program.

No.	Misi	Tematik	Sasaran/ <i>Indikator Sasaran</i>	Program Pembangunan Daerah
1.	Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban	Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	
			<i>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</i> <i>Target : 80,29 (2018) s/d 81,68 (2022)</i>	a. Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan b. Program Peningkatan Usia Harapan Hidup
			<i>Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</i> <i>Target: 69,91 (2018) s/d 70,32 (2022)</i>	Program Pembangunan Sosial Masyarakat
			Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat	
			a. <i>Indeks Gini</i> <i>Target: 0,3917 (2018) s/d 0,3635 (2022)</i> b. <i>Persentase Angka Kemiskinan; Target : 11,23 (2018) s/d 7 (2022)</i>	Program Penanggulangan Kemiskinan
			Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	
			<i>Pertumbuhan Ekonomi</i> <i>Target: 5,24 (2018) s/d 5,34 (2022)</i>	Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa)
			Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	
2.		Ketimpangan Wilayah,	<i>Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang diapresiasi</i> <i>Target: 11,46 (2018) s/d 7 (2022)</i>	Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda
			Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah	
			<i>Indeks Williamson</i> <i>Target: 0,4559 (2018) s/d 0,4489 (2022)</i>	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan
			Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	
			a. <i>Pertumbuhan Ekonomi</i> <i>Target: 5,24 (2018) s/d 5,34 (2022)</i> b. <i>Kesesuaian Pemanfaatan Ruang</i> <i>Target: 76,5 (2018) s/d 82,5 (2022)</i> c. <i>IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)</i> <i>Target: 58,58 (2018) s/d 66,15 (2022)</i>	a. Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa) b. Program Peningkatan Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang c. Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana
			Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat	
			a. <i>Indeks Gini</i> <i>Target: 0,3917 (2018) s/d 0,3635 (2022)</i> b. <i>Persentase Angka Kemiskinan Target : 11,23 (2018) s/d 7 (2022)</i>	Program Penanggulangan Kemiskinan
			Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	

No.	Misi	Tematik	Sasaran/ Indikator Sasaran	Program Pembangunan Daerah
3.		Dukungan Pembangunan New Yogyakarta Internasional Airport	<i>Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang diapresiasi</i> Target: 11,46 (2018) s/d 7 (2022)	Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda
			Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah	
			<i>Indeks Williamson</i> Target: 0,4559 (2018) s/d 0,4489 (2022)	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan
			Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	
			a. <i>Pertumbuhan Ekonomi</i> Target: 5,24 (2018) s/d 5,34 (2022)	a. Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa)
			b. <i>Kesesuaian Pemanfaatan Ruang</i> Target: 76,5 (2018) s/d 82,5 (2022)	b. Program Peningkatan Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang
			c. <i>IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)</i> Target: 58,58 (2018) s/d 66,15 (2022)	c. Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana
			Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat	
			a. <i>Indeks Gini</i> Target: 0,3917 (2018) s/d 0,3635 (2022)	Program Penanggulangan Kemiskinan
			b. <i>Persentase Angka Kemiskinan Target :</i> 11,23 (2018) s/d 7 (2022)	
4.		Pembiayaan Pembangunan.	Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah	
			<i>Indeks Williamson</i> Target: 0,4559 (2018) s/d 0,4489 (2022)	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan
			Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	
			Pertumbuhan Ekonomi Target: 5,24 (2018) s/d 5,34 (2022)	Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa)
			Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	
			<i>Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang diapresiasi</i> Target: 11,46 (2018) s/d 7 (2022)	Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda
			Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	
			a. <i>Opini BPK</i> Target: WTP (2018 s/d 2022) b. <i>Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP)</i> Target: A (2018 s/d 2022)	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	Misi 2. Mewujudkan Tata Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis			

### **B.3. Tantangan Implementasi Road Map Tematik RPJMD DIY 2017-2022**

Tantangan terhadap implementasi tersebut antara lain 1) Peta Jalan belum diatur/ diundangkan dalam Dokumen Kebijakan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah 2) Dinamika proses teknokratik di Pemerintah Daerah DIY terutama dalam tim anggaran pemerintah daerah serta proses politik dalam perencanaan 3) Respon Akademisi dalam Perencanaan. Dokumen Road Map Tematik RPJMD DIY 2017-2022 yang belum diatur lebih lanjut sebagai produk kebijakan belum dapat diimplementasikan sepenuhnya sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan. Namun demikian sebagai dokumen ini dapat menjadi kertas kerja untuk memudahkan penyusunan RKPDIY sekurangnya untuk tahun perencanaan tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022.

Dinamika proses teknokratik penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah DIY dalam tim anggaran pemerintah daerah serta proses politik (berupa arahan Gubernur dan partisipasi legislatif melalui pokok-pokok pikiran) sewaktu pada tahun penyusunan perencanaan mendesak untuk membuat rancangan Road Map Tematik untuk lentur terhadap perubahan. Dengan demikian, desain 4 tematik dapat menjadi indikasi rancangan awal tetapi tidak menjamin akan dilaksanakan seluruhnya. Desain Road Map Tematik tersebut juga terbuka untuk dievaluasi oleh para Akademisi yang dilibatkan dalam proses perencanaan Pemerintah Daerah DIY. Karena, keterlibatan Akademisi tersebut mendorong Pemerintah Daerah DIY untuk membuka diri dan melibatkan para cendekia/ sarjana dari universitas dalam penyusunan dokumen perencanaan baik kebijakan makro, kebijakan program sampai pada level kegiatan.

### **C. Catatan Penutup**

Peta Jalan Tematik Perencanaan Pembangunan Daerah DIY sebagai sebuah kajian kebijakan perencanaan strategis dapat menjadi alat untuk

membantu memfokuskan prioritas daerah. Sebagai alat, peta jalan tersebut memiliki tantangan untuk diimplementasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan. Kajian tentang peta jalan perencanaan pembangunan daerah ini masih memerlukan pengembangan dan pendalaman karena keterbatasannya. Diharapkan, terdapat cendekia/ sarjana/ perencana yang memiliki minat untuk meneliti dan mengevaluasi lebih lanjut terkait tema-tema serupa dengan makalah ini.

### **Ucapan Terimakasih**

Kepada Bapak Kepala Bappeda DIY, Ibu Kepala Bidang Perencanaan dan Segenap Tim Penyusunan Road Map Tematik Perencanaan Pembangunan beserta tim ahli (yth. Bapak Nurhadi Susanto, Ph.D. Bapak Retno Widodo Dwi Pramono, Ph.D., Bapak Amirullah Setya Hardi, Ph.D., Ibu Dr. Bevaola Kusumasari, Ph.D.) yang memberikan peluang kepada penulis mempresentasikan draft awal makalah ini dalam Konferensi Nasional, Temu Jabatan Fungsional Perencana dan Temu Alumni Pusbindiklatren Tahun 2018 dan draft akhir pada Jurnal Perencanaan volume ini.

### **Daftar Pustaka**

- \_\_\_\_\_. (2013). *Langkah-langkah Penyusunan Road Map Pemda*. Jakarta: Kementerian PAN dan RB.
- \_\_\_\_\_. (2016). *Analisis IPM 2015*. Yogyakarta: BAPPEDA DIY-BSD DIY.
- \_\_\_\_\_. (2016). *Analisis Pertumbuhan Inklusif 2011-2015*. Yogyakarta: BAPPEDA DIY-BSD DIY
- \_\_\_\_\_. (2016). *Background Study RPJMD DIY 2017-2022*. Yogyakarta: BAPPEDA DIY.
- \_\_\_\_\_. (2017). *Analisis ICOR Sektoral DIY 2012-2016*. Yogyakarta: BAPPEDA DIY-BSD DIY
- \_\_\_\_\_. (2017). *Analisis Makro Ekonomi 2017*. Yogyakarta: BAPPEDA DIY-BSD DIY.
- \_\_\_\_\_. (2017). *Analisis PDRB 2012 – 2016*. Yogyakarta: BAPPEDA DIY-BSD DIY.

- \_\_\_\_\_. (2017). *Naskah Akademik RPJMD DIY 2017-2022*. Yogyakarta: BAPPEDA DIY
- \_\_\_\_\_. (2017). Rancangan Teknokratik Perumusan Visi Misi Gubernur DIY 2017-2022. Yogyakarta: BAPPEDA DIY.
- Baskoro, H. (2017). *Abad Samudera Hindia*. Artikel. Diakses dari [http://krjogja.com/web/news/read/51423/Abad\\_Samudera\\_Hindia](http://krjogja.com/web/news/read/51423/Abad_Samudera_Hindia)
- Hamengkubuwono X. (2017). *Visi dan Misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 – 2022*. Pemaparan Pidato. Yogyakarta: Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
- Purwantara, S dkk. (2012). *Studi Air Permukaan Di Wilayah Topografi Karst Gunungkidul*. Laporan Penelitian. Tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial, UNY.
- Purwadmadi. (2017). *Migrasi Nilai Songsong Abad Samudera Hindia*. Artikel. Diakses dari [http://krjogja.com/web/news/read/58854/Migrasi\\_Nilai\\_Songsong\\_Abad\\_Samudera\\_Hindia](http://krjogja.com/web/news/read/58854/Migrasi_Nilai_Songsong_Abad_Samudera_Hindia)
- Putra, H.S. & Rianto, N. (2017). *Pengaruh Akses Air Bersih Terhadap Kemiskinan Di Indonesia: Pengujian Data Rumahtangga*. Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum, Vol 9, No 1. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Riandani, P.A. dkk., (2015). *Tingkat Pemanfaatan Dan Optimalisasi Fasilitas Dasar Dan Fungsional Di Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng Gunungkidul Dalam Menunjang Pengembangan Perikanan Tangkap*. Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology, Volume 4, Nomor 3, Tahun 2015, Hlm 10-20. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sahubawa, L.dkk., (2015). *Kajian Sebaran Potensi Ekonomi Sumber Daya Kelautan Di Pantai Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Upaya Percepatan Investasi*. Jurnal Tekno Sains, Vol 4, No. 2, Juni 2015; 101-120. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana, UGM.
- Rianto, S. (2017). *Tantangan Membangun Selatan*. Artikel. Diakses dari [http://krjogja.com/web/news/read/48189/Tantangan\\_Membangun\\_Selatan](http://krjogja.com/web/news/read/48189/Tantangan_Membangun_Selatan)
- Sidharta, B.R. (2017). *Abad Samudera Hindia : Membangun DIY Bermartabat* . Artikel. Diakses dari [http://krjogja.com/web/news/read/40421/Abad\\_Samudera\\_Hindia\\_Membangun\\_Diy\\_Bermartabat](http://krjogja.com/web/news/read/40421/Abad_Samudera_Hindia_Membangun_Diy_Bermartabat)
- Sidharta, B.R. (2017). *Tantangan Mewujudkan Pancamulia DIY*. Artikel. Diakses dari [http://krjogja.com/web/news/read/48328/Tantangan\\_Mewujudkan\\_Pancamulia\\_Diy](http://krjogja.com/web/news/read/48328/Tantangan_Mewujudkan_Pancamulia_Diy)
- Tim BAPPEDA DIY. (2018). *Road Map Tematik Perencanaan Pembangunan Daerah DIY*. Yogyakarta: Bappeda DIY
- Tribunjogja.com. Kamis, 28 September 2017. *Gubernur DIY: Capaian Nilai Akuntabilitas Bukan Tujuan Akhir*. Diakses melalui <http://jogja.tribunnews.com/2017/09/28/gubernur-diy-capaian-nilai-akuntabilitas-bukan-tujuan-akhir>.
- UGM. 1 Maret 2016. *Kerja Sama UGM-PEMDA-KADIN Percepat Pembangunan Ekonomi DIY*. Diakses melalui <https://ugm.ac.id/id/berita/11292-kerja.sama.ugm-pemda-kadin.percepat.pembangunan.ekonomi.diy>
- Wardani, L.K. (2009). *Planologi Keraton Yogyakarta*. Paper dalam Prosiding Seminar Internasional Archeology and Identity. ISBN 978-602-9374-36-0. Hal. 143-161. Yogyakarta: Departemen Arkeologi, Universitas Gadjah Mada.
- Wibawa, S. (2017). *Abad Samudera Hindia*. Artikel. Diakses dari [http://krjogja.com/web/news/read/40418/Abad\\_Samudera\\_Hindia](http://krjogja.com/web/news/read/40418/Abad_Samudera_Hindia)
- Yuliadi, I. (2013). *Pembangunan Masyarakat Pesisir Selatan: Masalah dan Tantangannya/ South Coastal Community Development: Issues and Challenges*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Volume 14, Nomor 2, Desember 2013, hlm. 172-179. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta



### Catatan Akhir

<sup>1</sup> Kawasan Keraton yang membentang lebih dari 5 km itu merupakan kesatuan kosmologis *AUM* (*Agni*/Gunung Merapi, *Udaka*/Laut Selatan, dan *Maruta*/Udara bebas atau segar, di atas Sitihiinggil, yaitu tanah ditinggikan sebagai pengejawantahan akan harkat manusia, yang atas perkenan Tuhan Yang Maha Esa, ditinggikan sebagai Khalifatullah Maruta/Udara bebas atau segar. Selengkapnya dapat melihat Khairuddin, 1995 dalam Wardani, L.K. (2009). *Planologi Keraton Yogyakarta. Paper dalam Prosiding Seminar Internasional Archeology and Identity*. ISBN 978-602-9374-36-0. Hal. 143-161. Yogyakarta: Departemen Arkeologi, Universitas Gadjah Mada.

<sup>2</sup> Implementasi *cascading* adalah bagian dari arahan kebijakan Gubernur dalam Reformasi Terpadu Pelayanan Publik pada tahun 2006 sebagai kertas kerja yang penting. Sekira 10 tahun kemudian matrik *cascading* diwujudkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan pembangunan strategis DIY berupa perubahan RPJMD DIY 2017-2022 pada tahun 2014/2015. Arahan tersebut selengkapnya dapat dilihat pada Purbokusumo, dkk., (2006). *Reformasi Terpadu Pelayanan Publik (Integrated Civil Service Reform) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia.

<sup>3</sup> Setahun setelah Reformasi 1998, pada masa awal Sri Sultan Hamengkubuwono X memimpin Pemda DIY untuk mulai melakukan Reformasi Birokrasi (Mei, 1999). Reformasi birokrasi tersebut dilaksanakan untuk merubah kondisi pelayanan publik DIY yang menghadapi kendala penganggaran (yang belum *value for money*), aspek SDM yang belum sebanding dengan kompetensi-beban kerja (*over-bureaucratic*), aspek regulasi tata laksana yang *overlapping*, dan aspek budaya birokrasi termasuk visi-misi yang belum mengarahkan aparatur sebagai abdi masyarakat. Reformasi birokrasi bagi Pemda DIY merupakan sebuah kebutuhan untuk memperbaiki pelayanan publik secara berkesinambungan. Selengkapnya pada Purbokusumo, dkk., (2006). *Reformasi Terpadu Pelayanan Publik (Integrated Civil Service Reform) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa*

*Yogyakarta*. Yogyakarta: Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia, h. vii-ix.

<sup>4</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda DIY) menyusun Background Study RPJMD DIY 2017-2022, Rancangan Teknokratik Perumusan Visi Misi Gubernur DIY 2017-2022, dan Naskah Akademik RPJMD DIY 2017-2022

<sup>5</sup> Sejak tahun 2016, Pemerintah Daerah DIY bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DIY menjalin kerjasama *triple helix* dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan implementasi ilmu pengetahuan / riset dalam pembangunan daerah.

<https://ugm.ac.id/id/berita/11292->

[kerja.sama.ugm-pemda-](https://ugm.ac.id/id/berita/11292-kerja.sama.ugm-pemda-)

[kadin.percepat.pembangunan.ekonomi.diy](https://ugm.ac.id/id/berita/11292-kerja.sama.ugm-pemda-kadin.percepat.pembangunan.ekonomi.diy)

# Pariwisata: Strategi untuk Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan di DIY

---

**Pangky Arbindarta Kusuma**

[pangky.arbi@gmail.com](mailto:pangky.arbi@gmail.com)

Perencana Pertama, Bappeda DIY

## Abstrak

Makalah ini menjelaskan tentang bagaimana pariwisata bisa sebagai strategi untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Makalah ini menggunakan sumber data sekunder yang dieksplorasi untuk meningkatkan akumulasi data yang relevan. Kunjungan dilakukan di Dinas Pariwisata DIY, kemudian ke perpustakaan daerah dan juga beberapa data online (internet) digunakan. Hasil temuan utama dari penelitian tersebut adalah: Pariwisata adalah salah satu sektor strategis yang memberikan peluang banyak pekerjaan di DIY, kegiatan Pariwisata juga memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan; dan pariwisata merupakan sektor strategis untuk membantu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals, SDGs). Rekomendasi yang dibuat antara lain: setiap rencana pembangunan pariwisata harus disiapkan dengan tujuan khusus, pengembangan usaha skala menengah dan mikro harus terus didorong untuk mendukung kegiatan pariwisata di DIY; pemerintah harus memberikan jaminan keamanan yang baik untuk aktivitas pariwisata, memperbaiki fasilitas infrastruktur dan berinvestasi secara efektif untuk promosi pariwisata sehingga mampu meningkatkan popularitas destinasi lokal maupun nasional, yang kemudian hasilnya akan mampu mengurangi kemiskinan secara signifikan.

**Kata kunci:** ekonomi, pariwisata, pembangunan, strategi

## A. Pendahuluan

Manusia secara tidak sadar sudah melakukan aktivitas rekreasi sejak zaman kuno yang mana mereka mengembara melalui hutan yang masih belum pernah di lewati sebelumnya untuk mencari tempat singgah, tempat dengan persediaan makanan yang cukup, untuk kemudian membentuk peradaban baruyang lebih modern dan menyenangkan (Egbaiji, 2007). Seiring berjalannya waktu, proses pengembangan dan berbagai penemuan muncul dalam kurun waktu tertentu dimana mampu membangkitkan aktivitas manusia modern yang menyenangkan dengan berbagai atraksi yang menarik. Pengembangan kegiatan pariwisata dengan melibatkan unsur budaya akan

mampu membuat daya tarik wisata dengan aktivitas yang bercirikan kearifan lokal.

Perkembangan Industri pariwisata sangat dinamis dan berkembang pesat selama tiga dekade terakhir. Pariwisata telah menjadi industri terbesar di dunia dalam hal penyerapan tenaga kerja dan memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Dalam perkembangannya, sektor pariwisata telah menciptakan banyak peluang di daerah dengan menciptakan atraksi melalui pemanfaatan keindahan alam, budaya, dan atraksi buatan dengan bantuan teknologi.

Berdasarkan pemahaman tersebut dapat diamati bahwa pengembangan atraksi alam, budaya, dan buatan manusia berfungsi sebagai strategi untuk

pengembangan lingkungan sekitarnya. Pemahaman inilah yang memberi informasi kepada Pemda DIY untuk terus mengembangkan potensi destinasi wisata dan mempromosikan pariwisata sebagai industri yang strategis. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kekuatan harapan ini mungkin tidak jauh dari perkembangan positif pariwisata yang juga terjadi di banyak daerah yang berada di negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Eropa, Afrika Selatan, Trinidad dan Tobago, Mesir, Dubai.

Saat ini, terdapat banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dalam rangka pemenuhan Pendapatan Asli daerah (PAD). Hal tersebut menjadi indikator penting untuk pembangunan ekonomi di suatu daerah. Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu Provinsi yang aktivitas pariwisatanya berkembang baik, akan tetapi menghadapi tantangan pengembangan yang lebih beragam dengan variasi atraksi yang beraneka ragam dengan balutan budaya asli Yogyakarta. Dengan demikian, pengembangan pariwisata oleh Pemerintah DIY akan mampu memberikan tambahan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja. Artikel ini bertujuan menjelaskan strategi pembangunan pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi aspek pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan pengembangan SDM pariwisata, masing-masing aspek fokus pada pembahasan implikasi pembangunan pariwisata secara ekonomi dan strategi yang dibangun Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pembangunan pariwisata secara berkelanjutan.

## **B. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan adalah melalui Pengumpulan data-data sekunder yaitu data, artikel dan laporan ilmiah tematik yang berkaitan

dengan Pariwisata berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian. Metode penulisan jurnal bersifat deskriptif analitis menggunakan metode analisis data sekunder untuk memperoleh fenomena pertumbuhan perekonomian yang diakibatkan adanya kegiatan pariwisata yang terjadi di berbagai negara saat ini. Sebagian besar data sekunder diperoleh dari jurnal dan artikel ilmiah, Analisis data menggunakan cara penilaian berbagai komponen pembentuk, berdasar prinsip teknik analisis kuantitatif dan kuantifikasi data. Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai bagian dari pengertian deskriptif analitis adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan tujuan penulisan
2. Menentukan unit studi dan menghubungkan hal yang akan dikaji berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki dan proses yang menjadi landasan penulisan
3. Menentukan rancangan dalam memilih unit dan teknik pengumpulan data
4. Mengumpulkan data
5. Mengorganisasikan informasi, data yang terkumpul serta melakukan interpretasi dan generalisasi
6. Menyusun laporan yang diakhiri dengan kesimpulan dan saran

Teknik kuantifikasi data kualitatif menekankan pada pemilihan data untuk memperoleh beberapa informasi tentang konsep wisata halal, praktik wisata halal, tantangan dan wisata halal di masa yang akan datang.

## **C. Kerangka Teoritis**

Menthose dan Cupta (1980) di Egbaji (2007) melihat pariwisata sebagai ilmu, seni dan bisnis untuk menarik dan mendatangkan orang, memberikan fasilitas akomodasi untuk mereka dan dengan ramah melayani kebutuhan dan keinginan mereka. Peneliti lain memperluas ruang lingkup definisi pariwisata, misalnya, Egbaji (2007)

mendefinisikannya sebagai aktivitas yang memberikan layanan perjalanan wisata dengan tujuan mengubah rutinitas. Agba, Ikoh, Bassey & Ushie (2010) melihat pariwisata sebagai entitas bisnis yang menyediakan tempat, aktivitas dan atraksi untuk memberikan pelayanan kepada orang-orang yang sedang berlibur, dilihat dari aktivitasnya kegiatan pariwisata dilihat sebagai sumber relaksasi dan rekreasi. Fakta kegiatan pariwisata mampu meningkatkan hubungan sosial berarti aktivitas dari kegiatan itu dapat mempengaruhi sikap dan perilaku orang, dan secara luas dapat mempengaruhi perubahan masyarakat. Selanjutnya, Akpet (2005), dalam Eja, Otu, Ewa, Ndoma (2011) mendeskripsikan pariwisata sebagai aktivitas yang melibatkan banyak orang, adanya interaksi dan merupakan gabungan dari sarana lain seperti transportasi, komunikasi, dan akomodasi. Pariwisata merupakan proses perjalanan untuk tujuan rekreasi dan bisnis. Orang-orang yang terlibat dalam kegiatan ini disebut sebagai wisatawan. Organisasi pariwisata dunia (2009) hanya mendefinisikan wisatawan sebagai orang yang "bepergian ke- dan tinggal di tempat-tempat diluar lingkungan mereka yang biasa selama tidak lebih dari satu tahun berturut-turut, untuk liburan, bisnis dan keperluan lainnya".

Pariwisata di era saat ini telah menjadi aktivitas rekreasi global yang populer. UNWTO (2018) dalam menganalisis popularitas sektor ini menjelaskan bahwa pada tahun 2017, ada lebih dari 1.323 juta kedatangan wisatawan internasional; dengan pertumbuhan 6,8% pada tahun 2017 yang merupakan peningkatan tertinggi sejak tahun 2009. Penerimaan pariwisata internasional tumbuh menjadi US \$1.340 miliar pada tahun, sesuai dengan peningkatan riil sebesar 4,9%. Selain US \$ 1.340 miliar penerimaan secara keseluruhan dari bidang pariwisata, sejumlah US \$ 240 miliar dihasilkan dari sektor jasa transportasi, kemudian sebagai aktivitas ekspor dunia pariwisata menempati peringkat tiga setelah ekspor bahan

kimia dan bahan bakar. Saat ini pariwisata telah menjadi salah satu sektor yang sangat dapat diandalkan untuk negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Afrika Selatan, Mesir, Italia, Kenya, Spanyol, Cina, Thailand, Fiji, Bahama, India, Nigeria, Indonesia dan banyak lagi. Investasi di sektor pariwisata telah menghasilkan manfaat yang tak ternilai bagi banyak negara dan kota di dunia.

Hal serupa terjadi dengan kondisi pariwisata di DIY yang mengalami pertumbuhan yang positif. Hal tersebut dapat dilihat dari struktur perekonomian DIY tahun 2017 yang ditopang oleh sektor-sektor produksi barang dan jasa dengan pangsa yang beragam. Pangsa terbesar dalam PDRB DIY 2017 adalah lapangan usaha industri pengolahan, yaitu 13,12 persen. Pangsa kontribusi terbesar berikutnya adalah penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 10,32 persen (pariwisata); pertanian 10,01 persen; dan konstruksi 9,49 persen. Empat lapangan usaha mempunyai pangsa sekitar 8 persen, yaitu perdagangan, administrasi pemerintahan, informasi dan komunikasi, dan jasa pendidikan. Sementara kategori-kategori lain mempunyai pangsa berkisar antara 0,1 hingga 7 persen. Artinya kontribusi pariwisata di struktur perekonomian dengan menempati peringkat ke dua membuat pertumbuhan perekonomian di DIY lebih stabil dan terus tumbuh secara positif.

### **C.1. Asal Usul Industri Pariwisata Modern**

Menurut Chandra (2007), selama Abad Pertengahan, gereja di Eropa digunakan sebagai pelindung seni dan pusat kegiatan ilmiah. Gereja, meskipun kehilangan kekuatan substansial sebagai hasil dari gerakan Reformasi, yang kemudian menjadi pelindung seni, mensponsori artis-artis terkenal Italia seperti Michelangelo, Leonardo da Vinci dan Raphael selama tahun 1500-an.

The Grand Tour adalah perusahaan yang bergerak di pelayanan perjalanan wisata dengan spesialisasi atraksi budaya yang berasal dari daratan Eropa,

alasan utama ketika melakukan perjalanan selama Abad Pertengahan adalah untuk berdagang dan ziarah keagamaan, kemudian fokus perjalanan sekarang bergeser untuk menikmati berbagai aktivitas budaya dimana setiap group akan didampingi satu pemandu wisata. Setiap wisatawan diharapkan tidak hanya untuk mengamati seni, sastra, musik, sains dan aktivitas budaya lainnya di Eropa, tetapi diharapkan adanya peningkatan kemampuan pengetahuan yang bisa dimanfaatkan setelah kembali dari perjalanan mereka. Tujuan dari aktivitas Grand Tour akhirnya berevolusi dari paket wisata dengan segmen anak-anak muda menjadi untuk segala usia, sebagaimana orang berpendapat bahwa Grand Tour sampai saat ini masih ada sebagaimana dibuktikan masih adanya peziarah dan para pelancong Amerika Utara ke pusat budaya di Negara-negara Eropa.

Asal-usul industri pariwisata modern dan pariwisata budaya khususnya diyakini telah dimulai dengan adanya Grand Tour pada saat itu. Banyak kota-kota besar di Eropa (misalnya Paris, Milan, dan Roma) mengembangkan hotel dan layanan superior (makan, minum, dan atraksi) untuk tamu mereka, tetapi di banyak kota masih banyak yang belum memiliki pelayanan dengan standar pariwisata yang baik sehingga perjalanan masih relatif berisiko dan melelahkan. Sri Lanka misalnya memiliki keunggulan kompetitif global untuk ekowisata karena memiliki sumber daya alam dan budaya yang tinggi, tetapi belum didukung dengan fasilitas infrastruktur dan sarana transportasi yang memadai untuk menuju satu destinasi ke destinasi yang lain.

## C.2. Perspektif Manfaat Pariwisata

Pariwisata melibatkan perencanaan jangka panjang dan manfaat jangka panjang. Manfaat atau dampak dari kegiatan pariwisata dapat didiskusikan dengan tema berikut:

### C.2.1. Implikasi ekonomi

Secara global pariwisata berkontribusi secara signifikan terhadap produk nasional bruto (GNP) nasional. Peranan pariwisata dalam Produk Domestik Bruto (PDB) menurut penggunaan (sisi demand) dapat diidentifikasi melalui: (1) porsi konsumsi rumah tangga untuk kegiatan wisata dalam negeri dan pengeluaran wisatawan Indonesia ke luar negeri sebelum meninggalkan dan setelah tiba di Indonesia; (2) porsi pengeluaran konsumsi pemerintah, untuk berbagai kegiatan terkait pariwisata; (3) porsi ekspor yang mencakup pengeluaran wisatawan mancanegara selama mereka berada di Indonesia; (4) porsi impor yang mencakup pengeluaran wisatawan Indonesia selama mereka berada di luar negeri; dan (5) porsi investasi untuk pengembangan dan pembangunan pariwisata.

**Tabel 1.** Peranan Pariwisata terhadap PDB Indonesia dari sisi Neraca Penggunaan Tahun 2015 (triliun Rupiah)

Komponen	Kons. RT	Kons. Pemerintah	investasi	Ekspor	Impor
Pariwisata	231,89	8,73	146,56	175,71	97,69
PDB Nasional	6.477,58	1.124,81	3.782,14	2.439,11	2.389,63
Share Pariwisata (%)	3,58	0,78	3,88	7,2	4,09

Sumber: BPS

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa peranan pariwisata dalam konsumsi rumah tangga mencapai 3,58 persen. Sementara peranan pariwisata dalam pengeluaran konsumsi pemerintah relatif kecil, yaitu hanya 0,78 persen dari total pengeluaran (current expenditure) konsumsi pemerintah. Selanjutnya, peranan pariwisata dalam ekspor barang dan jasa mencapai 7,20 persen, ditentukan dari besarnya konsumsi wisman pada tahun 2015.

### C.2.2. Pariwisata sebagai industri besar

Dikatakan sebagai industri besar karena mampu menyerap tenaga kerja nomor satu di dunia. Setiap

tahun lebih dari 600 juta orang melakukan perjalanan internasional, sebagian besar memulai perjalanan dari negara asal mereka untuk keperluan bisnis dan rekreasi. Dampak dari aktivitas itu industri pariwisata tumbuh dan berkembang mulai dari hotel, resort, maskapai penerbangan, agen perjalanan, dan aktivitas bisnis lainnya yang bisa dilakukan oleh wisatawan. Pekerjaan yang dihasilkan oleh aktivitas pariwisata tersebar hampir diseluruh bidang perekonomian, mulai dari bidang ritel, konstruksi, manufaktur dan telekomunikasi serta langsung di perusahaan perjalanan dan pariwisata. Pekerjaan ini mempekerjakan sebagian besar wanita, baru kemudian laki-laki dan orang muda (WTTOIHRA, 1999).

### **C.2.3. Strategi untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan/ *Sustainable Development Goal's (SDG's)* dan *multiplier effect***

Pariwisata berkelanjutan dapat menjadi "strategi" instrumen yang efektif untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Milenium (WTO, 2006). Ini bisa menjadi strategi yang tepat untuk mencapai pengentasan kemiskinan: menyediakan peluang pembangunan berkelanjutan dan lapangan pekerjaan bagi komunitas miskin, bahkan di daerah pedesaan yang paling terpencil (Makame & Boon, 2008). Secara sosial, pariwisata memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat selaku tuan rumah, kegiatan pariwisata bisa menjadi sumber pendapatan, persahabatan, dan perdamaian (Mirbabayeu & Shagazatova, 1999). Efek lain dari kegiatan pariwisata diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengembangkan sikap positif terhadap satu sama lain
- b. Mempelajari budaya dan adat istiadat satu sama lain
- c. Mengurangi persepsi negatif
- d. Mengembangkan persahabatan

- e. Mengembangkan kebanggaan, penghargaan, pengertian, rasa hormat, dan toleransi untuk budaya satu sama lain.
- f. Meningkatkan harga diri tuan rumah dan wisatawan
- g. Kepuasan psikologis dengan interaksi.

## **D. Hasil dan Pembahasan**

### **D.1. Statistik dan peringkat pariwisata dunia**

Pada tahun 2017, ada 1.323 juta wisatawan internasional, dengan pertumbuhan 6,8% dibandingkan dengan 2009. UNTWO (2017) melaporkan bahwa ada sepuluh negara yang paling banyak dikunjungi berkaitan dengan jumlah wisatawan internasional dilihat dari kebutuhan dan keinginan mereka dalam melakukan perjalanan wisata: 1) Perancis, dikunjungi sebanyak 86,9 juta wisatawan internasional; 2) Spanyol, dikunjungi sebanyak 81,8 juta wisatawan internasional; 3) Amerika Serikat, dikunjungi sebanyak 75,9 juta wisatawan internasional; 4) China, dikunjungi sebanyak 60,7 juta wisatawan internasional; 5) Italia, dikunjungi sebanyak 58,3 juta wisatawan internasional; 6) Meksiko, dikunjungi sebanyak 39,3 juta wisatawan internasional; 7) Inggris, dikunjungi sebanyak 37,7 juta wisatawan internasional; 8) Turki, dikunjungi sebanyak 37,6 juta wisatawan internasional; 9) Jerman, dikunjungi sebanyak 37,5 juta wisatawan internasional; 10) Thailand, dikunjungi sebanyak 35,4 juta wisatawan internasional.

Pada tahun 2017, peningkatan jumlah wisatawan yang menggunakan jasa akomodasi sebanyak 679.724 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 211.68 dimana peningkatan jumlah wisatawan yang menggunakan jasa akomodasi tahun 2016 sebesar 321.103 orang.

Destinasi wisata DIY masih diminati oleh wisatawan nusantara hal tersebut dapat terlihat dari jumlah



kunjungan wisatawan nusantara yang setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2016 jumlah kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 4.194.261 orang sedangkan pada tahun 2017 kunjungan wisatawan nusantara bertambah sebanyak 637.086 orang (naik 15,2 %), sehingga pada tahun 2017 jumlah wisatawan nusantara telah mencapai 4.831.347 orang dan telah melebihi target indikator kinerja tahun 2017.

## **D.2. Pariwisata dan Destinasi Pariwisata di Indonesia**

Pariwisata di Indonesia sebagian besar berpusat pada kegiatan budaya, karena banyaknya kelompok etnis di negara ini, tetapi tidak hanya itu saja ada pemandangan alam, pegunungan, perbukitan, air terjun dan objek wisata alam lainnya (Nesparnas, 2015). Belakangan ini, pemerintah telah banyak membuat perencanaan pengembangan pariwisata yang melibatkan berbagai sektor khususnya pihak swasta, sebagai contoh adanya pembangunan resort, hotel, destinasi wisata baru berstandar internasional. Selain perencanaan dan pengembangan pariwisata yang sudah cukup baik, ada juga faktor penghambat upaya pengembangan pariwisata di negara ini mulai dari pembangunan infrastruktur yang belum merata, ketidakpastian investasi dan iklim bisnis, kebersihan dan kesehatan, bencana alam, kurang baiknya amenities di destinasi wisata, dan SDM pariwisata yang belum standar.

Archibong (2004) menggambarkan destinasi wisata di Indonesia perlu ditambahkan dengan adanya festival dan perayaan budaya untuk meningkatkan daya tarik wisata. Pemerintah Indonesia melalui kementerian pariwisata pada tahun 2016 telah membuat perencanaan dan pengembangan destinasi pariwisata skala prioritas di 10 wilayah diantaranya Danau Toba, Tanjung Kelayang, Mandalika, Wakatobi, Pulau Morota, Kepulauan Seribu, Tanjung Lesung, Borobudur, Bromo

Tengger Semeru, dan Labuan Bajo. Penentuan skala prioritas pengembangan destinasi pariwisata dilakukan untuk menarik lebih banyak lagi wisatawan mancanegara dan untuk meningkatkan investasi asing dalam jangka panjang. Beberapa gubernur di provinsi yang ada di Indonesia mengadopsi pariwisata sebagai sarana untuk meningkatkan investasi sehingga akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Akpan, 2011).

## **D.3. Industri Pariwisata di DIY**

Dalam upaya untuk memulai pengembangan industri pariwisata di di DIY agar lebih tertata dan fokus, pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta membuat dokumen perencanaan jangka panjang pada tahun 2012, Dokumen ini bertanggung jawab terhadap pengembangan pariwisata dari sisi program dan strategi yang sudah dibuat secara berkelanjutan. Fokus pengembangan pariwisata 4 aspek utama yaitu industri, destinasi, pemasaran, dan kelembagaan pariwisata. Menurut Egbaji (2007), seluruh bagian di suatu negara dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pariwisata mulai dari spesies satwa liar, gunung, iklim, bukit, hutan, air terjun, hutan bakau, gua, spesies yang terancam punah seperti komodo, dinamika budaya yang luar biasa, kerajinan lokal yang indah, varietas hasil pertanian dan keramahan yang hangat. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi kepariwisataan yang besar dan beragam, baik berupa daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya (peninggalan sejarah maupun adat tradisi kehidupan masyarakat) maupun daya tarik wisata khusus. Keragaman daya tarik wisata DIY juga dapat dilihat dari perspektif geografis, mulai dari wilayah pegunungan, wilayah pedesaan dan perkotaan, maupun wilayah pantai/ perairan/ laut.

Pariwisata DIY sudah mulai menerapkan pengembangan pariwisata modern baik dari sisi pengelolaan pemasaran yang lebih tersegmentasi

(*mass tourist, special interest tourist*) dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang pesat untuk mendukung promosi daya tarik wisata yang meliputi banyak aspek mulai dari dayatarik alam, budaya, maupun minat khusus. Pengembangan destinasi pariwisata di DIY sudah seyogyanya dikembangkan secara *sustainable tourism development*, dimana dalam pengembangan destinasi baru harus menjaga kelangsungan destinasi yang ada dan membentuk reputasi destinasi untuk menciptakan keunikan dan keunggulan. Untuk mencapai hal tersebut perlu disiapkan manajemen SDM dan kelembagaan yang memadai melalui pelatihan-pelatihan dan sertifikasi bagi SDM pelaku pariwisata. Selain itu penataan sistem aksesibilitas dan manajemen transportasi ke lokasi-lokasi daya tarik wisata (jaringan jalan, area parkir, penataan rute jalur/ rute wisata dan angkutan umum) sedang dikembangkan untuk mengurangi kemacetan akibat menumpuknya wisatawan yang berkunjung di satu lokasi daya tarik wisata.

#### **D.4. Dampak Strategis Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)**

Dampak sosial dan ekonomi yang sangat besar dan manfaat kegiatan pariwisata dalam beberapa waktu terakhir telah diakui oleh DIY dan beberapa daerah di Indonesia. Dengan melihat potensi ini ada upaya menuju diversifikasi penumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata selain memanfaatkan dan mengembangkan pariwisata selain dari sektor non-minyak. Sebagaimana dikutip dalam Ekwere (2010), ada potensi besar di sektor pariwisata yang bisa lebih dioptimalkan khususnya dengan adanya nilai tambah budaya, beberapa manfaat potensial yang dapat diturunkan dari aktivitas pariwisata dan mampu meningkatkan pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut:

- a. Pariwisata mampu mempromosikan budaya domestik

- b. Persatuan lintas Kabupaten/Kota yang dapat dipupuk melalui partisipasi karnaval tahunan yang dilaksanakan dengan melibatkan lintas sektor
- c. Perjalanan pariwisata di berbagai wilayah seringkali dilengkapi dengan perhatian luar biasa terhadap pembaruan dan sanitasi perkotaan, untuk membuat lingkungan lebih indah dan menarik.
- d. Upaya pemerintah daerah untuk mempromosikan pariwisata dengan harapan memperoleh manfaat sosial ekonomi tentu saja akan diikuti dengan penyediaan fasilitas keamanan yang terjamin untuk wisatawan.
- e. Peningkatan fasilitas infrastruktur seperti fasilitas pedestrian, jalan, listrik, pasokan air, dan taman rekreasi untuk membuat negara menarik.
- f. Ketenangan lingkungan dan stabilitas politik serta langkah pengembangan pariwisata dalam beberapa waktu terakhir telah menarik berbagai macam jenis investasi di bidang pariwisata.
- g. Peningkatan investasi di sektor pariwisata baik dari pelaku lokal, nasional, maupun asing telah meningkatkan pemanfaatan sumber daya manusia dan membuka banyak peluang kesempatan kerja di bidang jasa.
- h. Penyerapan tenaga kerja dan sumber daya lainnya mampu mengurangi tingkat kemiskinan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terciptanya kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan standar hidup.
- i. Kegiatan pariwisata terutama pada akhir tahun yang berupa karnaval biasanya menarik begitu banyak pengunjung ke-DIY, aktivitas tersebut mampu meningkatkan kegiatan komersial dan menghasilkan banyak pendapatan bagi pemerintah maupun individu, terutama di sektor restoran dan perhotelan.

Sejalan apa yang di sampaikan Ekwere ada dua dampak yang terlihat dengan berkembangnya

kegiatan pariwisata di DIY, pertama adanya peningkatan jumlah hotel di kab/kota yang diikuti dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja.

Perkembangan hotel memperlihatkan bahwa hotel berbintang terbanyak masih berada di kota Yogyakarta yang berada di pusat DIY serta berdekatan dengan simpul-simpul transportasi publik. Sementara jumlah hotel non bintang di Gunungkidul juga bertambah cukup signifikan dalam dua tahun, berlawanan dengan kabupaten/kota lain di DIY. Perkembangan hotel bintang maupun non bintang selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.

**Tabel 2.** Perkembangan Hotel dan Akomodasi Lain Per Kab/Kota di DIY Tahun 2015-2016

Kabupaten / Kota	Hotel Bintang		Hotel Non Bintang		Jumlah Total	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Kulonprogo	-	-	26	26	26	26
Bantul	1	1	261	260	262	261
Gunungkidul	1	1	69	87	70	88
Sleman	26	32	363	360	389	392
Yogyakarta	57	62	362	358	419	420
<b>Jumlah</b>	<b>85</b>	<b>96</b>	<b>1.081</b>	<b>1.091</b>	<b>1.166</b>	<b>1.187</b>

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2017

Kemudian dilihat dari sisi spending money pada tahun 2017, total pengeluaran saat berwisata di DIY wisatawan nusantara sebesar Rp 1.910.475,- (naik sebesar 1% dibanding tahun 2017 yang sebesar Rp 1.889.000,-).

**Tabel 3.** Pengeluaran Wisatawan Nusantara DIY Tahun 2017

Lokasi Kunjungan	Total Pengeluaran Wisatawan (Rp)	Proporsi Pengeluaran Wisatawan (%)
Kota Yogyakarta	992,301	51.94%
Kabupaten Sleman	387,635	20.29%
Kabupaten Bantul	273,962	14.34%
Kabupaten Gunungkidul	164,492	8.61%
Kabupaten Kulon Progo	92,085	4.82%
<b>Total</b>	<b>1,910,475</b>	<b>100%</b>

Sumber: Analisis Belanja Wisatawan Dinas Pariwisata DIY 2018

Sedangkan besarnya pengeluaran Wisatawan Mancanegara saat berwisata di DIY sebesar US\$ 891 (naik sebesar 9,2% dibandingkan tahun 2017 yang sebesar US \$ 828)

**Tabel 4.** Pengeluaran Wisatawan Mancanegara DIY Tahun 2017

Lokasi Kunjungan	Total Pengeluaran Wisatawan (USD)	Proporsi Pengeluaran Wisatawan
Kota Yogyakarta	474.90	53.30%
Kabupaten Sleman	194.24	21.80%
Kabupaten Bantul	119.39	13.40%
Kabupaten Gunungkidul	77.52	8.70%
Kabupaten Kulon Progo	24.95	2.80%
<b>Total</b>	<b>891</b>	<b>100%</b>

Sumber: Analisis Belanja Wisatawan Dinas Pariwisata DIY 2018

## E. Kesimpulan

Pariwisata adalah kegiatan sosial yang melibatkan perjalanan oleh individu atau kelompok untuk tinggal di luar lingkungan mereka sehari-hari dalam suatu periode tertentu yang tidak terlalu lama, untuk tujuan bersenang-senang, jalan-jalan, bisnis atau kebutuhan lainnya. Pariwisata telah menjadi aktivitas global yang populer dan menjadi sektor penting dalam perkembangannya, mampu mendatangkan pendapatan dalam jumlah besar

dalam transaksi barang dan jasa dan menciptakan peluang untuk bekerja di industri jasa yang terkait dengan pariwisata (UNWTO, 2010). Beberapa manfaat lain dari pengembangan pariwisata yaitu berdampak positif pada pembangunan ekonomi di suatu daerah termasuk di DIY, peningkatan secara berkala sistem keamanan, pembaruan untuk menata wilayah perkotaan yang tidak lazim dan penyebaran infrastruktur untuk mempermudah akses wisatawan, meningkatkan tingkat pendapatan per kapita dan standar hidup karena penciptaan lapangan kerja serta nilai tambah bagi sumber daya lokal. Oleh karena itu, potensi pariwisata dalam merangsang dan menumbuhkan perkembangan ekonomi di DIY, hal ini bukan sesuatu yang mengada-ada akan tetapi nyata dan membutuhkan perhatian lebih jauh dari pemerintah.

## Daftar Pustaka

- Agba, O. A., Ikoh, M. U., Bassey, A.O. dan Ushie, E. M. (2010). *Industri pariwisata berdampak pada budaya Efiks, Nigeria*. Jurnal Internasional Penelitian Kebudayaan, Pariwisata, dan Perhotelan. Vol.3, No. 4.
- Akpan, E. I. (2011). *Globalisasi: peluang dan ancaman terhadap reformasi perbankan di Nigeria*. Jurnal Akademi Manajemen Nigeria. Vol.5, No.1, 68-72.
- Archibong, M. (2004). *Nigeria: Tambang emas menunggu untuk disadap*. [http://en.wikipedia.org/wiki/Tourism di Nigeria](http://en.wikipedia.org/wiki/Tourism_di_Nigeria). Diakses 12 Oktober 2011
- Chandra, D. S. (2007) *Wisata Utama asal industri pariwisata modern*. <http://sundaytimes.ik/070304/plus/011pls.html>. Diakses 10 September 2018.
- Egbaji, S. (2007). *Pengembangan pariwisata di Nigeria - pengalaman Cross River State*. (1st ed.). Lagos: Elshaphhire Limited.
- Eja, E. I., Otu, J. E, Ewa, E. E. dan Ndomah, B. (2011). *Peran partisipasi sektor swasta dalam pembangunan berkelanjutan di Cross River State, Nigeria*. Jurnal Internasional bisnis dan Ilmu Sosial. Vol.2, No.2.
- Ekwere, U. (2010). *Menjelajahi potensi pariwisata untuk pembangunan ekonomi*. <http://www.nigerianbestforum.com/blog/?p=42107>. Diakses 10 September 2018.
- Makame, M. K. dan Boon, E. K. (2008). *Pariwisata berkelanjutan dan pembagian manfaat di Zanzibar: kasus Cagar Hutan Kurengwa-Pongwe*. Vol. 24, No.2.
- Mirbabayau, B. dan Shagzatoua, M. (1999). *Dampak ekonomi dan sosial pariwisata* (tidak dipublikasikan).
- Manual Teknis UNTWO. (2009). *Kumpulan statistik belanja pariwisata*. 1995. p14. Diakses 14 September, 2018.
- Neraca Satelit Pariwisata Nasional (2016), Kementerian Pariwisata Republik Indonesi
- Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
- UNWTO. (2018). Tourism Highlights
- WTO. (1999). *Pariwisata Internasional: Perspektif global. (Edisi 2)*. Madrid: Organisasi Pariwisata Dunia.
- WTO. (2006). *Pariwisata: Sumber daya utama untuk pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan*. <http://www.worldtourism.org/newsroom/releases/2006/september/think-tank.htm>. Diakses 11 Juni 2011.
- WTTC. (2010). *Dampak perjalanan dan pariwisata pada Jobs dan ekonomi*. [Http://www.wttc.org](http://www.wttc.org). Diakses 10 April, 2011
- WTTOIHRA. (1999). Kepentingan global pariwisata: pariwisata dan pembangunan berkelanjutan. Sesi ke-7